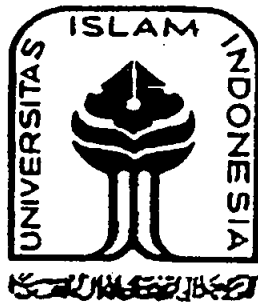


**KRITIK M. UMER CHAPRA
TERHADAP EKONOMI PEMBANGUNAN**



Oleh :

**AKHMAD NUR ZARONI
NIM 980029**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam
Yogyakarta
2000

ABSTRAKSI

Konsep pembangunan yang diterapkan di kebanyakan negara-negara sedang berkembang (NSB) adalah hasil adopsi dari teori-teori yang didasarkan pada pengalaman negara-negara Barat. Perbedaan latarbelakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya membuat teori-teori yang diterapkan di NSB tidak memadai karena sifatnya yang *a historis*. Akibatnya teori-teori pembangunan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah justru banyak menimbulkan masalah yang kontradiktif dengan tujuan-tujuan pembangunan. Maka untuk keluar dari kondisi ini NSB harus melakukan upaya dekonstruksi (pembongkaran) terhadap paradigma pembangunan dan rekonstruksi bagi paradigma baru yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembangunan NSB itu sendiri.

Usaha-usaha ke arah ini di antaranya telah dilakukan oleh ekonom Muslim modern Dr. M. Umer Chapra yang dengan berani menguji keabsahan teori-teori Barat dan mencoba memakai kerangka pemikiran lain yang didasarkan pada pendekatan Islam. Dengan demikian ia telah menciptakan iklim yang kondusif bagi munculnya konsepsi-konsepsi baru tanpa harus “silau” pada kebesaran teori yang dianggap telah mapan. Di tengah-tengah pencarian alternatif model pembangunan inilah kajian atas pemikiran Chapra menjadi sangat relevan. Dalam kajian literer ini digunakan metode analitis kritis yang mendeskripsikan, membahas, menafsirkan, dan mengkritik gagasan utama teori-teori pembangunan model Barat dalam perspektif Chapra yang didukung dengan pendapat-pendapat tokoh lainnya dalam upaya mencari hubungan, dan pengembangan model rasional. Sehingga dapat ditemukan pokok-pokok persoalan yang selanjutnya disusun refleksi dan kesimpulan sebagai hasil kajian.

Dalam kajian ini ditemukan bahwa tujuan-tujuan pembangunan yang menekankan keadilan sosio-ekonomi tidak dapat disiapkan dalam kerangka kerja sekuler dan “bebas nilai”. Untuk menyiapkan tujuan-tujuan pembangunan tersebut harus ada suatu sistem motivasi yang efektif. Maka harus dilakukan restrukturisasi sosio-ekonomi secara menyeluruh dengan jalan reformasi politik, sosial, dan ekonomi yang disertai dengan transformasi moral ke dalam perilaku individu dan kolektif yang akan memberikan filter nilai dan mempunyai fungsi membatasi mereka dari penyimpangan-penyimpangan yang merugikan iklim pembangunan. Hal ini mengimplikasikan adanya Islamisasi ekonomi, yaitu strukturisasi ekonomi dan mengubah pola perilaku individu, institusi, dan pemerintah agar sesuai dengan strategi Islam. Sehingga kebijakan-kebijakan yang disusun dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.

ABSTRACT

In most developing countries, the concept of development has been adopted from Western. Whereas, developing countries have different background and condition from Western in politics, economics, social and culture. The implication of that condition, Western concepts could not solve the real problem of development in developing countries. Therefore, to eliminate this condition the developing countries must deconstruct the old paradigm of development and create the new paradigm that suite to the objective of developing countries.

A modern Moslem economist, Dr. M. Umer Chapra has evaluated the validity of those Western theories and tried to build another theoretical framework based on Islamic approaches. It inspired the rise of new concepts of development to confront the Western concepts that have been viewed as the only established one to be applied. In terms of finding a new alternative model of development, apparently, Chapra's thinkings are relevant to be discussed.

This study used critical analysis method that will describe, discuss, interpret and criticize the main idea of Western theories of development in Chapra's perspective that will also supported by another ideas. The purpose is obtaining the relationship among those ideas as well as developing rationale models of development. It is expected that the major problems of development concepts can be reflected and concluded as a new alternative finding.

The result shows that the aim of development could not be prepared by the secular and "value free" framework of development. In this case the effective motivation system are needed. Hence, the social and economical of development are need to be restructured comprehensively. It can be achieved by reforming political, social and economical factors followed by morale transformation in both individual and group behavior. This transformation is not only used to filter an ethical value of societies but also functioned to limit the deviation practices in development process. As a result, it seems that economical restructuring based on Islamic way of life that is expected can change an individual, organization as well as government behavior is needed to be applied. Hence, the development policies in the developing countries can be set and implemented appropriately.



**Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

NOTA DINAS

TESIS berjudul : KRITIK M-UMER CHAPRA TERHADAP EKONOMI
PEMBANGUNAN

Ditulis oleh : AKHMAD NUR ZARONI, S.Ag.

NIM : 980029

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam Pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 Agustus 2000

Ketua Program



Dr. Imam Syafi'ie, MA



PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp. (0274) 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : **AKHMAD NUR ZARONI, S.Ag.**
No. Pokok : 980029
NIMKO : 99/UII/III/00584
No. Ujian : 99/UJN/DIY/III/00063
Konsentrasi : **Ekonomi Islam**

Judul : **KRITIK M. UMER CHAPRA TERHADAP EKONOMI
PEMBANGUNAN**

Ketua : Dr. Imam Syafiqe, MA

Sekretaris : Dra. Rahmani Timorita Y, M.Ag.

Pembimbing : Drs. H. Zamroni, M.Sc., Ph.D.

Penguji : 1. Drs. M. Akhyar Adnan., MBA., AK., Ph.D.

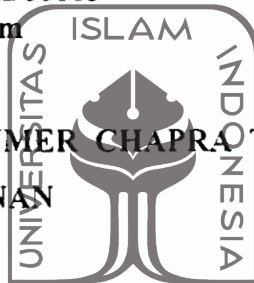
2. Dr. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2000

Pukul : 09.00 WIB

Hasil/Nilai : 76,34 /B

Predikat : Sangat Memuaskan



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : KRITIK M-UMER CHAPRA TERHADAP EKONOMI
PEMBANGUNAN

Ditulis oleh : AKHMAD NUR ZARONI, S.Ag.

NIM : 980029

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 Agustus 2000
Pembimbing,


UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
Drs. H. Zamroni, M.Sc., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga tesis yang berjudul KRITIK M. UMER CHAPRA TERHADAP EKONOMI PEMBANGUNAN ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada: Bapak Profesor H. Zaini Dahlan, MA., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Bapak Dr. Imam Syafi'ie, MA., selaku ketua program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Bapak Drs. H. Zamroni, M.Sc., Ph.d., selaku dosen pembimbing yang di tengah-tengah kesibukannya telah menyediakan waktunya untuk mengoreksi, mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Dan yang tidak lepas dengan semua urusan proses penulisan tesis ini juga, yaitu segenap staf pengelola Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak kemudahan. Khusus kepada Almarhumah kedua orang tuaku, Ayahanda Kasmari dan Ibunda Sutri yang telah mencurahkan kasih sayang dan memahamkan Ananda tentang kehidupan dengan caranya sendiri, semoga segala amal baik beliau diterima oleh Allah SWT, dan dihapuskan dari segala kesalahan. Sembah sungkem kepada Paman dan Bibik H. Hadi dan Hj. Mursiyat, yang dengan penuh ikhlas telah mengemban tanggung jawab kedua orang tuaku

dan memberikan kesempatan kepada Ananda untuk menikmati pendidikan sampai jenjang S-2, semoga Allah tetap membukakan pintu hidayah dan inayah-Nya kepada beliau berdua. Tidak lupa juga seluruh keluarga dan handai tolan yang turut mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Dan yang terakhir kepada sahabatku, saudaraku, dan harpanku Norvadewi yang dengan segala ketulusannya telah memberikan semua yang terbaik ketika penulis menyelesaikan penulisan tesis ini, sehingga dapat selesai tepat pada waktu yang ditentukan.

Untuk membalas semuanya ini, penulis tidak mampu melakukan apa-apa kecuali hanya berdo'a, semoga apa yang telah diberikannya menjadi amal baik dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari semuanya sangat dibutuhkan sehingga usaha yang sangat sederhana ini mempunyai arti sesuai dengan yang diharapkan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 20 Agustus 2000

Penulis



AKHMAD NUR ZARONI

NIM 980029

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN 	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Studi Pustaka.....	5
E. Landasan Teori.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II M. UMER CHAPRA DAN PERANNYA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM	 21
 BAB III EKONOMI PEMBANGUNAN : TEORI DAN GAGASAN DASAR	
A. Gagasan Dasar Ekonomi Pembangunan.....	30
1. Definisi dan Ruang Lingkup	30

2. Akar Historis	33
3. Pandangan Lama dan Baru	37
B. Teori Ekonomi Pembangunan	41
1. Teori Pertumbuhan Linier	43
2. Teori Perubahan Struktural	53
3. Teori Ketergantungan Internasional (Dipendensia)	56
4. Teori Neo-Klasik Penentang Revolusi	62

BAB IV KRITIK M. UMER CHAPRA TERHADAP EKONOMI

PEMBANGUNAN	65
A. Kritik Paradigma	66
1. Laissez Faire dan Dirigiste	66
2. Euro Sentrisme	79
B. Kritik Kebijakan	84
1. Trickle Down Effect	84
2. Trade Off	93
3. Kontroversi Kebijakan	101
4. Implikasi Kebijakan (inflasi, hutang, dan sulitnya perencanaan)	113
C. Kembalinya Ideologi Pasar	119
1. Program Penyesuaian (Adjustment)	121
2. Klaim Neo-Klasik yang Salah (Melihat Asia Timur)	134

BAB V KE ARAH SISTEM YANG BERKEADILAN : PERSPEKTIF

CHAPRA	147
A. Prinsip Dasar	148
1. Fungsi Negara menurut Chapra	148
2. Pendekatan Komprehensif	155
B. Dimensi Kebijakan	159
1. Pembangunan Manusia	159
2. Pemerataan kekayaan	171
3. Restrukturisasi Ekonomi	178

4. Restrukturisasi Keuangan	199
5. Perencanaan Strategis	204
BAB VI PENUTUP	
A. Refleksi	209
B. Kesimpulan	218
C. Catatan dan Saran-saran.....	219

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 0.1 Kurva Kuznets	95
Gambar 0.2 Kurva Philips Jangka Pendek	99



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā	z	-
س	sin	s	-
سین	syin	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	tā	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wau	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ی	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karamatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wawu mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariah ditulis *al-*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan Huruf Besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام



ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak pertama kali ilmu ekonomi diakui sebagai cabang ilmu tersendiri, setelah munculnya tokoh Adam Smith dengan bukunya yang sangat terkenal (1776) *The Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*, persoalan pembangunan ekonomi belum banyak dibicarakan. Masalah pembangunan ekonomi baru aktual setelah Perang Dunia Kedua (PD II),¹ saat itu negara-negara yang baru merdeka berusaha mengejar ketertinggalannya. Sehingga, muncullah ekonomi pembangunan yang selanjutnya selalu dihubungkan dengan negara-negara baru merdeka atau negara-negara sedang berkembang atau juga disebut negara-negara Dunia Ketiga.²

Usaha negara Dunia Ketiga ini ternyata mendapat perhatian besar dari negara Dunia Pertama dengan memberikan bantuan-bantuan, baik berupa hibah (*grant*) maupun pinjaman lunak atau dalam bentuk bantuan teknik dan tenaga ahli. Bahkan bantuan untuk melakukan studi kelayakan suatu proyek. Hal ini semakin gencar, apalagi ketika ada kepentingan untuk mendapat dukungan dalam perang ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur. Sehingga, muncullah faham *developmentalisme* yang dikomandani oleh Amerika Serikat.³

¹ Sebab-sebab kurangnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi sebelum PD II di antaranya, *pertama*, saat itu negara-negara Dunia Ketiga masih merupakan negara jajahan. Para penjajah (negara-negara maju) merasa tidak perlu memikirkan secara serius pembangunan ekonomi negara-negara jajahan, karena tujuannya mencari untung bukan mensejahterakan negara jajahan. *Kedua*, negara-negara jajahan perhatiannya terfokus pada kemerdekaan bukan pembangunan ekonomi. *Ketiga*, para ekonom Barat menghadapi depresi besar tahun 1930-an. Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : STIE YKPN, 1999, h. 4

² T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Bagian Makro*, Yogyakarta : Kanisius, 1992, h. 428.

³ Lihat dampak perang dingin di Hasyim Wahid dkk, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, Yogyakarta : LKiS, 1999, h. 20-22.

Untuk memudahkan usahanya disusunlah sebuah strategi yang menciptakan konstruksi tatanan dunia pascaperang yang terpusat di Amerika Serikat, yaitu penerapan sistem *Bretton Woods* yang menyediakan kerangka institusional bagi sebuah tatanan ekonomi liberal yang diinginkan, dan Marshall Plan yang memberikan kemungkinan bagi mereka untuk mengelola perekonomian dunia pascaperang pada basis komitmen bersama bagi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tinggi, sebuah komitmen dari hasil hubungan negara- masyarakat neo-liberal khas AS.⁴ Dominasi ini dipandang oleh para ilmuwan sosial sebagai fondasi hegemoni Amerika atas sekutunya di Eropa, yang selanjutnya digunakan untuk memperluas hegemoninya ke negara-negara Dunia Ketiga.⁵

Tidak heran kalau dalam sejarah pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga diwarnai dengan teori-teori Barat. Seperti Teori-teori Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi (*The Stages of Economic Growth Theories*) yang bertumpu pada asumsi-asumsi ekonomi Neo-Klasik, Teori-teori Internasionalis-Struktural (*The Structural Internationalist Theories*),⁶ dan Teori Keterbelakangan dan Ketergantungan Marxis dan Neo-Marxis (*Underdeveloped and Dependencia*).⁷

⁴Hasil pertemuan AS dan sekutu-sekutunya di Bretton Woods (1944) adalah mendirikan institusi-institusi internasional baik ekonomi maupun politik seperti World Bank dan IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), IMF (International Monetary Fund), GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang sekarang menjadi WTO (World Trade Organisation), PBB dan Declaration of Human Rights. Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, terj. Cholish, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, h. 72.

⁵ Lihat perluasan hegemoni Amerika, dalam Muhadi Sugiono, *op.cit*, h. 74 - dst.

⁶ MP. Todaro, *Economic for Developing World*, London : Longman, 1977, h. 87.

⁷Kevin P. Clements, *Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan*, terj. Endi Haryono, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, h. 59-77.

Berbagai macam teori yang dipakai ternyata belum mampu mengakhiri keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga. Masalah-masalah pembangunan seperti kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan terus berlangsung memburuk. Kenyataan ini menyebabkan munculnya isu-isu kontroversial dalam ekonomi pembangunan yang secara umum mencerminkan ketidakpastian politik dan ekonomi tentang penerimaan politis teori-teori dalam pemecahan mendasar seperti, penambahan angka pengangguran produktif, penghapusan kemiskinan pedesaan dan urban, serta penurunan ketimpangan ekonomi dan sosial. Kontroversi ini semakin ruwet ketika ada campur tangan kepentingan-kepentingan tertentu dari badan-badan penyanggah dana kuat seperti Bank Dunia (IBRD), IMF, ADB, dan berbagai badan pembangunan PBB.⁸

Kenyataan di atas memunculkan asumsi bahwa kegagalan pembangunan di Dunia Ketiga adalah karena diterapkannya teori yang tidak sesuai dengan kondisi setempat (*a historis*). Banyak pengambil keputusan di Dunia Ketiga terpaksa membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan ideologi-ideologi yang sama sekali tidak sesuai dan dimodifikasi sekadar sesuai dengan kondisi historis dan kultural setempat sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang merusak terhadap kondisi sosio-ekonomi yang ada.⁹

Lepas dari asumsi bahwa pembangunan di Dunia Ketiga adalah penerapan teori yang a historis dan lebih mendasar lagi sebagai upaya perluasan hegemoni Barat (imperialisme), yang harus disadari adalah bahwa sampai saat ini negara-negara Dunia Ketiga masih mengalami krisis yang memprihatinkan dan

⁸ *Ibid*, h. 10.

⁹ Penerapan filsafat "pasar bebas" Milton Friedman di Argentina, Cile, Uruguay, dan Brazil, cocok dengan kepentingan politik penguasa-penguasa militer tetapi melahirkan konsekuensi ekonomi, sosial, dan politik yang negatif. *Ibid*, h. 10.

perlu penanganan yang serius. Paling tidak, sebagai langkah awal harus dilakukan tinjauan kembali teori-teori dan seluruh tatanan ekonomi yang ada. Selanjutnya, dianalisis secara objektif dalam rangka menemukan pendekatan alternatif yang segar untuk suatu tujuan efisiensi dan keadilan bagi semuanya. Di antara yang sudah mencoba ke arah itu adalah yang telah dilakukan oleh M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (1992). Ia mengkaji teori-teori utama Barat (*mainstream*) dengan kritis dan mengajukan neraca yang realistis tentang keberhasilan dan kegagalannya. Tidak hanya itu, ia juga menawarkan alternatif dengan mengajukan pendekatan Islam yang komprehensif dan memberikan usulan-usulan konkret untuk menstrukturisasi ekonomi dan menindaklanjuti dengan cara baru ke arah perencanaan pembangunan yang strategis.

Yang dilakukan Chapra dalam mengkaji wacana pembangunan ini adalah menawarkan alternatif Islam bukan dalam bentuk utopia. Ia membicarakan langsung kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pembangunan, sehingga lebih bumi dan cukup operasional untuk diterapkan. Meskipun demikian, tetap sarat dengan dimensi-dimensi etis dan tidak sekadar positivis-empiris dan rasional-teoretis. Mengingat pentingnya usaha ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi ide-ide dan pemikiran Chapra, yang agaknya belum banyak diangkat dalam kajian semacam ini. Mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu bentuk daripada komitmen untuk mendukung mewujudkan *maqāṣ id* Islam.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, peneliti berasumsi bahwa ada kesalahan-kesalahan paradigma dalam teori-teori pembangunan Barat yang kemudian berpengaruh pada kesalahan-kesalahan kebijakan dan strategi. Untuk

itu penelitian ini akan mengungkap permasalahan-permasalahan pembangunan di Dunia Ketiga dengan mengkaji studi kritis Chapra terhadap teori-teori pembangunan Barat. Untuk memudahkan pembahasan, permasalahan akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kritik Chapra terhadap ekonomi pembangunan ?
2. Bagaimana pendekatan Islam yang dijadikan alternatif oleh Chapra terhadap ekonomi pembangunan ?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kritik Chapra terhadap ekonomi pembangunan
2. Pendekatan Islam yang dijadikan alternatif oleh Chapra terhadap ekonomi pembangunan.

Adapun hasil penelitian diharapkan secara teoretis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam dan dalam bentuk lebih praktis dapat dijadikan acuan bagi para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan ekonomi.

D. Studi Pustaka

Pembahasan sekitar tema ekonomi pembangunan sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa penulis dan peneliti, baik yang bersifat deskriptif maupun analitis kritis. Hal ini karena sifatnya yang historis dan cakupannya yang luas, yaitu ekonomi sosial dan politik, isu pembangunan selalu aktual untuk

dibahas. Banyaknya model pembangunan juga sangat berguna untuk kajian akademis, di samping juga mempunyai manfaat politik yang praktis karena akan dapat memahami mengapa para politisi dan perencana yang telah memilih strategi pembangunan tertentu masih mungkin menerima dan menolak yang lain. Yang jelas, pembahasan-pembahasan ekonomi pembangunan pada umumnya sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara-negara Dunia Ketiga.

Kajian ekonomi pembangunan sudah dimulai sejak tahun 1950-an seperti *Economic Development and Cultural Change* (1952) dan *Measure for The Economic Development of Underdeveloped Countries* (1951) oleh PBB, *On The Political Economy of Backwardness* (1952) oleh Paul Baran, *International Trade and Economic Development* (1952) oleh Jacob Viner, dan lain-lain.¹⁰

Kajian-kajian angkatan setelahnya seperti yang dilakukan oleh M.P Todaro *Economic Development in the Third World* (1977-1997). Kajian ini dilengkapi dengan beberapa studi kasus di negara-negara berkembang sehingga tergolong cukup bagus dan aktual yang membuat hasil kajian itu banyak dijadikan rujukan para pengamat ekonomi pembangunan. Begitu juga yang dilakukan oleh M.L. Jhingan, *The Economic of Development and Planning*, yang diterjemahkan menjadi *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (1996).

Sedang *From The Right to Left in Development Theory* oleh Kevin P. Clements yang diterjemahkan oleh Edi Haryono (1997) menjadi *Teori*

¹⁰ Dikutip dari M. Umer Chapra. *Islam and the Economic Challenge*, Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1995, h. 147.

Pembangunan dari Kanan ke Kiri. Kevin membicarakan pembagian teori pembangunan dengan mengasumsikan sebagai teori pembangunan kiri dan kanan. Berangkat dari konflik Kapitalisme dan Sosialisme, Clements menyebut kiri adalah Sosialis-Komunisme (Marxian dan Neo-Marxian) dan kanan adalah Non-Marxian. Ia juga menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara Dunia Pertama dengan Dunia Ketiga dalam pembangunan adalah hubungan imperialistik yang selalu merugikan Dunia Ketiga.

Muhadi Sugiono, ***Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*** (1997) menyatakan bahwa perubahan kebijakan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang pada tahun 1980-an kepada ideologi pasar adalah tidak lepas dari adanya struktur hegemoni pada ekonomi politik global.

Bonnie Setiawan, ***Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga*** (1999) menjelaskan peta perjalanan teori-teori peralihan ke Kapitalisme mulai teori-teori klasik hingga teori-teori kontemporer.

Mansour Faqih, ***Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*** (1996) telah mengungkap realitas developmentalisme yang dipadukan dengan kemunculan organisasi-organisasi nonpemerintah (LSM) di negara-negara Dunia Ketiga. Ia menyatakan bahwa mengkaji wacana pembangunan harus memahami secara historis proses munculnya developmentalisme, tidak sekadar pemahaman pembangunan pada tingkat mekanisme tetapi juga level prinsip ideologi.

Saeful Arif, ***Menolak Pembangunanisme*** (2000) menguraikan panjang lebar tentang diskursus pemetaan pembangunan di Dunia Ketiga, kemudian

dicarikan persamaan realitasnya dengan apa yang terjadi di Indonesia pada masa Orba. Pada kesimpulannya ia menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia adalah beridentitas developmentalisme. Hasyim Wahid dkk, *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia* (1999), meskipun tipis bukunya tetapi cukup memberikan informasi yang runtut tentang sejarah kebangsaan Indonesia sejak pascaperang sampai runtuhnya Orba. Dijelaskan bahwa Indonesia sering dikendalikan oleh wacana asing yang kadang-kadang berwatak imperialis. Nation state, politik etis, nasionalisme, demokrasi, dan developmentalisme adalah wacana-wacana Barat yang berefek menjajah.

Adapun beberapa penulis Muslim terkenal yang membahas seputar masalah ini di antaranya adalah Ibnu Taimiyah yang konsep-konsepnya sudah banyak dibahas para ilmuwan. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi, Taimiyah menyoroti distribusi yang memberi penekanan kepada peran negara. Taimiyah berpendapat bahwa negara berkewajiban untuk menghapuskan kemiskinan, tidak hanya untuk memenuhi standar hidup minimal, tetapi harus diusahakan agar mampu memiliki standar hidup yang lebih baik dan membantu mereka agar bisa hidup mandiri. Larangan atas sistem bunga, penyaluran zakat, kafarat, shadaqah, hibah oleh negara, kewajiban nafkah, hak tetangga, penghargaan terhadap kerja, mencela pengangguran, semua itu merupakan elemen Islam untuk menghapuskan kemiskinan.¹¹

Agar negara dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik, Ibnu Taimiyah menyatakan diharuskan adanya penyusunan anggaran belanja

¹¹ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayyib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, h. 227-229.

pemasukannya maupun pengeluarannya. Sumber-sumber penerimaan negara (*baitul māl*) dibagi dalam tiga kategori utama. Pertama : *fai'*, *zakāt* dan *ganīmah*; kedua : dari sumber lain, misalnya : kekayaan yang tidak memiliki ahli waris; ketiga : dari sumber-sumber yang tanpa hak atau tidak jelas, misalnya : kekayaan pejabat yang diperoleh tanpa hak, hadiah rakyat untuk pejabat dan sebagainya. Ibnu Taimiyah menentang pengambilan pajak di luar ketentuan syariat seperti di atas. Adapun pokok-pokok pengeluarannya meliputi : (a) orang-orang miskin dan melarat; (b) untuk meningkatkan kemampuan pasukan agar selalu siap jihad; (c) memelihara hukum dan tatanan dalam negeri; (d) pensiun dan gaji pejabat; (e) pendidikan; (f) pengembangan infrastruktur; (g) kesejahteraan umum.¹² Ini semua bisa dilihat dalam karyanya seperti, *al-Hishbah fi al-Islām aw Waẓīfah al-Hukūmah al-Islāmiyah*, Mesir : Dar al Kitāb al Arabi, (tanpa tahun), dan *al-Siyāsah al-Syariyyah fi Islāh al-Ra'ī wa al-Ra'iyah*, Mesir: Dar al Kitāb al Arabi, (1969).

Syed Nawab Haider Naqvi (1985), di dalam bukunya yang berjudul "*Ethics and economics: An Islamic Synthesis*", menentukan empat sasaran kebijakan pokok ekonomi Islam yaitu: keadilan sosial, pendidikan universal, pertumbuhan ekonomi, dan maksimasi angkatan kerja.¹³ Oleh karena itu, konsep pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam mempunyai konsep yang lebih lengkap yaitu meliputi aspek moral, ruhaniah, dan material kehidupan manusia.

¹¹ A A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayyib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, h. 227-229.

¹² *Ibid.*, h. 260-273.

¹³ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, terj. Husin Anis, Bandung : Mizan, 1985, h. 120-141.

Menurut Naqvi, jika hal itu dapat dipenuhi maka pada tingkat pertumbuhan yang “optimal” akan mempunyai dampak pada distribusi pendapatan dan kesejahteraan secara umum baik untuk saat sekarang maupun untuk jangka panjang.¹⁴

Yusuf Qordhawi dalam *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (1997), terjemahan dari *Daurul Qiyām wal Akhlāq fil Iqtisōdil Islāmi*, (1995), telah mengkritik kegagalan kapitalisme dan sosialisme, dan memberikan alternatif/solusi ekonomi Islam yang lebih menitikberatkan pada norma dan etika. Menurut Qardhawi untuk menciptakan keseimbangan sosio-ekonomi harus ada neraca keadilan yang berasal dari Al-Qur’an, pemerataan kesempatan kerja, pemenuhan hak pekerja, menumbuhkan solidaritas masyarakat, adanya jaminan dari negara untuk kaum miskin dan lemah; dengan sumber-sumber keuangan dari: zakat, sedekah, amal jariah, wakaf dan sebagainya.¹⁵

Abdul Mannan (1995) dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Teori dan Praktik Ekonomi Islam*” (1997), telah memaparkan hampir seluruh aspek ekonomi Islam secara utuh dan rinci. Mannan benar-benar ingin membangun sebuah ekonomi Islam mulai kerangka paradigma teorinya, aspek individu, kelembagaan, sampai ke tingkat negara. Menurutnya, konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep ekonomi sekuler. Walaupun dasarnya multidimensional (dimensi moral, sosial, politik, dan ekonomi), namun sejak awal, pembangunan moral dan spiritual sudah terintegrasi dalam pembangunan ekonominya. Inilah yang disebut dengan “*tazkiyah al nafs*”.

¹⁴ *Ibid.*, h. 135-137.

¹⁵ Yusuf Qordhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin dkk. Jakarta : Robbani Press 1997, h. 203-243.

Jadi, pembangunan ekonomi dalam Islam bukan hanya pembangunan material, tapi moral dan spiritual pun menempati kedudukan yang sangat penting.¹⁶

Penekanan kepada keseimbangan dalam pembangunan antara unsur material dan spiritual juga dinyatakan oleh Abul Hasan Muhammad Sadeq. Dalam bukunya *Economic Development in Islam*, (1990), ia mengatakan konsep pembangunan ekonomi dalam Islam :

*Economic development in Islam may be defined as balanced and sustained improvement in the material and non-material well-being of man, and development as a multidimensional process which involves improvement of welfare through advancement, reorganisation and reorientation of entire economic and social systems, and through spiritual upliftment, in accordance with Islamic teachings.*¹⁷

M. Umer Chapra, dalam *Islam and the Economic Challenge* (1992) telah membahas ekonomi pembangunan dengan melakukan tinjauan kritis terhadap teori-teori pembangunan konvensional yang kemudian juga menghadirkan solusi/alternatif sesuai dengan ajaran Islam. Ini memberikan sumbangan cukup besar bagi negara-negara Dunia Ketiga khususnya negara-negara Muslim yang telah mengalami krisis pembangunan. Sumbangannya adalah terletak pada realisme pemikiran dan pendekatannya yang mengidentifikasi masalah secara jelas. Ia membahas pendekatan-pendekatan yang ada dengan sikap profesional tanpa keberatan mengakui keberhasilan teori-teori Barat dan menganalisis kegagalan-kegagalannya tanpa berlebihan. Pada saat yang sama juga diungkapkan alternatif yang Islami dengan sangat akurat tanpa apologi atau pemihakan. Ilmuwan muslim yang pernah menerima penghargaan terhormat

¹⁶ M.A. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Ed.), M. Sonhadji dkk. terj. M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 379.

¹⁷ Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam*, Malaysia : Pelanduk Publications, 1990, h. 2.

Islamic Development Bank Award (1990) dan *King Faisal International Prize* pada tahun yang sama ini tidak hanya menguasai ekonomi Islam tetapi juga memiliki pemahaman sistem ekonomi kontemporer secara menyeluruh dan tajam. Penyajiannya mengenai tatanan ekonomi Islam sangat akurat dan meyakinkan. Kritiknya yang seimbang tentang sistem Barat, sebagaimana juga masyarakat muslim masa kini disajikan dengan ilmiah namun sederhana, jelas dan menentukan. Sehingga, karya ini sangat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan bukan hanya di dunia Islam melainkan di seluruh dunia. Inilah yang membedakannya dengan karya-karya sebelumnya, dan penelitian ini menjadi orisinal karena belum ada yang membahas ide-ide Chapra sekitar tema ini.



E. Landasan Teori

Konsep pembangunan oleh Dunia Ketiga dipahami sebagai alternatif yang harus dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera secara ekonomis. Konsep pembangunan juga dipahami sebagai sarana untuk memperkuat negara terutama melalui proses industrialisasi yang mengikuti pola seragam dari satu negara ke negara lain. Hal ini kemudian memposisikan pemerintah sebagai pelaku pembangunan dan memperlakukan rakyat sebagai objek, resipen, klien, dan partisipan pembangunan.¹⁸

Dunia Ketiga yang rata-rata adalah mantan negara koloni dan pertumbuhan ekonominya tertinggal jauh secara tidak langsung mempunyai dampak kuat pada sisi politik. Pemerintah Dunia Ketiga sering melegitimasi

¹⁸ Saeful Arif, *op.cit*, h., 109.

pembangunan sebagai salah satu sarana akurat untuk memperkuat posisi *status-quonya*, sehingga kehadiran pembangunan dianggap seolah-olah tanpa kendala apa pun. Konsep pembangunan diterima begitu saja tanpa mempertanyakan landasan ideologi dan diskursusnya.

Pertanyaan tentang pembangunan pada umumnya hanya mengenai metodologi atau pendekatan dan teknik pelaksanaan. Padahal, semestinya adalah pembangunan itu sendiri dianggap merupakan suatu gagasan yang kontroversial atau bahkan kontraproduktif.¹⁹ Benarkah pembangunan merupakan jawaban permasalahan bagi berjuta-juta rakyat Dunia Ketiga, atau semata-mata merupakan alat untuk menyembunyikan penyakit sebenarnya yang lebih mendasar? Bahaya menerapkan apa adanya teori-teori Barat terhadap Dunia Ketiga juga dikatakan Myrdal :

*Jika teori-teori dan konsep-konsep yang disusun sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dunia Barat - dan secara otomatis mengandung asumsi-asumsi tersembunyi mengenai realitas sosial masyarakat Barat - diterapkan untuk meneliti negara-negara belum berkembang memiliki kondisi berbeda timbullah konsekuensi yang serius.*²⁰

¹⁹ Gagasan kontraproduktif yang pernah ditawarkan oleh Dunia Pertama kepada Dunia Ketiga. Bahwasanya Dunia Ketiga akan dapat mengikuti pertumbuhan ekonomi Eropa dengan cepat jika memenuhi dua syarat. *Pertama*, negara maju tidak melakukan proteksi. *Kedua*, negara-negara Dunia Ketiga menerapkan sistem pasar ramah (market friendly). World Development Report (WDR) 1991, *The Challenge of Development*, (Washington : World Bank and Oxford University Press, 1991). Jika dicermati maka syarat ini kontraproduktif. Negara maju memang tidak melakukan proteksi secara transparan karena kualitas produk baik. Pasar ramah yang dimaksudkan mungkin saja digunakan untuk menjebak negara Dunia Ketiga ke dalam kompetisi yang culus dan unfair.

²⁰ Gunnar Myrdal, *Asian Drama : An Inquiry into The Poverty of Nations*, London : Penguin, 1968, h. 17.

Untuk menjelaskan realitas pembangunan di Dunia Ketiga harus dikembalikan secara historis terhadap pemahaman atas proses munculnya developmentalisme itu sendiri.²¹

Tidak berhasilnya pembangunan di Dunia Ketiga juga banyak dikatakan oleh kalangan ekonom bahwa konsep pembangunan Dunia Ketiga adalah konsep yang diberikan secara sepihak oleh negara Kapitalis Dunia Pertama. Sebagaimana juga dikatakan Mueller (1987), *Peasants and Professionals : The Production of Knowledge in The Third World*, bahwa pembangunan adalah seperangkat praktik yang dikendalikan oleh pranata-pranata Dunia Pertama.²² Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa munculnya Kapitalisme Dunia Ketiga yang didikte oleh negara-negara industri besar dan bisnis internasional menumbuhkan ketimpangan regional dan sektoral, meningkatkan ketimpangan pendapatan, menciptakan pengangguran serta memberikan keuntungan hanya kepada sekelompok kecil elit ekonomi dan politik. Ini juga yang menjawab mengapa pembangunan di negara-negara berkembang tidak berkembang secepat seperti yang terjadi di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang.²³

Kalau ditarik ke belakang akan tampak bahwa pembangunan di Dunia Ketiga selama ini adalah diwarnai oleh jatuh bangunnya dua sistem ekonomi yaitu yang mengagungkan pasar dan yang menyerahkan kepada negara. Kedua sistem

²¹ Mansour Faqih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996 , h. 210-211.

²² Saeful Arif, *op.cit*, h. 112.

²³ Kevin P. Clements, *op.cit*, h. 64. Lihat juga Revrison Baswir, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

ini juga pernah mengalami kegagalan, sehingga masing-masing pernah didiskreditkan di negara-negara yang paling liberal dan paling sosialis. Perlu dipertanyakan, mampukah kedua sistem ini menciptakan keadilan di negara-negara berkembang yang kondisi kulturnya sangat berbeda ? Oleh karena itu, daripada ditendang ke sana kemari ibarat bola oleh kedua sistem ekstrim itu, negara-negara berkembang perlu mengembangkan strategi tersendiri yang sesuai dengan tujuan sosio-ekonomi yang ada. Dalam hal ini Islam telah memberikan semuanya, tinggal kemauan dan kemampuan manusia untuk mewujudkannya dalam kehidupan luas.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan atas analisis kepustakaan. Bahan-bahan yang berkenaan dengan masalah di atas dikumpulkan, untuk kemudian dibukukan dalam pengertian sumbangan-sumbangan teoretis dengan implikasi logis dari penjelasan tersebut. Kemudian ditinjau mana analisis yang dianggap memadai dan mana yang tidak. Selanjutnya penulis memilih analisis-analisis yang memadai dengan memberikan sumbangan yang penting dalam memahami masalah yang ada, yaitu berkaitan dengan kritik M. Umer Chapra terhadap ekonomi pembangunan.

Penelitian ini termasuk penelitian konsep atau pemikiran, sehingga tidak lepas dari pendekatan filosofis yang terdiri dari analisis linguistik dan analisis konsep. Analisis linguistik adalah untuk mengetahui makna yang sesungguhnya, sedangkan analisis konsep untuk menemukan kata kunci yang mewakili suatu

gagasan.²⁴ Adapun metode pembahasan yang digunakan adalah analitis kritis. Metode ini mendeskripsikan, membahas, menafsirkan, dan mengkritik gagasan utama teori-teori pembangunan Barat, yaitu teori-teori Barat menurut Chapra serta kritik dan solusinya berdasarkan Islam yang didukung juga oleh pendapat tokoh lain dalam upaya melakukan studi analitik yang berupa perbandingan, hubungan, dan pengembangan model rasional.²⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk menggali sumber data primer dilakukan dengan mengumpulkan pokok-pokok pikiran Chapra dari landasan filosofis sampai ide strategi kebijakan aplikatif tentang teori pembangunan. Dalam hal ini akan dikaji karya-karya Chapra yang berkaitan dengan masalah di atas. Pengumpulan sumber data sekunder dilakukan dengan mencari pokok-pokok pikiran terkait yang ditulis oleh para penulis lain. Dalam hal ini akan dikaji buku-buku, jurnal, media massa cetak, dan karya ilmiah lainnya yang terpilih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan cara di atas dapatlah ditemukan benang merah persoalan-persoalan pokok tentang teori pembangunan, dan dari pokok-pokok persoalan itu akan disusun refleksi dan kesimpulan teoretis sebagai hasil kajian.

²⁴ Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode*, Yogyakarta: FIP-FKIP, 1987, h. 89.

²⁵ *Buku Pedoman Struktur Penelitian : Ilmu, Filsafat, dan Agama*, Jakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1992, h. 12 dstnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dalam enam bab; pendahuluan, latar belakang pemikiran Chapra, kajian teori pembangunan, kritik Chapra terhadap teori pembangunan, alternatif teori pembangunan, dan terakhir kesimpulan.

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang perlunya dilakukan penelitian, yaitu mengemukakan masalah-masalah pembangunan yang ditimbulkan oleh teori-teori pembangunan yang diterapkan, kemudian apa seharusnya yang perlu dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Inilah kemudian yang akan mengantarkan kepada sebuah rumusan masalah penelitian serta tujuan dan manfaat penelitian. Untuk mencari hubungan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi pustaka terhadap penelitian-penelitian sejenis akan dilakukan, sehingga akan tampak orisinalitas penelitian ini. Selanjutnya, akan dibahas landasan teori yang diharapkan dapat memberikan landasan untuk mengkaji permasalahan yang ada. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini akan diuraikan dalam pembahasan metode penelitian. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Bab II berisi latar belakang pemikiran Chapra. Untuk itu akan diuraikan biografi singkat dan kiprahnya dalam pengembangan studi Islam terutama dalam bidang ekonomi Islam. Latar belakang pendidikan dan karya-karya tulisnya perlu diungkap untuk mengetahui sketsa pemikirannya. Sehingga, dengan mudah dapat diketahui corak pemikirannya dalam mengkaji ilmu ekonomi Islam.

Bab III, studi tentang teori ekonomi pembangunan. Ini akan dimulai dalam subbab pertama dengan pembahasan definisi dan ruang lingkup disiplin ini, kemudian akar historis kemunculan wacana pembangunan di Dunia Ketiga, dan terakhir diungkap juga pandangan lama dan paradigma baru tentang

pembangunan. Beberapa teori utama pembangunan dibahas dalam subbab kedua. Dalam hal ini, teori-teori yang dianggap mewakili adalah teori pertumbuhan linier, teori perubahan struktural, teori revolusi ketergantungan internasional (*dependensia*), dan teori neo-klasik penentang revolusi. Pengelompokan teori pembangunan dalam pembahasan ini mengikuti pengelompokan yang dilakukan oleh M.P. Todaro, yang didasarkan pada kronologi waktu. Ini diharapkan dapat memudahkan untuk melacak perkembangan pemikiran pembangunan dari masa Klasik hingga Neo-Klasik.

Bab IV adalah kritik Chapra terhadap ekonomi pembangunan. Dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga subbahasan. Subbab *pertama* adalah kritik Chapra terhadap paradigma yang ada dalam ekonomi pembangunan. Ini meliputi dua pembahasan, yaitu pembahasan implikasi diterapkannya filsafat *laissez faire* dan *dirigiste* yang kemudian dijadikan landasan Chapra untuk mengkritik ekonomi pembangunan. Berkaitan dengan berganti-gantinya terhadap pemilihan dua paradigma ini, Chapra menilainya sebagai sikap yang tidak konsisten. Pembahasan berikutnya adalah kritik Chapra terhadap pendekatan etnosentris yang sering dilakukan untuk menerapkan teori-teori pembangunan Barat di negara-negara berkembang. Ini dilakukan untuk mengungkap sikap pesimisme yang sengaja atau tidak ditanamkan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara sedang berkembang untuk melakukan pembangunan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah mereka lakukan, yang sebenarnya sangat sulit dipenuhi oleh NSB karena adanya kondisi sosial yang tidak sama antara negara-negara maju dengan NSB.

Subbab *kedua* adalah kritik kebijakan yang meliputi empat pembahasan. Pertama, adalah kritik Chapra terhadap kebijakan pembangunan yang terlalu

berorientasi kepada pertumbuhan cepat tanpa memperhatikan pemerataan dengan mengandalkan strategi *trickle down effect*. Dalam hal ini akan disoroti kegagalan *trickle down effect* sebagai strategi pemerataan distribusi kekayaan yang efektif. Pembahasan kedua adalah *trade off* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan dan *trade off* antara inflasi dan pengangguran. Program pertukaran (*trade off*) ini akan dipakai untuk menjelaskan kurva Kuznets dan kurva Phillips yang diragukan kebenarannya. Pembahasan yang ketiga adalah kontroversi kebijakan. Di sini akan dikemukakan teori yang menjelaskan ciri perekonomian negara-negara sedang berkembang (NSB). Dalam hal ini adalah teori pembangunan berimbang dan teori pembangunan dualistik yang selanjutnya akan digunakan untuk menjelaskan diterapkannya kebijakan-kebijakan kontroversi di NSB, seperti sektor pertanian lawan industri, dan substitusi impor lawan promosi ekspor. Pembahasan yang keempat adalah implikasi kebijakan. Di sini akan dibahas akibat-akibat kebijakan yang sering diabaikan, yaitu menerapkan kebijakan-kebijakan tetapi dengan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi lain yang merugikan. Dalam hal ini yang akan diungkap adalah inflasi, beban hutang, dan kesulitan perencanaan dalam pembangunan.

Subbab *ketiga* adalah kembalinya ideologi pasar. Subbab ini akan menguraikan diterapkannya kembali ideologi pasar dalam pembangunan dengan mengemukakan program penyesuaian (*adjustment*) dan kritik Chapra terhadapnya. Selanjutnya adalah pembahasan khusus tentang keberhasilan negara-negara Asia Timur. Ini dilakukan untuk membantah klaim Neo-Klasik yang mengatakan bahwa keberhasilan mereka adalah karena diterapkannya ideologi pasar. Oleh karena itu akan diungkap di sini faktor-faktor keberhasilan negara-negara Asia Timur yang bertentangan dengan klaim Neo-Klasik.

Bab V adalah alternatif yang ditawarkan Chapra untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan dengan menggunakan konsep *maqāṣ id* yang diberikan oleh Islam. Tawaran yang dilakukan adalah mewujudkan sistem yang berkeadilan. Bab ini akan dibagi menjadi dua subbab.

Subbab *pertama* akan membahas tentang prinsip dasar yang dijadikan landasan Chapra untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan. Dalam hal ini akan dibahas fungsi negara dalam perspektif Chapra, yaitu orientasi apa yang harus dilakukan negara untuk membantu mewujudkan cita-cita pembangunan. Ini berkaitan dengan pandangan Chapra tentang pentingnya sebuah institusi untuk merealisasikan tujuan-tujuan bersama. Selanjutnya, akan dibahas tentang pendekatan Islam yang dipakai oleh Chapra, yaitu pendekatan komprehensif. Pendekatan ini akan diaplikasikan dalam lima dimensi kebijakan yang akan dibahas dalam subbab berikutnya.

Subbab *kedua* adalah dimensi kebijakan, yaitu lima dimensi kebijakan yang ditawarkan oleh Chapra untuk dilakukan oleh NSB. Lima dimensi kebijakan itu adalah pembangunan manusia, pemerataan kekayaan, restrukturisasi ekonomi, restrukturisasi keuangan, dan perencanaan strategis. Di antara lima dimensi kebijakan ini mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, sehingga meninggalkan satu kebijakan saja menurut Chapra akan berakibat gagalnya kebijakan yang lain. Inilah barangkali yang dikatakan sebagai aplikasi pendekatannya yang komprehensif.

Bab VI adalah penutup. Bab ini berisi tentang refleksi pemikiran dari kajian yang telah dilakukan, kemudian akan lebih ditegaskan dalam kesimpulan sebagai hasil penelitian. Untuk mengakhiri semuanya akan diberikan catatan dan saran-saran.

BAB II

M. UMER CHAPRA DAN PERANNYA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Muhammad Umer Chapra adalah salah satu pemikir Ekonomi Islam terkemuka dewasa ini. Ide-idenya yang piawai dan perannya yang besar dalam pengembangan Ilmu Ekonomi Islam membuatnya cukup dikenal di kalangan pemikir ekonomi lainnya. Namanya pun disejajarkan dengan para ekonom Muslim seperti Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Haider Naqvi, Monzer Kahf, Sayyid Mahmud Taleghani dan Muhammad Baqir as-Sadr. Kepiawaiannya itu terlihat dari keberhasilannya dalam mengembangkan rasionalitas ajaran-ajaran Islam. Ini bisa dimaklumi karena ia tidak hanya menguasai aliran ilmu-ilmu modern tetapi juga sangat akrab dengan ilmu-ilmu tradisional sehingga ia dapat dilihat sebagai sosok pribadi yang mendekati model baru cendekiawan Muslim.

Ekonom Muslim kelahiran Pakistan tahun 1933 ini mendapat pendidikan yang terbaik dari pusat-pusat studi ekonomi modern. Ia lulusan Universitas Karachi (M.Com) dan Minnesota, Amerika Serikat (Ph.D). Dan, keberhasilannya juga sangat terlihat dalam mempelajari bahasa Arab dan studi Islam dari sumber-sumber aslinya. Ini membuat ide-idenya sangat representatif dan profesional.²

Sebagai seorang ilmuwan ia sangat sibuk dalam kegiatan mengajar dan penelitian. Ia telah bergabung dengan berbagai akademi dan lembaga riset

¹Khurshid Ahmad, "Sambutan", dalam M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, M. Sonhadji dan Murwanto Sigit, (Ed.), terj. Lukman Hakim, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h.xv.

² Kurshid Ahmad, "Pengantar", dalam M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. xxii

prestisius, semisal *Institute of Development Economics* dan *Central Institute of Islamic Research*, Pakistan. Ia juga mengajar di Universitas Wisconsin, Plattville dan Kentucky, Lexington, Amerika Serikat. Di samping itu juga ia mengabdikan sebagai Penasihat Ekonomi Senior di Badan Moneter Saudi Arabia. Dengan demikian, pengalamannya sangat luas dalam bidang mengajar, riset ataupun pembuat kebijakan. Sumbangannya juga sangat besar bagi sejumlah besar konferensi internasional, termasuk sejumlah konferensi dan seminar keuangan dan ekonomi Islam. Ia juga memiliki spesialisasi dalam bidang Ekonomi Moneter (*Monetary Economics*). Khusus dalam masalah ini ia merumuskan secara komprehensif dalam bukunya *Towards a Just Monetary System* (1985) yang sudah diterjemahkan menjadi *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* (1987). Buku ini mendiskusikan konsep uang, perbankan, dan kebijaksanaan moneter dalam perspektif Islam. Karena bukunya itulah, Chapra memperoleh penghargaan dari *Islamic Development Bank* pada tahun 1990. Dan karena jasanya dalam mengembangkan Ekonomi Islam, pada tahun yang sama ia mendapatkan *King Faisal International Prize for Economic Studies*.³ Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Chapra adalah orang yang sangat tepat untuk membahas masalah yang lebih mendasar mengenai sistem ekonomi dewasa ini.

Pada dekade 40-an, dukungan terhadap sebuah sistem ekonomi Islam tidak terlalu umum di kalangan para sarjana Muslim. Namun, pelan-pelan, pada masa periode kemerdekaan, keinginan untuk menegakkan sebuah sistem kehidupan yang Islami, yang secara alamiah merasuk ke dalam sektor kehidupan

³ M. Dawam Rahardjo, "Wacana Ekonomi Islam Kontemporer", dalam M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. xi.

ekonomi, menjadi lebih kuat. Keinginan untuk membangun lembaga ekonomi yang sejalan dengan prinsip Islam (seperti lembaga finansial yang bebas bunga, pengumpulan zakat lewat pemerintah, dan lain-lain) secara pelan-pelan mengarah kepada kebangkitan sebuah gerakan intelektual. Sebagai konsekuensinya, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi mulai dibahas pada tingkat akademik dari perspektif Islam. Selama dua dekade, sejumlah ekonom yang pada umumnya dilatih dalam tradisi intelektual Barat telah menekankan perlunya sebuah pendekatan baru bagi ekonomi, dan di kalangan terbatas, keprihatinan untuk mengembangkan suatu disiplin akademik yang secara umum disebut ekonomi Islam. Chapra adalah pelopor bagi gerakan ini dan termasuk di antara sarjana yang banyak menyumbang usaha-usaha akademis ini.⁴

Semasa menjadi mahasiswa, Chapra telah berusaha untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Tidak lama setelah kembalinya ke Pakistan dari Amerika Serikat pada tahun 1961, Chapra bergabung dengan *Central Institute of Islamic Research* dan berkuat selama dua tahun. Secara sistematis, ia mengkaji gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam tradisi Islam yang menurut pandangannya dapat memenuhi premis intelektual bagi sebuah sistem ekonomi yang sehat. Upaya ini, yang kemudian ditingkatkan dan dimatangkan oleh kajian dan refleksinya yang mendalam, telah

⁴Zafar Ishaq Anshori, Sambutan dalam M.Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000, h. xv-xvi

mengantarkan kepada bukunya yang pertama, *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature* (London, 1970).

Pada tahun 1964, Chapra berangkat kembali ke AS. Setelah beberapa tahun mengajar ekonomi di beberapa Universitas di AS, Chapra bergabung dengan *Saudi Arabian Monetary Agency*, sebagai penasehat ekonominya. Asosiasinya yang lama dengan organisasi ini memberikan Chapra segudang pengalaman langsung dengan aspek operasional kompleks dari keuangan dan finansial masa kini. Kendati ia berhubungan dengan tugas-tugas profesional yang berkaitan dengan kebijakan moneter, Chapra tetap sebagai seorang sarjana. Dia tidak berhenti belajar dan berpikir mengenai karakteristik suatu sistem moneter, dan kenyataannya, suatu sistem ekonomi yang suatu saat dapat menjadi Islami dan layak berjalan. Chapra percaya bahwa sebuah sistem moneter yang adil dapat ditegakkan hanya pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Doktrin yang mendominasi dunia kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan negara sejahtera, semuanya terlalu lemah untuk membimbing manusia dalam upaya menegakkan sistem ekonomi yang mengkombinasikan kemajuan ekonomi dan keadilan dan dengan standar moral yang tinggi. Ini adalah fokus utama Chapra dalam bukunya, *Towards a Just monetary System* (Leicester, 1985).⁵

Karyanya yang monumental berikutnya adalah *Islam and the Economic Challenge* (Leicester, 1992). Ini adalah hasil riset dan renungan selama satu dekade. Dalam karyanya ini Chapra dengan pengalaman yang luas dan ketelitian akademis menguji sistem-sistem ekonomi Barat, dan mengajukan neraca yang realistis mengenai pencapaian dan kegagalan sistem tersebut. Ia juga menguraikan

⁵*ibid.*, h. xvii.

pendekatan Islam mengenai ekonomi dan berbagai problemanya, dan mengajukan usulan-usulan konkret untuk merestrukturisasi ekonomi umat, menindaklanjuti dengan cara baru ke arah perencanaan pembangunan yang strategis. Secara luas, resep yang diberikan kepada dunia Islam meliputi perencanaan pembangunan bersama-sama dengan penerapan suatu lapisan moral yang dapat diterima oleh masyarakat untuk mekanisme pasar, motivasi dasar yang lebih luas bagi usaha ekonomi dan reformasi struktural mendasar untuk membangun sebuah kerangka kerja yang mendukung. Ia membahas masalah ini dengan sikap seorang ahli ilmu sosial yang terlatih dan ilmuwan Islam yang objektif. Pemahamannya atas sistem ekonomi kontemporer beserta permasalahan-permasalahannya adalah menyeluruh dan tajam. Penyajiannya mengenai tatanan ekonomi Islam sangat akurat dan meyakinkan. Kritiknya yang seimbang tentang sistem Barat, sebagaimana juga tentang masyarakat Muslim masa kini disajikan secara ilmiah namun sederhana, jelas, dan menentukan. Ia bukan saja sekadar berbicara tentang teori melainkan sangat bermanfaat bagi para pembuat kebijaksanaan, bukan hanya di dunia Islam, melainkan di seluruh dunia.⁶

Dalam kajiannya tentang pembangunan, Chapra menggunakan pendekatan pragmatis. Tentu saja ada unsur-unsur resitatifnya, dengan menampilkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis. Kritik adalah yang ditekankan dalam pembahasannya terhadap sistem-sistem Barat, bukan sikap adaptif. Alternatif yang ditawarkan tidak menampilkan bentuk utopia. Sebaliknya, ia langsung

⁶ Kurshid Ahmad, "Pengantar", *op.cit.*, h. xxiii.

berbicara mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi dan strategi pembangunan, sehingga cukup bumi dan operasional untuk diterapkan. Di samping itu, juga sarat mengandung dimensi-dimensi etis dan tidak sekadar politivis-empiris dan rasional-teoretis.

Dalam kajian Ekonomi Islam menurut Volker Nienhaus *Islamic Policy between Pragmatism and Utopia* (1982) selama ini ada empat pendekatan utama. Yaitu *pragmatis, resitatif, utopian, dan adaptif*. Dari keempat pendekatan ini yang paling banyak dipakai adalah pendekatan resitatif. Berasal dari kata kerja *recitation* (pembacaan, hapalan, pengajian), yaitu pendekatan yang mengacu pada teks ajaran Islam. Secara khusus pendekatan ini mengacu kepada hukum fiqih. Meskipun orientasi pada fiqih, pada pendekatan ini sebenarnya hanyalah salah satu bentuk saja. Bentuk lain ada juga yang analisis atau teologi yang biasanya menghasilkan sesuatu yang lain, yaitu etika ekonomi. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi (1995) *Daurul Qiyām wa al-Akhlāq fi al-Iqtisādi al-Islāmi*.

Dari pendekatan resitatif dapat muncul pendekatan utopia. Pendekatan ini dikembangkan dengan merumuskan model manusia, misalnya, model *homo economicus* atau manusia *altruistis*. Selanjutnya dapat dikembangkan model masyarakat yang dicita-citakan dalam Islam, misalnya *Baldah at-Ṭayyibah wa Rabbun Gafūr*, sebuah masyarakat yang makmur berdasarkan nilai-nilai yang luhur.

Pendekatan adaptif dilakukan dengan penyesuaian diri berdasarkan kondisi setempat dan sejarahnya masing-masing. Mustafa as-Siba,i dari Syria

pernah mencoba merumuskan gagasan Sosialisme Islam. Sukarno pernah berspekulasi tentang sosialisme ala Indonesia.

Pendekatan pragmatis dimulai dengan penolakan ideologi-ideologi ekonomi yang diikuti dengan upaya melakukan sintesis atau eklesi, yaitu mencampur berbagai gagasan dan teori yang dianggap paling praktis untuk dilaksanakan. Pendekatan ini dilakukan pada tataran teori dan praktik. Pada tataran teori, para pemikir mencari saja teori-teori ekonomi, mikro ataupun makro, yang dapat dijadikan alat analisis untuk menjelaskan gagasan Islam tentang ekonomi. Pada tingkat praktik, pendekatan pragmatis dilakukan dengan mengembangkan perekonomian negara-negara Islam, misalnya, melalui hubungan dagang dan kerja sama di bidang perbankan.⁷ Hal ini bisa dilihat dalam karya Chapra, *Islam and the Economic Challenge*.

Karya-karya Chapra lainnya di antaranya adalah, *Objectives of the Islamic Economic Order*, Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1979. *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy*, Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1979, (ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Risalah Gusti Surabaya). *The Mechanics and operation of an islamic Financial Market*, *Journal of Islamic Banking and finance*, Karachi: 1988. *Islam and The Economic Development*, International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1989. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000. Dari, masih banyak lagi tulisan-tulisannya

⁷ Dawam Rahardjo, *op.cit.*, h. xii-xvi.

yang dimuat di jurnal-jurnal studi Islam. Karya-karyanya yang representatif membuat ia sangat diperhitungkan kalangan luas dalam bidangnya. Sebagaimana yang dikomentari oleh Zafar Ishaq Anshori, bahwa dengan karya-karyanya yang matang membuatnya menjadi duta dari mazhab pemikiran yang kemudian secara luas dikenal dengan “Ekonomi Islam”. Dan, mereka yang telah membaca tulisan-tulisan Chapra akan menemukannya sebagai pribadi yang menarik dan provokatif.⁸



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁸Zafar Ishaq Anshori, *op.cit.*, h. xvii

BAB III

EKONOMI PEMBANGUNAN : GAGASAN DASAR DAN TEORI

Studi pembangunan ekonomi adalah suatu cabang yang selalu menarik dan menantang dari disiplin ilmu yang lebih luas, yaitu ilmu ekonomi dan ekonomi politik. Perdebatan pemikiran baik dalam perspektif konseptual maupun implementasinya pun seakan-akan tidak pernah berhenti, seiring dengan denyut nadi pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga yang tidak kunjung usai bahkan tidak pernah akan usai. Perdebatan ini semakin terasa hangat ketika kerangka konseptual yang mengikuti kaidah-kaidah *konvensional* yang tidak lain merupakan replikasi pembangunan model Barat (*westernization*)--pada realitanya banyak menemui kebuntuan di lapangan.



Harus diakui, teori-teori pembangunan yang ada khususnya di awal perkembangan cabang ilmu ekonomi ini sangat didominasi oleh hasil pemikiran para ekonom Barat, yang tentunya tidak lepas dari nilai-nilai dan budaya Barat. Apa yang mereka formulasikan akan berhasil jika diterapkan pada negara yang kondisinya sesuai dengan Barat. Itulah sebabnya mengapa dalam banyak kasus ternyata teori-teori mereka kurang tepat diterapkan begitu saja di negara-negara berkembang. Hal ini mendorong untuk dilakukan studi ulang dan *dekonstruksi* (pembongkaran) terhadap paradigma pembangunan dan sekaligus melakukan *rekonstruksi* bagi munculnya paradigma baru yang cocok bagi negara-negara berkembang.

Untuk mengantarkan kepada kajian kritis Chapra terhadap ekonomi pembangunan dan upaya mencari alternatifnya, dalam bab ini akan dibahas tentang

teori dan gagasan dasar ekonomi pembangunan. Dalam pembahasan pertama akan dikemukakan definisi dan ruang lingkup ilmu ini, kemudian akar historis pembangunan, dan pandangan lama serta paradigma baru terhadap pembangunan.

Pembahasan kedua adalah tentang teori pembangunan yang ada, tentunya tidak semuanya, tetapi akan dipilih beberapa teori utama yang dianggap mewakili. Dalam hal ini akan dibahas empat teori-teori dasar pembangunan sebagaimana yang telah dikelompokkan oleh Todaro (1991;1994). Teori itu adalah; *teori pembangunan linier, teori pertumbuhan struktural, teori ketergantungan internasional (dependensia), dan terakhir teori neo-klasik penentang revolusi.*

A. Gagasan Dasar Ekonomi Pembangunan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Meskipun studi tentang pembangunan ekonomi sudah lama dilakukan, sejak kaum Merkantilis dan Adam Smith sampai Marx dan Keynes, namun pada umumnya lebih dikaitkan hanya dengan kerangka acuan lembaga budaya atau sosial Barat. Baru pada tahun empat puluhan, khususnya setelah Perang Dunia II, para ekonom mulai mencurahkan perhatiannya pada masalah negara-negara sedang berkembang (NSB).¹

Berbagai pandangan para ahli ekonomi mengenai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan negara-negara berkembang inilah yang disebut

¹ Ada banyak sebutan untuk NSB (underdeveloped Countries) seperti negara kurang berkembang (less developing countries), negara miskin (poor countries), negara sedang berkembang (developing countries), dan khusus di forum internasional disebut Dunia Ketiga (The Third World Countries). Lihat M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terj. D. Guritno, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, h. 9.

dengan ilmu ekonomi pembangunan atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan.² Ekonomi pembangunan bisa didefinisikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh NSB dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi.³

Sifatnya yang khas untuk NSB ini sebagaimana juga diungkapkan oleh M.P. Todaro bahwa ilmu ekonomi pembangunan memang banyak bertolak dan tumbuh dari berbagai prinsip dan konsep yang relevan dari cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya, baik dalam bentuk standar atau aslinya maupun yang telah dimodifikasi. Akan tetapi, secara umum hal ini merupakan bidang studi yang berdiri sendiri. Ia bahkan berkembang pesat bersumber dari identitas analitis dan metodologinya sendiri yang khas. Ia adalah ilmu ekonomi negara-negara Dunia Ketiga yang rata-rata masih miskin dan terbelakang, yang memiliki aneka orientasi ideologi, latar belakang budaya dan masalah-masalah ekonomi yang sangat kompleks, yang semuanya menuntut suatu pemikiran dan pendekatan baru.⁴

Perdebatan tentang masalah ini sering muncul ketika membahas diskursus pembangunan adalah karena bermula dari perbedaan paradigma atau sudut pandang yang berupa ruang, waktu, sekaligus kepentingan yang berbeda pula. Akan tetapi

²Dapat dibedakan antara pengertian pembangunan ekonomi dengan ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Sedang ekonomi pembangunan merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah itu serta menciptakan perkembangan yang diharapkan. Lihat, Sadono Sukirno, *Ekonomi dan Pembangunan, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Medan : Barto Gorat, 1981, h. 11.

³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, edisi 4, Yogyakarta : STIE YKPN, 1999, h. 6.

⁴ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi 6, jilid 1, terj. Haris Munandar, Jakarta : Erlangga, 1998, h. 7.

pada umumnya semuanya berpendapat bahwa kajian pembangunan adalah kajian tentang perubahan sosial (*social change*). Everett E. Hagen dalam *on the teori of social change: how economic growth begin* (1964) berpendapat bahwa faktor kekuatan yang paling penting untuk menggerakkan masyarakat NSB dari stagnasi ekonomi ke arah proses pembangunan ialah perubahan pada tata sosial budayanya.⁵

Hal ini menyebabkan ekonomi pembangunan mempunyai cakupan yang sangat luas.

Ia tidak hanya mengupas cara-cara alokasi sumber daya produktif langka seefisien-efisiennya mungkin serta kesinambungan pertumbuhannya dari waktu ke waktu, tetapi juga memberikan perhatian pada mekanisme-mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan. Dan, telah terbukti bahwa banyak kegagalan kebijakan pembangunan di NSB yang disebabkan oleh variabel-variabel nonekonomi.⁶ Banyak penjelasan yang menyimpulkan bahwa pemaknaan pembangunan adalah proses transformasi segala bidang dari kondisi tertentu menuju kondisi yang lain yang lebih baik. Pembangunan adalah proses perubahan yang menjamin adanya konsolidasi sistem dan membuka peluang baru. Dalam hal ini pembangunan harus ditafsirkan sebagai perbaikan tata pergaulan secara terus-menerus yang melingkupi seluruh segi sistem pergaulan.⁷ Untuk itu, pembangunan harus dilihat secara dinamis bukan

⁵ Dikutip dari Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan*, Jakarta : LP3ES, 1994, h. 66.

⁶ Lihat, Michael P. Todaro, *op.cit.*, h. 13.

⁷ Imanuel Subangun, *Dari Saminisme ke Posmodernisme*, Yogyakarta : CRI Alocita, 1994, h. 59.

changing“.⁸ Hoemardani juga memandang pembangunan sebagai proses pertumbuhan beberapa indikator bidang kehidupan melalui perubahan struktur ekonomi dan nonekonomi.⁹

Di sini jelas bahwa ekonomi pembangunan tidak bisa membatasi dirinya hanya pada pembahasan di bidang ekonomi saja, tetapi juga masalah politik, kebudayaan serta keterkaitannya dengan sistem perekonomian internasional.¹⁰ Ini diperlukan untuk mempengaruhi transformasi struktural dan kelembagaan dari seluruh masyarakat demi menghasilkan rentetan kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat dan melalui proses yang efisien bagi seluruh masyarakat.¹¹

2. Akar Historis

Agar dapat melihat dengan lengkap tentang ekonomi pembangunan, perlu ditelusuri semua yang berhubungan dengannya, dari asal mula masalah ini muncul, kemudian perkembangan yang terjadi di lapangan, termasuk implikasi apa yang ditimbulkan sampai dengan munculnya pandangan dan paradigma baru. Ini akan bermanfaat ketika akan diterapkannya ekonomi pembangunan di NSB, yang ternyata tidak begitu saja cocok. Karena di samping heterogenitas NSB begitu besar juga sering terjadi prinsip-prinsip atau hukum-hukum ekonomi menjadi tidak universal,

⁸Bintaro Tjokroamidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : Gunung Agung, 1982, h.1

⁹ Soedjono Hoemardani, *Renungan Tentang Pembangunan*, Jakarta : CSIS, 1981, h. 43.

¹⁰ Arief budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995, h. 12.

¹¹ Michael P. Todaro, *op.cit.*, h.9.

yang tidak bisa diterapkan ke semua NSB tanpa perbaikan dan modifikasi di sana sini.¹²

Untuk mengetahui sejarah diskursus pembangunan, perlu dilacak dengan memahami fakta sejarah pascaperang, sebagaimana saat itulah ekonomi pembangunan mulai mendapat perhatian lebih. Dijelaskan, bahwa diskursus pembangunan ini dimulai adanya dua kepentingan antara negara-negara maju dan NSB. Negara-negara sedang berkembang yang baru saja mendapatkan kemerdekaannya ingin maju mengejar ketinggalannya. Negara-negara maju yang terlibat perang dingin, yaitu antara blok Barat yang diwakili oleh Amerika dan blok Timur yang diwakili oleh Rusia berebut pengaruh di negara-negara yang baru merdeka. Untuk kepentingan itu mereka pun membantu NSB dengan berbagai macam bantuan. Kenyataan ini membuat sulit untuk mengatakan bahwa bantuan negara-negara maju terhadap NSB murni karena motif kemanusiaan. Profesor Lyle W. Shannon mengamati fenomena ini sebagaimana yang dikatakannya dalam *underdeveloped area*;

Di tahun-tahun mendatang, pembangunan negara terbelakang akan menjadi ajang persaingan berat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Negara terbelakang yang menyimpan kekayaan sumber alam akan dibutuhkan oleh kekuatan-kekuatan dunia, apalagi jika mereka memiliki lokasi strategi ditinjau dari sudut militer.¹³

¹² Lihat M.P. Todaro, *op.cit.*, h. 9. Ia menyatakan bahwa tidak ada dalam ekonomi pembangunan sesuatu yang pasti, yang ada adalah kecenderungan, sesuatu yang bisa terjadi di negara-negara maju belum tentu juga terjadi di negara-negara berkembang.

¹³ Dikutip dari, M.L. Jhingan, *op.cit.*, h. 4.

Menurut sejarah, kedua seteru ini saling melempar agitasi, provokasi, dan persuasi agar negara Dunia Ketiga mengikuti salah satu dari paham ideologi mereka, yaitu antara sosialisme dan kapitalisme. Negara-negara kapitalis berusaha keras agar paham sosialis tidak menjadi paham yang mendunia. Demikian juga sebaliknya, blok sosialis dengan gencar melancarkan jargon antikapitalisme. Pada tanggal 20 Januari 1949, presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman menggagas istilah keterbelakangan (*underdevelopment*) yang kemudian dikatakan bahwa dari sinilah awal mula konsep pembangunan diluncurkan. Dalam pidatonya ia menyatakan :

Di suatu program baru yang berani menyediakan keuntungan-keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan industri bagi perbaikan dan pertumbuhan wilayah-wilayah terbelakang¹⁴

Berbagai bantuan teknis besar-besaran, bilateral ataupun multilateral langsung dilancarkan. Ini kemudian banyak yang mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan terhadap NSB adalah salah satu dominasi Barat khususnya Amerika Serikat atas tatanan dunia pascaperang. Hal ini bisa dilihat dari sistem *Bretton woods* dan program pemulihan Eropa *Marshall Plan* yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dengan *Marshall Plan*, terciptalah sebuah mekanisme signifikan bagi konstruksi hegemoni atas sekutu-sekutu Eropa Baratnya. Melalui Organisasi Kerja sama Ekonomi Eropa (*Organization for European Economic Cooperation*), terciptalah sebuah forum bagi koordinasi kebijakan perekonomian nasional antara Amerika Serikat dan negara-negara penerima bantuan. Hasilnya bukan saja melapangkan jalan bagi formasi hubungan Atlantik yang kuat, melainkan juga memperluas penerimaan

¹⁴ Saeful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 125.

terhadap kebijakan internasionalis liberal Amerika Serikat pascaperang di kalangan sekutu-sekutu Eropa-nya. Dalam hal ini berkat *Marshall Plan*, Amerika Serikat berhasil mendorong sekutu-sekutunya untuk menerima pandangan dan kebijakan nilai tukar mata uang yang lebih liberal. Begitulah formasi tempat tatanan ekonomi dunia terbuka yang akan dibangun sudah ditanamkan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ketika konsepsi kebijakan bersama dikembangkan di antara negara-negara itu.¹⁵

Wacana pembangunan pun segera menjadi isu sentral perbincangan kenegaraan di mana-mana. Amerika Serikat menjadikannya sebagai kebijakan resmi, yang jelas tujuannya untuk membendung pengaruh komunisme di Dunia Ketiga.¹⁶ Untuk mensosialisasikan programnya, para ilmuwan pun dikerahkan untuk memberikan kontribusi pemikirannya.¹⁷ Usaha ini tampaknya cukup berhasil, gagasan pembangunan disambut sangat antusias di NSB, sehingga menjadi suatu keyakinan yang tidak boleh tidak untuk dilakukan. Akan tetapi, sayang karena harapan pembangunan bisa menjadi solusi untuk memecahkan masalah di NSB tidak kunjung menjadi kenyataan. Bahkan diterapkannya ekonomi kapitalis yang eksploitatif semakin banyak melahirkan persoalan baru. Terutama setelah negara-

¹⁵ Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, terj. Cholish, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, h. 72-73.

¹⁶ Saeful Arif, *op.cit.*, h. 125.

¹⁷ Saat itu teori-teori ilmu sosial mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda. Lihat, Kevin P. Klements, *Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan*, terj. Endi Haryono, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997, h. 3.

negara pemberi bantuan mulai melakukan intervensi kebijakan, yang ternyata juga sarat dengan muatan-muatan ideologis.¹⁸

Dalam konteks ini dikatakan bahwa hubungan antara negara-negara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga memang sengaja diciptakan. Dunia Ketiga diberi pengertian sebagai negara terbelakang, sementara Dunia Pertama diberi label sebagai negara-negara industri maju. Perbedaan secara ekonomi inilah kemudian terwujud dalam hubungan tersebut, yakni teknologi dan informasi dari Dunia Pertama dapat ditransfer ke Dunia Ketiga. Inilah kemudian yang akan melahirkan apa yang disebut dengan *Euro Sentrism*. Apalagi makna konsepsi pembangunan juga sering dipaksakan untuk diterapkan di NSB,¹⁹ maka hubungan ini pun tidak bisa terhindar dari klaim imperialisme.²⁰



3. Pandangan Lama dan Paradigma Baru

Dalam pemikiran tradisional, pada dasarnya kata kunci dari pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi.²¹ Paradigma ini sangat berorientasi pada produksi, fokus dan prioritas utamanya adalah pada *growth generating sectors*.

¹⁸ Saeful Arif, *op.cit.*, h. 110.

¹⁹ Prioritas kepada pertumbuhan ekonomi dan berbagai unsur penunjangnya yang dikatakan sebagai inti pembangunan itu sebenarnya merupakan tradisi Barat yang kemudian ditransformasikan ke tingkat global. Jan Erik Lane Suante Ersson, *Ekonomi Politik Komparatif*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1994, h. 54.

²⁰ Lihat, Kevin P. Clements, *op.cit.*, h. 64.

²¹ Arif Hartono, "Menelusuri Wacana Pembangunan: Mencari Format Pembangunan Khas Negara Berkembang", dalam, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 4 nomor 1, 1999, h. 72.

Dan, mekanisme pasar menjadi tumpuan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.²² Pembangunan pun selalu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan nyata per kapita penduduk dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.²³ Dengan meningkatkan pendapatan nyata per kapita, diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan di NSB dapat diselesaikan. Untuk itu, kebijakan yang dipakai adalah apa yang dikenal dengan “dampak merembes ke bawah” (*trickle down effect*). Indikator keberhasilan pembangunan pun semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional (GNP) per kapita riil.²⁴ Hal ini dapat dilacak dari pemikiran-pemikiran awal mengenai pembangunan seperti teori Harrod-Domar, Arthur Lewis, WW. Rostow, Hirschman, Rosenstein Rodan, Nurkse, Leibenstein. Sebagaimana karya Arthur Lewis “*The Theory of Economic Growth*”, mencerminkan munculnya teori pertumbuhan, dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan ekonomi di negara mana pun.²⁵

Karena tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan dan pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja, maka masalah-masalah lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan sering dinomorduakan.²⁶ Ketidakpuasan terhadap pembangunan pun terjadi di mana-mana. Inilah kemudian yang memberikan

²² Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, h. 8.

²³ B.S. Muljana, “Beberapa Pengertian dan Masalah Mengenai Pembangunan Ekonomi” dalam Hendra Esmara, penyunting, *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1987, h. 348.

²⁴ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1997, h. 7.

²⁵ *Ibid.*, h. 8.

²⁶ Michael P. Todaro, *op.cit.*, h. 17.

inspirasi terhadap paradigma baru dalam pembangunan.

Pada dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Secara umum, NSB merasa tidak puas terhadap apa yang dicapai oleh pembangunan yang terlalu berorientasi GNP. Meskipun GNP telah mengalami kenaikan, tetapi masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan. Pembangunan tidak memberikan solusi terhadap kemiskinan, justru memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin, sehingga melahirkan konsep garis kemiskinan (*poverty line*).²⁷ Asumsi *trickle down effect* yang melekat pada paradigma pertumbuhan dan diharapkan otomatis menyertai pertumbuhan, ternyata tidak pernah muncul. Asumsi bahwa setiap pelaku ekonomi mempunyai produktivitas dan akses yang sama terhadap faktor produksi, tidak pernah terjadi. Kemudian muncul strategi yang lebih dikenal dengan *redistribution with growth*.²⁸ Menurut strategi ini, pembangunan tidak sekadar pertumbuhan pendapatan per kapita nasional, tetapi dimasukkan juga indikator-indikator kesejahteraan.²⁹ Dalam hal ini Todaro menekankan tiga nilai dasar pembangunan, yaitu *life sustenance* (kemampuan menyediakan kebutuhan dasar), *self esteem* (kebutuhan untuk

²⁷ Yogesh Atal, "Konfrontasi dan Konsesus: Tinjauan Mengenai Perdebatan", dalam Atal dan Pieris, ed., *Kritik Asia Terhadap Pembangunan*, terj. Hasan Basari, Jakarta: YIIS, 1980, h. 159.

²⁸ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998, h. 141.

²⁹ Jan Erik Lane Suante Ersson, *op.cit.*, h. 61.

dihargai), dan *freedom* (bebas dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara melainkan juga terhadap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan).³⁰ Ini menguatkan pendapatnya yang mengatakan bahwa sistem ekonomi harus diletakkan pada konteks sistem sosial (*social system*) secara keseluruhan. Yaitu, hubungan-hubungan yang saling terkait antara apa yang disebut faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor nonekonomi.³¹ Sementara Dudley Seers (1973) menunjuk tiga sasaran utama pembangunan dengan mengatakan:

What has been happening to poverty? What has been happening to unemployment? What has been happening to inequality? If all three of these have declined from high levels then beyond doubt this has been a period of development for the country concerned. If one or two of these central problems have been growing worse, especially if all three have it would be strange to call the result development, even if per capita income doubled.³²

Dari fenomena ini bisa disimpulkan bahwa pembangunan harus mencerminkan perbaikan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan. Ini tidak boleh mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual ataupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara material dan spiritual.

³⁰ Michael P. Todaro, *op.cit.*, h. 19.

³¹ *Ibid.*, h. 14.

³² Dikutip dari Mudrajat Kuncoro, *op.cit.*, h. 10.

B. Teori Ekonomi Pembangunan

Terdapat banyak teori pembangunan yang telah diformulasikan oleh para ekonom, sehingga tidak mudah untuk mengelompokkan teori-teori tersebut pada suatu aliran tertentu. Dalam bab ini hanya akan dijelaskan empat teori (mengikuti pengelompokan yang dilakukan oleh Michael P. Todaro) yang dianggap dominan dan representatif, yaitu : (1) *teori pertumbuhan linier*, (2) *teori perubahan struktural*, (3) *teori revolusi ketergantungan internasional (dependensia)*, dan (4) *teori Neo-Klasik*.

Di antara pengelompokan teori-teori pembangunan, ada yang membagi ke dalam dua kategori besar, yaitu secara diakronis yang berdasarkan kronologi waktu dan taksonomis yang berdasarkan materi kajiannya.³³ Adapun pengelompokan yang dilakukan oleh Todaro ini termasuk kategori pertama, yaitu berdasarkan kronologi waktu.

Pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an para teoresi cenderung memandang proses pembangunan sebagai serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan, yang pasti akan dialami oleh setiap negara yang menjalankan pembangunan (teori pertumbuhan linier). Mereka meyoroti pembangunan sebagai paduan dan kuantitas tabungan nasional, penanaman modal, dan bantuan asing. Semuanya itu harus diupayakan oleh NSB agar dapat melewati jalur-jalur pertumbuhan ekonomi modern, yang menurut sejarahnya telah dilalui oleh negara-negara maju. Pembangunan selalu identik dengan pertumbuhan ekonomi agregat secara cepat.

³³Saeful Arif, *op.cit.*, h. 99.

Pada dasawarsa 1970-an, pertumbuhan linier ini tergesur oleh dua aliran pemikiran ekonomi (yang sesungguhnya lebih berbau ideologis daripada akademis). Aliran pertama adalah yang “menitikberatkan” pada teori dan pola perubahan struktural. Ia menggunakan teori-teori ekonomi modern dan analisis statistik guna melukiskan proses struktural internal yang harus dialami oleh negara-negara berkembang agar mampu menciptakan dan mempertahankan pertumbuhan ekonominya yang cepat. Aliran yang kedua, revolusi ketergantungan internasional. Aliran ini bersifat radikal dan lebih berorientasi politik. Ia memandang keterbelakangan NSB sebagai akibat pola hubungan kekuasaan internasional yang tidak adil, yang dalam praktiknya juga dibantu segmen-segmen domestik tertentu. Perhatian utama teori ini ditujukan pada pentingnya menyusun kebijakan baru untuk menghapuskan kemiskinan secara total, menyediakan kesempatan kerja yang lebih bervariasi, dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Tujuan tersebut hanya bisa dicapai dalam suatu konteks lingkup perekonomian yang sehat dan berkembang pesat. Teori ini menyangsikan teori pertumbuhan linier dan perubahan struktural.

Sepanjang dasawarsa 1980-an, yang paling menonjol adalah pendekatan yang keempat, kontrarevolusi Neo-Klasik. Pendekatan ini menekankan pada peranan menguntungkan yang dimainkan oleh pasar-pasar bebas, perekonomian terbuka, dan swastanisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah atau negara yang kebanyakan tidak efisien dan boros. Menurut teori ini, kegagalan pembangunan tidak disebabkan oleh kekuatan-kekuatan eksternal ataupun internal sebagaimana diyakini oleh para tokoh teoresi ketergantungan, tetapi diakibatkan oleh terlalu banyak campur tangan dan regulasi pemerintah dalam perekonomian nasional.³⁴ Berikut ini adalah pembahasan teori-teori di atas.

1. Teori pertumbuhan linier.

Teori pembangunan linier adalah aliran pemikiran yang memandang proses pembangunan sebagai suatu seri urutan tahap-tahap yang harus dilalui oleh seluruh negara. Aliran ini mensyaratkan suatu kombinasi yang tepat antara tabungan, penanaman modal, dan bantuan asing, agar negara-negara yang sedang membangun dapat berjalan menelusuri pertumbuhan ekonomi yang menurut sejarahnya telah dilalui oleh negara-negara maju.³⁵ Model pertumbuhan ini mendominasi perkembangan teori pembangunan sejak pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith dan mengalami kejayaannya dengan lahirnya teori pertumbuhan yang

³⁴Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Buku I, terj Haris Munandar, Jakarta : Erlangga, 1998, h. 83.

³⁵Masykur Wiratmo, *Ekonomi Pembangunan, Ikhtisar Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta : MW. Mandala, 1992, h. 85.

dikemukakan oleh Rostow. Adapun yang akan diuraikan di sini adalah teori Adam Smith, Karl Marx, dan Rostow.

a. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari *masa perburuan*, *masa berternak*, *masa bercocok tanam*, *masa perdagangan*, dan terakhir adalah *tahap perindustrian*. Menurut teori ini masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya *sistem pembagian kerja* yang merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith.³⁶ Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru, dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi.³⁷

Untuk menjalankan sistem pembagian kerja terlebih dahulu harus ada *akumulasi modal* yang diperoleh dari dana tabungan. Adam Smith menganggap akumulasi modal sebagai syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal.³⁸ Dalam hal ini Adam Smith mengasumsikan hanya para tuan tanah dan pengusaha yang mampu

³⁶ Mudrajat Kuncoro, *op.cit.*, h. 38.

³⁷ Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, edisi 5, Yogyakarta : BPFE, 1992, h 16

³⁸ M.L. Jhingan, *op.cit.*, h. 102.

melakukan aktivitas menabung, untuk kemudian modal tersebut diinvestasikan ke sektor riil. Secara implisit, Adam Smith menyatakan bahwa gaji pekerja demikian kecilnya, sementara laba pengusaha demikian besarnya, sehingga mampu mengakumulasi modalnya. Artinya, dalam sistem ekonomi kapitalis posisi tawar menawar (*bargaining position*) pekerja terhadap pengusaha relatif sangat kecil. Jika ini benar, konsekuensinya adalah terjadi eksploitasi para pengusaha terhadap pekerja. Asumsi ini menunjukkan ketidakadilan dan kekejaman teori Adam Smith dengan sistem ekonomi kapitalisnya.³⁹

Di samping itu Adam Smith juga menitikberatkan pada *luas pasar*. Pasar harus seluas-luasnya agar dapat menampung hasil produksi, sehingga perdagangan internasional menarik perhatiannya karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar. Pasar terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Menurutnya, potensi pasar bisa dicapai secara maksimal jika setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pertukaran dan melakukan kegiatan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembenahan dan penghilangan peraturan-peraturan, undang-undang yang menjadi penghambat kebebasan berusaha, dan kegiatan ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Adam Smith merupakan penganjur *laissez faire* dan *free trade*.⁴⁰ Kebijakan ini didasarkan pada asumsi yang tidak realistis tentang *persaingan sempurna*. Kebijakan pasar bebas dari persaingan sempurna ini tidak ditemukan dalam perekonomian mana pun. Sejumlah pembatasan

³⁹ Mudrajat Kuncoro, *op.cit.*, h. 41.

⁴⁰ Lincoln Arsyad, *op.cit.*, h. 50.

malahan dikenakan pada sektor perseorangan (misalnya, larangan monopoli) dan pada perdagangan internasional (misalnya, adanya proteksi) pada setiap negara di dunia. Penetapan asumsi yang tidak realistis ini adalah salah satu kelemahan teori Pembangunan versi Adam Smith.⁴¹

Menurut Adam Smith, sekali pertumbuhan itu dimulai maka ia akan bersifat kumulatif. Artinya bila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi modal, pembagian kerja akan terjadi dan ini akan menaikkan GNP yang selanjutnya juga menaikkan jumlah penduduk. Penduduk tidak saja merupakan pasar karena pendapatannya yang lebih besar itu juga akan merupakan sumber tabungan. Jadi, spesialisasi yang semakin besar membutuhkan pasar yang semakin luas dan dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah. Di lain pihak, naiknya produktivitas akan mengakibatkan tingkat upah naik dan ada akumulasi modal. Akan tetapi, karena sumber daya alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan atau berhenti yang sering disebut dengan *keadaan stasioner*.⁴² Asumsi tentang keadaan stasioner ini dinilai tidak realistis, karena pembangunan terjadi tidak secara teratur, dan tidak seragam serta tetap.⁴³

b. Teori Pembangunan Marx

Karl Marx membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dari feodalisme, kapitalisme, kemudian sosialisme. Evolusi ini akan sejalan dengan

⁴¹ *Ibid.*, h. 58.

⁴² Irawan dan M. Suparmoko, *op.cit.*, h. 17.

⁴³ M.L. Jhingan, *op.cit.*, h. 107

proses pembangunan yang dilaksanakan. Dalam masyarakat feodalisme, perekonomiannya masih bersifat tradisional. Dalam masyarakat kapitalisme terjadi perkembangan teknologi yang menyebabkan pergeseran di sektor ekonomi dari agraris-feodal beralih ke industri yang kapitalis. Baik dalam masyarakat feodalisme maupun kapitalisme, pemilik modal (tuan tanah atau pengusaha) merupakan pihak yang memiliki tingkat posisi tawar-menawar relatif tertinggi terhadap pihak lain, khususnya buruh. Dari sinilah Marx memulai analisisnya tentang *teori pertentangan kelas, nilai lebih (surplus value), dan akumulasi modal*, yang semuanya dilakukan untuk mengkritik kapitalisme.

Analisis Marx ini dimulai dari adanya dua kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pemilik modal dan kelas tidak pemilik modal atau buruh (proletar) yang sering terjadi konflik kepentingan, ini menunjukkan adanya *pertentangan kelas* atau *perjuangan kelas*. Menurut pengamatan Marx, di seluruh dunia ini di sepanjang sejarah, kelas yang lebih bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraan mereka. Dengan demikian, Marx meramalkan bahwa kaum proletar yang terdiri dari para buruh akan bangkit melawan kesewenang-wenangan kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa.⁴⁴ Untuk menjelaskan kesewenang-wenangan para pemilik modal, Marx menggunakan analisis *teori nilai lebih (surplus value)*. Adanya nilai lebih dalam hubungan antara pemilik modal dan buruh ditunjukkan adanya pemberian upah kepada buruh yang jauh lebih kecil daripada produktivitas yang disumbangkan. Selisih antara nilai produktivitas dan tenaga buruh inilah yang disebut nilai lebih, yang nantinya digunakan oleh pemilik modal untuk melakukan *akumulasi modal*.

⁴⁴ Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, edisi revisi, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997, h. 67.

Para pemilik modal melakukan akumulasi modal dari nilai lebih. Maka dalam usaha memaksimalkan modal ini mereka tidak segan-segan mengeksploitasi pekerja atau buruh, baik dengan cara menurunkan upah maupun menaikkan produktivitas. Karena agak riskan untuk menurunkan upah, biasanya mereka memilih cara kedua dengan jalan investasi khususnya pada barang modal yang padat kapital.⁴⁵ Konsekuensinya mereka akan menurunkan penggunaan tenaga buruh diganti dengan tenaga-tenaga mesin yang lebih produktif dan efisien. Akibatnya akan terjadi pengangguran besar-besaran, daya beli masyarakat rendah, dan usaha-usaha kecil berguguran.⁴⁶ Dan, mulailah apa yang disebut krisis kapitalisme. Saat itu juga akan terjadi konflik antarkelas yang mengarah kepada revolusi sosial yang dilakukan oleh para buruh. Revolusi ini akan membawa perubahan-perubahan revolusioner di segala bidang. Akumulasi modal dalam sistem kapitalis akan diganti dengan pemerataan kesempatan, pemilikan sumber daya, individualis dalam masyarakat kapitalis akan berubah menjadi sosialis.⁴⁷

Teori-teori Marx pada dasarnya adalah kritiknya terhadap sistem kapitalis. Ia menunjukkan bahwa tahap pembangunan tidaklah semulus yang diperkirakan sebelumnya. Untuk mencapai perekonomian sosialis, terlebih dahulu harus melewati tahap depresi ekonomi akibat kapitalisme yang merajalela tanpa kendali. Teori Marx tentang depresi inilah yang akhirnya justru memperkuat argumentasi Keynes yang merekomendasikan peningkatan peran pemerintah bagi upaya mengatasi depresi

⁴⁵ Baik cara pertama atau kedua sama besarnya pengaruhnya terhadap terjadinya konflik dan pertentangan kelas dalam masyarakat.

⁴⁶ Menurut Marx sebab utama krisis ekonomi adalah kemiskinan dan terbatasnya daya beli orang banyak. Krisis ini nampak dalam bentuk melimpahnya hasil produksi barang, sulitnya menemukan pasar, jatuhnya harga, dan turunnya produksi secara tajam maka pengangguran meningkat, upah buruh dipotong terus menerus, fasilitas kredit hancur dan buruh kecil menjadi binasa. M.L. Jhingan, *op.cit.*, h. 150

⁴⁷ Mudrajat Kuncoro, *op.cit.*, h. 42.

ekonomi yang ada.⁴⁸ Meskipun demikian, teori-teori Marx juga penuh dengan kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Sebagai teori pembangunan, ekonomi Marxisme telah gagal.⁴⁹ Bahkan ia tidak lebih baik daripada kapitalisme yang eksploitatif.

c. Teori Pertumbuhan Rostow

Walt Whitman Rostow, seorang ahli sejarah ekonomi dari Amerika Serikat pada dekade 1950 dan 1960-an telah banyak mempengaruhi pandangan dan perspektif para ahli ekonomi mengenai strategi pembangunan yang harus dilakukan. Teorinya (*The Stages of Economic Growth*, 1960) didasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah dialami oleh negara-negara maju dari abad pertengahan hingga abad modern. Kemudian Rostow memformulasikan pola pembangunan yang ada menjadi tahap-tahap evolusi dari suatu pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut.⁵⁰

Rostow memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Ia membedakan adanya lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu : (1) masyarakat tradisional, (2) prasyarat untuk tinggal landas, (3) tinggal landas, (4) dewasa (*maturity*), dan (5) masa konsumsi massal.⁵¹

Pertama, tahap masyarakat tradisional cenderung bersifat subsisten. Pemanfaatan teknologi dalam sistem produksi masih sangat terbatas. Dalam

⁴⁸ *Ibid.*, h. 44.

⁴⁹ M.L. Jhingan, *op.cit.*, h. 153.

⁵⁰ Mudrajat Kuncoro, *op.cit.*, h. 45.

⁵¹ M.L. Jhingan, *op.cit.*, h. 179-188.

perekonomian ini sektor pertanian memegang peranan penting. *Kedua*, tahap prakondisi tinggal landas adalah proses transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sektor industri mulai berkembang di samping sektor pertanian yang masih memegang peranan penting dalam perekonomian. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan bagi persiapan menuju tahap-tahap pembangunan berikutnya, yaitu tahap tinggal landas. Tahap ini juga merupakan tonggak dimulainya industrialisasi, yang ditandai dengan munculnya industri-industri, perkembangan teknologi, lembaga-lembaga keuangan resmi sebagai penggerak dana masyarakat, serta investasi besar-besaran terutama dalam bidang manufaktur. *Ketiga*, tahap tinggal landas merupakan tahap menentukan dalam keseluruhan proses pembangunan bagi masyarakat. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tingkat pendapatan per kapita semakin besar. *Keempat*, tahap menuju kedewasaan ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi modern terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang yaitu produksi dilakukan secara swadaya. Tahapan ini juga ditandai dengan munculnya beberapa sektor penting yang baru. Pada saat negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, terhadap tiga perubahan penting yang terjadi : (1) tenaga kerja berubah

dari tidak terdidik menjadi terdidik, (2) perubahan watak pengusaha dari pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer yang efisien, yang halus dan sopan, (3) masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan lebih jauh. *Kelima*, tahap konsumsi massa tinggi merupakan akhir dari tahapan pembangunan Rostow. Tahap ini ditandai dengan terjadinya migrasi besar-besaran dari masyarakat pusat perkotaan ke pinggiran kota. Pada fase ini terjadi perubahan orientasi dari pendekatan penawaran (*supply side*) menuju ke pendekatan permintaan (*demand side*). Sementara itu juga terjadi pergeseran perilaku ekonomi yang semula lebih banyak menitikberatkan pada sisi produksi ke sisi konsumsi. Ada 3 kecenderungan yang ditempuh oleh negara yang mengalami tahap ini,⁵² (1) memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain, (2) menciptakan negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak progresif, (3) meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) menjadi meliputi pula barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah.

Beberapa kritik yang muncul terhadap teori Rostow ini antara lain berkaitan dengan adanya tumpang tindih tahapan, periode (jangka waktu) tahap tinggal landas yang meragukan, adanya masyarakat yang tidak melalui tahap tradisional, seperti Amerika dan Australia merupakan “temuan” benua orang-orang Eropa yang langsung menginjak tahap kedua.⁵³

⁵² Lincoln Arsyad, *op.cit.*, h. 54.

⁵³ *Ibid.*, h. 54.

Simon Kuznets (1989) mempertanyakan, bagaimana mungkin suatu desain sederhana dapat menjadi suatu rangkuman deskriptif atau klasifikasi analitik dari suatu perubahan historis yang beragam dan bervariasi? Kuznets menjelaskan kemiripan dan perbedaan antara teori Rostow dengan Marx, dan pengaruhnya dari pemikiran kapitalis Adam Smith. Beberapa kesamaannya adalah, *pertama* keduanya telah mencoba menginterpretasikan evolusi sosial khususnya di sektor ekonomi. *Kedua*, sama-sama mengeksplorasi permasalahan dan konsekuensi dari pembangunan sosial yang dilakukan. *Ketiga*, sama-sama menyadari bahwa perubahan sistem ekonomi pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari perubahan yang terjadi di bidang politik, kebudayaan, dan sosial. Sementara di sisi lain, perubahan sistem ekonomi akan berpengaruh juga terhadap kehidupan politik, kondisi budaya, dan sosial masyarakat. Adapun perbedaannya, *pertama*, Marx memandang bahwa manusia bersifat sangat kompleks yang memiliki berbagai dimensi kebutuhan dari ekonomi sampai budaya. Rostow mempersempit dimensi manusia menjadi satu, yaitu sebagai *homo economicus*. Sampai di sini Rostow sudah terpengaruh dengan pemikiran kapitalis Adam Smith. Meskipun demikian, Rostow sadar bahwa perubahan ekonomi yang sangat besar harus dipandang sebagai konsekuensi dari perubahan motif dan inspirasi dimensi nonekonomi dan manusia. *Kedua*, Marx mendasarkan teorinya pada sistem konflik antarkelas masyarakat, eksploitasi satu kelompok manusia terhadap kelompok yang lain, dan adanya tekanan-tekanan semacam itu yang melekat pada sistem kapitalis. Sementara itu, Rostow lebih implisit dalam memandang interaksi kelas masyarakat dalam sistem

kapitalis, mengingat Rostow sendiri adalah ekonom yang berkiblat pada kapitalis. *Ketiga*, Marx mengasumsikan bahwa keputusan yang diambil oleh masyarakat semata-mata hanyalah fungsi dari siapa pemilik sumberdaya. Artinya, perubahan ekonomi hanyalah merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh perubahan motif dan inspirasi ekonomi kelas masyarakat penguasa sumber daya saja. Rostow memandang bahwa perubahan ekonomi pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari perubahan motif dan inspirasi nonekonomi yang terjadi pada seluruh lapisan masyarakat.⁵⁴

2. Teori Perubahan Struktural

Teori ini memusatkan perhatiannya kepada suatu mekanisme yang memungkinkan perekonomian NSB mentransformasikan struktur perekonomiannya yang cenderung ke pertanian tradisional dan subsisten menjadi suatu perekonomian yang lebih modern dan beraneka di bidang industri dan jasa. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah W. Arthur Lewis dengan model teoretisnya tentang “surplus tenaga kerja dua sektor” (*two sector surplus labor*) dan Hollis B. Chenery dengan analisis empirisnya tentang “pola-pola pembangunan” (*patterns of development*).⁵⁵

Menurut Lewis, perekonomian di NSB terdiri dari dua sektor, yaitu : (1) sektor tradisional atau *sektor pedesaan subsisten* yang berlebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol. Lewis menyebutnya ini sebagai kondisi *surplus tenaga kerja (labor surplus)* sebagai suatu

⁵⁴Mudrajad kuncoro, *op.cit.*, h. 49-50.

⁵⁵ Michael P. Todaro, *op.cit.*, h. 89.

fakta bahwa sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian dan sektor itu tidak akan kehilangan *output*nya sedikit pun, (2) **sektor industri perkotaan** modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Ini akan meningkatkan *output* produksi. Dengan demikian, industri perkotaan tetap menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk pedesaan dengan jalan urbanisasi. Kondisi ini akan diikuti dengan naiknya investasian akumulasi kapital di sektor industri, dengan asumsi bahwa “para kapitalis” yang berkecimpung dalam sektor modern tersebut bersedia menanamkan kembali seluruh keuntungannya.⁵⁶ Sehingga, akan mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

Teori Lewis ini banyak dikritik karena asumsi-asumsi dasarnya banyak tidak relevan dengan NSB. *Pertama*, tentang meningkatnya lapangan pekerjaan yang sebanding dengan akumulasi modal. Kenyataannya tidak demikian, karena keuntungan yang ada direinvestasikan untuk peralatan penunjang produksi yang bersifat menghemat tenaga kerja (*labor saving*) dan lebih canggih daripada sebelumnya. Selain itu, teori ini juga tidak menjamin bahwa keuntungan akan dikirim ke luar negeri, sehingga menciptakan “pelarian modal” (*capital flight*) berupa penambahan rekening deposito di bank-bank Barat. Fenomena ini menunjukkan, meskipun akumulasi kapital mengalami peningkatan, namun tidak mempengaruhi jumlah pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Walaupun jumlah GNP secara keseluruhan memang meningkat, namun kemungkinan besar

⁵⁶ *Ibid.*, h. 90.

peningkatan kesejahteraan sosial agregat (misalnya, peningkatan upah buruh dan perluasan lapangan kerja) sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali.⁵⁷ *Kedua*, asumsi tentang surplus tenaga kerja di pedesaan tidak sesuai dengan kenyataan di NSB. Yang terjadi adalah sebaliknya, di kota mengalami surplus tenaga kerja, sehingga banyak pengangguran sedangkan di desa malah kekurangan tenaga kerja. *Ketiga*, pasar tenaga kerja akan menjamin tingkat upah berada pada tingkat yang tetap sampai penawaran tenaga kerja mengalami penurunan. Kenyataan menunjukkan bahwa di NSB terjadi kecenderungan peningkatan nilai upah secara terus-menerus baik di desa maupun di kota. Adanya serikat pekerja dan tuntutan penetapan upah minimum yang manusiawi merupakan sumber utama peningkatan itu.⁵⁸

Chenery dalam analisis pola pembangunan (*patterns of development analysis*) memfokuskan kepada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri, dan institusi dari perekonomian NSB yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri. Ia menyatakan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian ke sektor industri. Untuk tujuan itu peningkatan tabungan dan investasi merupakan syarat yang harus dipenuhi, tetapi tidak akan memadai jika harus berdiri sendiri.⁵⁹ Pola ini juga

⁵⁷ Bandingkan fenomena ini dengan pendekatan *trickle down effect* dalam pembangunan yang mengalami kegagalan.

⁵⁸ Mudrajat Kuncoro, *op.cit.*, h. 55-57. Lihat, teori Lewis mengenai penawaran buruh yang tidak terbatas, dalam M.L. Jhingan, *op.cit.*, h. 197- 207.

⁵⁹ Berbeda dengan model Lewis dan pandangan dualisme tentang pembangunan.

mensyaratkan bahwa selain akumulasi modal diperlukan juga suatu rangkaian perubahan yang saling berkaitan dalam struktur perekonomian negara yang bersangkutan demi terselenggaranya transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Perubahan-perubahan yang bersifat struktural ini melibatkan seluruh fungsi ekonomi termasuk transformasi penduduk dan perubahan komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional dan sumber daya, serta perubahan dalam faktor-faktor sosio-ekonomi seperti proses urbanisasi, pertumbuhan, dan distribusi penduduk.⁶⁰

3. Teori Ketergantungan Internasional (Dependencia)

Teori ketergantungan pertama kali dikembangkan di Amerika Latin pada tahun 1960-an. Menurut para pengikut teori ini, keterbelakangan (*underdeveloped*) negara-negara Amerika Latin terjadi pada saat masyarakat prakapitalis tersebut “tergabung” (*incorporated*) dalam sistem ekonomi dunia kapitalis.⁶¹ Teori ini kemudian tidak hanya berkembang di Amerika Latin saja, tetapi juga meluas di kalangan para intelektual negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini tampaknya karena tidak kunjung terwujudnya prediksi pertumbuhan ekonomi bertahap linier dan perubahan struktural. Pada intinya model-model ketergantungan internasional ini memandang negara-negara Dunia Ketiga sebagai korban kekakuan aneka faktor

⁶⁰ Ini karena teori ini mengasumsikan bahwa transformasi struktural yang terjadi di NSB dipengaruhi oleh faktor intern dan eksteren. Mengenai perdagangan atau kerjasama internasional dalam konteks pembangunan ada pendapat lain yang sangat pesimistis dari pemikiran ketergantungan internasional. Ini akan dibahas setelah ini.

⁶¹ Thee Kian Wie, “ Pendekatan Dependencia Dalam Sejarah Perekonomian: Suatu Kritik”, dalam Hendra Esmara, penyunting, *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1987, h. 297.

kelembagaan, politik, dan ekonomi, baik itu yang berskala domestik maupun internasional. Mereka semua telah terjebak ke dalam perangkap ketergantungan (*dependence*) dan dominasi (*dominance*) negara-negara kaya. Pendekatan ini sebenarnya terpecah menjadi sejumlah besar aliran, tetapi kesemuanya dapat digolongkan ke dalam tiga aliran pemikiran besar atau induk: model ketergantungan neokolonial (*neocolonial dependence model*), model paradigma palsu (*false paradigm model*), dan tesis pembangunan dualistik (*dualistic development thesis*).⁶²

Model ketergantungan neokolonial secara tidak langsung adalah pengembangan pemikiran kaum Marxis. Model ini menghubungkan keberadaan Dunia Ketiga kepada evolusi sejarah hubungan internasional yang sama sekali tidak seimbang antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin dalam suatu sistem kapitalis internasional. Koeksistensi negara-negara kaya dan miskin digambarkan sebagai hubungan kekuasaan yang sangat tidak berimbang, antara pusat (*center, core*) yang terdiri dari negara-negara maju, serta pinggiran (*periphery*), yakni kelompok NSB. Kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di NSB adalah tidak lepas dari pengaruh *eksternal* yang sengaja dicita-citakan, yaitu berupa kebijakan-kebijakan kelompok negara-negara industri kapitalis yang disebarluaskan melalui kelompok-kelompok domestik kecil elit yang berkuasa di semua NSB.⁶³ Bantuan-bantuan yang diberikan melalui badan-badan dunia seperti **Bank Dunia** dan

⁶² Michael P. Todaro, *op.cit.*, h. 97.

⁶³ Seperti para tuan tanah, pengusaha, penguasa militer, saudagar, pejabat pemerintah, dan pimpinan serikat buruh.

IMF adalah tidak lepas dari *vested of interest*, dan menyebabkan semakin meningkatnya ketergantungan. Meskipun bantuan itu menggunakan persyaratan-persyaratan lunak, namun IMF tetap memberikan rambu-rambu yang ujung-ujungnya menguntungkan pihak negara-negara kapitalis di balik layar.⁶⁴

Untuk itu menurut para penganjur kebijakan ini perjuangan revolusioner, paling tidak berupa serangkaian restrukturisasi mendasar atas sistem kapitalis dunia, mutlak perlu dilakukan dalam rangka membebaskan ketergantungan NSB dari pengendalian ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh Dunia Pertama yang dibantu oleh antek-anteknya, yakni para kelompok elit domestik penindas.⁶⁵ Pendekatannya yang bersifat revolusioner terhadap tindakan eksploitasi oleh negara-negara kapitalis menyebabkannya sering disebut sebagai pendekatan radikal yang diidentikkan dengan teori Marxis.⁶⁶ Paul Baran mengatakan bahwa negara-negara Dunia Ketiga sudah terjebak dalam perangkap sistem kapitalisme dunia, maka tidak ada harapan lagi untuk mencapai kemajuan. Hanya suatu revolusi bisa membuka jalan ke arah masa depan yang lebih baik. Seorang pakar dalam garis keras dalam aliran dependensia, Gunder Frank juga menyatakan bahwa jika kondisi ketergantungan ini dibiarkan maka akan terjadi keterbelakangan yang berkelanjutan (*further development of underdevelopment*). Satu-satunya jalan keluar ialah aksi politik dengan melakukan revolusi yang bersendikan sosialisme revolusioner.⁶⁷

⁶⁴ Saeful Arif, *op.cit.*, h.137.

⁶⁵ Michael P. Todaro, *op.cit.*, h. 98

⁶⁶ Lihat, Bruce Herrkk dan Charles P. Kindleberger, *Economic Development*, fourth edition, Singapore : McGraw Hill, 1984, h. 54.

⁶⁷ Sumitro Djohadikusumo, *op.cit.*, h. 85-87.

Aliran kedua dari teori ketergantungan internasional adalah *model paradigma palsu (false paradigm model)*. Model ini relatif tidak begitu radikal, ia menghubungkan keterbelakangan NSB dengan kesalahan dan ketidaktepatan saran yang diberikan oleh para pengamat atau pakar internasional yang bernaung di bawah lembaga-lembaga bantuan negara maju dan organisasi-organisasi donor multinasional. Kebijakan-kebijakan yang ditawarkan sering tidak tepat guna, karena tidak memperhatikan faktor-faktor historis yang ada di NSB. Di samping itu, menurut argumen paradigma palsu ini, para cendekiawan, para pemimpin serikat pekerja, para ekonom, dan para pejabat di NSB pada umumnya mendapat pendidikan dan pelatihan Barat. Seringkali tanpa disadari, mereka terlalu banyak menelan konsep-konsep asing yang serba hebat tetapi sebenarnya tidak cocok diterapkan di negaranya. Akibatnya, tidak bisa mengatasi masalah-masalah pembangunan, tetapi justru menjadi pembela keyakinan asing yang melupakan adanya sistem kebijakan elitis serta struktur kelembagaan yang khas negara berkembang.⁶⁸

Adapun analisis *tesis pembangunan dualistik* terhadap keterbelakangan NSB didasarkan pada 4 elemen kunci. *Pertama*, adanya elemen “superior” dan “inferior” yang hadir bersamaan (koeksistensi) di setiap tempat dan konteks yang sama. Inilah hakikat konsep dualisme.⁶⁹ *Kedua*, koeksistensi tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat sementara atau transisional, melainkan sesuatu yang bersifat baku, permanen atau kronis. Sehingga, tidak mungkin terkikis secara otomatis seiring

⁶⁸ Michael P. Todaro, *op.cit.*, h. 100

⁶⁹ Contoh penerapan konsep dualisme bisa dilihat dalam pemikiran Lewis tentang koeksistensi metode-metode produksi modern di kota dan metode tradisional di desa.

dengan berlalunya waktu. Artinya, elemen superior memiliki kekuatan untuk mempertahankan superioritasnya, sedangkan elemen yang inferior tidaklah mudah untuk meningkatkan posisinya. Dalam kalimat lain, koeksistensi internasional bukanlah hanya merupakan suatu fenomena sejarah yang akan membaik dengan sendirinya bila saatnya sudah tiba. Ini membantah teori pertumbuhan ekonomi bertahap dan model perubahan struktural. *Ketiga*, kadar superioritas serta inferioritas dari masing-masing elemen akan terus meningkat sehingga memperlebar kesenjangan. *Keempat*, hubungan antara elemen superior dan inferior sama sekali tidak memberi manfaat untuk meningkatkan elemen-elemen inferior. Dengan demikian, apa yang disebut prinsip perembesan ke bawah (*trickle down effect*) sulit diterima. Karena, kenyataannya sering elemen superior justru memanfaatkan, memanipulasi dan mengeksploitasi elemen inferior.

Secara umum semua aliran dari teori ketergantungan ini dengan tegas menolak penekanan-penekanan khusus dalam model-model ekonomi Barat tradisional yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan GNP sebagai tujuan utama pembangunan. Mereka mempertanyakan kebenaran model-model modernisasi dua sektor dan model-model industrialisasi secara kilat seperti yang diajukan Lewis, dan pendapat Chenery dan para tokoh lainnya tentang adanya keteraturan pola pembangunan yang seharusnya diikuti oleh sebagian besar negara-negara miskin. Mereka pun menekankan dilakukannya reformasi ekonomi, politik, dan kelembagaan secara mendasar baik di masing-masing negara berkembang itu sendiri

⁷⁰ *Ibid.*, h. 101.

maupun sistem internasional secara keseluruhan. Bahkan secara ekstrem mereka menyerukan dihapusnya kepemilikan pribadi dan digantikannya dengan kepemilikan bersama yang mereka anggap lebih baik dan lebih adil.

Adapun kritik para ekonom terhadap teori dependensia di antaranya adalah , bahwa teori ini tidak lebih dari sekadar tesis yang mampu mengumpulkan sebab-sebab terjadinya keterbelakangan dan ketergantungan semata tanpa mampu mencari solusi/jalan keluarnya. Teori ini sering diikuti dengan kampanye nasionalisasi industri-industri swasta, dan kenyataannya negara atau pemerintah mengalami kegagalan sama dengan pasar. Pada dekade 1980-an, gagasan kontrarevolusi pasar bebas neoklasik mulai muncul dan segera mendominasi pemikiran Barat dan negara-negara Dunia Ketiga.⁷¹ Munculnya kembali neoklasik ini menurut Kevin P. Clement disebabkan oleh kegagalan teori ketergantungan Marxis dan Neo-Marxis dalam memberikan pemecahan, sebagaimana yang disimpulkan dalam “*Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan*”, (1997).

Teori pembangunan Marxis dan Neo-Marxis memberikan penjelasan teoretis yang terbaik mengenai pembangunan dan keterbelakangan pada tingkat nasional dan internasional. Karena teori-teori ini , bagaimanapun juga , merupakan teori radikal, dan tidak menawarkan pemecahan-pemecahan yang tegas terhadap masalah sehari-hari yang dihadapi oleh pembuat keputusan, maka terciptalah ruang kosong yang cenderung diisi dengan teori yang lebih konservatif dan tidak memadai. Pembuat keputusan yang menggunakan teori konservatif sebagai pemandu sering menampilkan keputusan mereka sebagai retorika perspektif yang lebih radikal sehingga menciptakan tindakan yang menyesatkan. Terlebih lagi, penerapan teori monetaris Neo-Klasik yang konservatif atau Strukturalis nasionalis yang borjuis cenderung memperlebar gap kaya dan miskin.⁷²

⁷¹ *Ibid.*, h. 102.

⁷² Kevin P. Clements, *op.cit.*, h. vi-vii.

4. Neo-Klasik Penentang Revolusi

Memasuki dekade 1980-an, orientasi politik konservatif yang dianut dan dijalankan oleh pemerintah di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jerman menghadirkan kembali apa yang disebut sebagai “kontrarevolusi Neo-Klasik” (*neoclassical counterrevolution*) dalam teori dan kebijakan ekonomi. Inilah yang sering disebut dengan kembalinya ideologi pasar setelah selama dekade 1960-1970-an ekonomi pembangunan sempat didominasi oleh kebijakan-kebijakan antipasar (*dirigiste*). Ini dimulai ketika Partai Konservatif di Inggris dan Partai Republik di Amerika pada tahun 1979 memenangkan pemilihan umum yang menampilkan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Keduanya menyerang habis sendi-sendi aliran kiri dengan menarik mundur peran negara dari perekonomian, pajak diturunkan, privatisasi digalakkan. Terkenallah sebutan “*Thatcherisme*” atau “*Reaganomics*”.⁷³

Kontrarevolusi ini antara lain terwujud berupa aliran pemikiran makroekonomi yang lebih mementingkan sisi penawaran (*supply-side macroeconomics*), teori rasional ekspektasi, gelombang swastanisasi perusahaan-perusahaan milik negara, serta munculnya imbauan gencar tentang -paling tidak,- dihilangkannya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari sinilah teori ini mendasarkan argumentasinya terhadap serangan teori ketergantungan. Dikatakan bahwa keterbelakangan yang terjadi di NSB bukanlah disebabkan oleh eksploitasi negara pusat atas negara periferi. Bukan karena faktor ekstern melainkan lebih karena faktor intern yang ada di NSB itu sendiri. Besarnya campur tangan

⁷³ Anthony Giddens, *Jalan Ketiga : Pembaruan Demokrasi Sosial*, terj. Ketut Arya Mahardika, Jakarta : Gramedia, 1999, h. xx. Lihat juga Kevin P. Clements, *op.cit.*, h. 23.

pemerintah, merebaknya korupsi, kurangnya intensif ekonomi, dan kesalahan dalam pengalokasian sumber daya, merupakan sumber utama keterbelakangan itu.⁷⁴

Jadi, menurut pemikiran ini, apa yang diperlukan NSB bukanlah reformasi sistem ekonomi internasional secara besar-besaran, restrukturisasi pola perekonomian dualistik di NSB itu sendiri, peningkatan dana-dana bantuan luar negeri, pembatasan laju pertumbuhan penduduk hingga ke tingkat yang serendah-rendahnya, ataupun serangkaian pembaharuan atas sistem perencanaan terpusat yang lebih efektif; melainkan promosi pasar bebas dan perekonomian *laissez-faire*. Artinya, campur tangan pemerintah dalam perekonomian harus dibatasi dan selanjutnya keputusan-keputusan ekonomi terpenting harus diserahkan kepada “keajaiban pasar” dan mekanisme “tangan tak nampak” harga, khususnya dalam pengalokasian segenap sumber daya dan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.⁷⁵

Mereka menunjuk keberhasilan sejumlah perekonomian industri baru yaitu, negara-negara Asia Timur sebagai contoh kehebatan pasar bebas, dan kegagalan sejumlah perekonomian yang mengandalkan campur tangan pemerintah di negara-negara Afrika dan Amerika Latin.⁷⁶

Lepas dari kesuksesan negara-negara Barat dalam menerapkan teori ini, agaknya *laissez faire* akan sulit diterapkan di NSB. Struktur dan organisasi ekonomi NSB tidak sama dengan yang ada dalam perekonomian negara-negara Barat. Asumsi perilaku dan kebijakan ekonomi dalam teori Neo-Klasik belum tentu cocok untuk NSB. Pasar-pasar kompetitif, misalnya, ternyata tidak ditemukan pada perekonomian

⁷⁴ Mudrajat Kuncoro, *op.cit.*, h. 66.

⁷⁵ Michael P. Todaro, *op.cit.*, h. 103.

⁷⁶ Mengenai contoh kehebatan pasar bebas ini akan ditunjukkan kesalahan-kesalahannya dalam bab berikutnya, yaitu bagian akhir dari bab III (bab kritik M.Umer. Chapra). Dijelaskan bahwa negara-negara industri baru itu jauh sekali dari prototipe “*laissez faire*”.

NSB, pada umumnya lebih bersifat monopoli atau oligopoli, sehingga kalau kebijakan ini diterapkan hanya akan menambah ketimpangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Myrdal tentang dampak perdagangan internasional terhadap NSB :

Bahwa teori klasik mengenai perdagangan internasional tidak memadai untuk menjelaskan berlangsungnya ketimpangan dan kesenjangan yang seakan-akan bersifat permanen. Harus ditempuh langkah-langkah kebijakan khusus untuk membendung arah kecenderungan yang sedang berlangsung dalam lalu lintas ekonomi internasional. Tanpa itu maka perdagangan internasional tidak akan membawa ekualisasi (persamaan) pada tingkat pendapatan negara-negara berkembang dengan tingkat pendapatan negara-negara maju. Apa yang terjadi bahkan sebaliknya, yaitu semakin besar ketimpangan dan kesenjangan.⁷⁷

Myrdal juga menjelaskan bahwa pembebasan dan perluasan pasar akan sering memberikan keuntungan daya saing kepada industri di sentra-sentra pengembangan yang telah mapan, yang biasanya memberikan iklim yang lebih menguntungkan. Sehingga, hal ini akan menghambat industri kerajinan dan industri yang ada sebelumnya di wilayah kurang maju.⁷⁸

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁷⁷ Dikutip dari, Sumitro Djojohadikusumo, *op.cit.*, h. 114.

⁷⁸ Masykur Wiratmo, *op.cit.*, h. 83.

BAB IV

KRITIK M. UMER CHAPRA TERHADAP EKONOMI PEMBANGUNAN

Bab ini berisi kritik Chapra terhadap ekonomi pembangunan. Dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga subbab; kritik paradigma, kritik kebijakan, dan kembalinya ideologi pasar.

Dalam subbab pertama (kritik paradigma) akan disoroti paradigma Neo-Klasik dan Marxis, yaitu *laissez faire* dan *dirigiste*, kemudian pendekatan yang sering digunakan untuk menerapkan teori-teori Barat di negara-negara sedang berkembang. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan *etnosentris* atau *euro sentrisme*.

Subbab kedua (kritik kebijakan) akan membahas pendekatan *trickle down effect* yang sering dijadikan strategi pemerataan. Kemudian, konsep teori pertukaran (*trade-off*) antara inflasi dan pengangguran, serta pertumbuhan dan ketidakmerataan. Selanjutnya, akan dibahas kontroversi antara kebijakan yang menekankan kepada sektor pertanian dan industri, serta substitusi impor dengan promosi ekspor. Dan, pembahasan terakhir dari subbab adalah implikasi kebijakan yang sering terabaikan. Dalam hal ini akan dikemukakan inflasi, hutang dan sulitnya perencanaan.

Subbab ketiga (kembalinya ideologi pasar) akan membahas program Neo-Klasik, yaitu penyesuaian *adjustment*. Selanjutnya, akan dibahas klaim Neo-Klasik yang salah. Dalam hal ini akan diungkap keberhasilan Asia Timur dalam pembangunan yang ternyata tidak sesuai dengan klaim Neo-Klasik yang mengalamatkan pada peran *laissez faire*. Oleh karena itu, akan dibahas faktor-faktor keberhasilannya sebagai bantahan klaim tersebut.

A. Kritik Paradigma

1. Laissez Faire dan Dirigiste¹

Sampai saat ini negara-negara di dunia masih mengalami krisis pembangunan, baik di negara maju, transisi, maupun terbelakang. Hal ini berpangkal dari ketidakberhasilan negara-negara di dunia mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah jauh-jauh dicanangkan sebelumnya. Beberapa negara berkembang menghadapi permasalahan yang memiliki pola sejenis, yaitu *disparitas* distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi,² kemerosotan *term of trade*, marginalisasi ekonomi rakyat, dan ketergantungan hampir dalam semua kegiatan pembangunan pertumbuhan yang tinggi adalah pertumbuhan dengan segala ketergantungannya kepada negara maju (*dependent development*), yang akhirnya berdampak pada lemahnya kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang.³

Realitas ekonomi pembangunan yang kontraproduktif dengan tujuan-tujuannya inilah yang menimbulkan banyak kritik dan tidak habis-habisnya. Berbagai permasalahan yang muncul di balik pembangunan negara berkembang banyak

¹ *Laissez Faire* adalah istilah yang digunakan dalam wacana umum untuk mengacu kepada paradigma Klasik atau Neo-Klasik, sedang *Dirigiste* adalah untuk mengacu kepada paradigma Marxis atau Neo-Marxis. Amitai Etzioni, *Dimensi Moral, Menuju Ilmu Ekonomi Baru*, terj. Tjun Surjaman, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992, h. 2.

² Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) Catherine Bertini memprediksi bahwa ancaman kelaparan yang melanda dunia akan dialami oleh 16 juta penduduk negara-negara di Tanduk Afrika. Pernyataan ini disampaikan utusan khusus PBB tersebut saat mengunjungi korban kelaparan di Gode, Ethiopia. *Kedaulatan Rakyat*, 14 April 2000. Yogyakarta.

³ Sebagaimana yang dialami oleh Indonesia dengan lembaga penyanggah dana internasional IMF. Lihat Edy Suandi Hamid, "Ekonomi Indonesia masih ditentukan IMF", *Kedaulatan Rakyat*, 14 April 2000. Yogyakarta.

dipicu oleh paradigma pembangunan yang selama ini digunakan, yaitu paradigma yang diimpor dari Barat, yang tentunya sangat berbeda sosial historisnya dengan negara-negara berkembang. Berkaitan dengan ini David Karter (1990), dalam *Getting to the 21th Century Voluntary Action and the Global Agenda*, berpendapat bahwa apa yang dilakukan orang sekarang adalah mengobati penyakit baru dengan resep lama.⁴ Dengan demikian, sangatlah mungkin bahwa penyakit-penyakit pembangunan yang sudah sedemikian resisten terhadap resep-resep lama tersebut suatu saat akan muncul kembali dengan tingkat resistensi lebih tinggi.

Perdebatan dalam ekonomi pembangunan telah terpolarisasi antara mereka yang tidak mendukung ketergantungan pada pasar dan mereka yang meyakini bahwa liberalisasi pasar dengan pengurangan peran pemerintah adalah sangat penting untuk menyelesaikan masalah negara berkembang. Sejak tahun 1950-an ekonomi Keynes dan sosialis memperoleh momentum di dunia Barat, sebagai akibat dari depresi besar dan masalah rekonstruksi setelah perang, ekonomi pembangunan juga meninggalkan dasar Neo-Klasiknya dan merasa kurang percaya kepada pasar dan peran pemerintah yang lebih besar dalam bidang ekonomi. Namun, ketika pelaksanaan strategi Keynes dan sosialis mulai melemah pada awal tahun 1970-an dan ekonomi Neo-Klasik mulai *comeback*, ekonomi pembangunan mulai memasuki masa kritis.⁵ Pandangan

⁴ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, h. 118-119.

⁵ Perubahan dramatis dalam tatanan ekonomi internasional pasca perang ini memicu perdebatan sengit mengenai status hegemonik AS. Banyak penulis beranggapan bahwa perubahan tersebut merupakan kemerosotan absolut maupun relatif hegemoni AS. Seperti yang disebutkan oleh Robert Keohane (1984), Robert Gilpin (1975), dan Immanuel Wallerstein (1979). Meskipun juga ada pendapat yang menolak dengan mengatakan bahwa anggapan tentang memudarnya hegemoni AS

yang dominan berubah menjadi cenderung *antidirigiste* dan *propasar bebas*, mencerminkan adanya kebangkitan liberalisme dan ekonomi neoklasik. Akibatnya, beberapa problema ekonomi pembangunan di negara-negara berkembang dilemparkan kepada kebijakan dirigiste yang dijalankan sebelumnya. Tingkat inflasi yang tinggi di seluruh dunia pada tahun 1970-an dianggap sebagai sebuah konsekuensi yang bisa diprediksikan dari penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi Keynesian.⁶ Dengan alasan, manajemen ini dibangun di atas kentalnya intervensi negara.

Perubahan-perubahan dalam ekonomi pembangunan dari pasar ke negara dan kembali lagi ke pasar, oleh Chapra dipandang sebagai pemihakan setengah hati ekonomi pembangunan. Hal ini telah membelokkannya dari tujuan yang jelas dan melahirkan resep kebijakan yang bertentangan serta menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian dalam program pembangunan di negara-negara berkembang. Ketidakpastian ini juga dinyatakan oleh Arief Budiman bahwa jawaban-jawaban terhadap problema pembangunan sampai sekarang kurang begitu memuaskan. Krisis pembangunan timbul di mana-mana sementara belum ada model pembangunan mana yang bisa dijadikan pegangan untuk masa depan.⁷ Tugas negara-negara berkembang menurut Chapra adalah tidak hanya mengembangkan ekonomi dengan

hanyalah mitos. Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, h. 117.

⁶ Kritik terhadap ekonomi Keynesian ini bisa dilihat dalam, Fredrich A. Hayek, *New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas*, Chicago : University of Chicago Press, 1985, h. 195. Milton Friedman, *The Counter-Revolution in Monetary Theory*, London : The Institute of Economic Affairs Occasional Paper Series No. 33, 1970, h. 24.

⁷ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995, h. 113.

cara yang tepat dan dapat mengarah pada tingkat efisiensi dan keadilan yang lebih tinggi, tetapi juga harus mengubah ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh resep lama yang salah itu.⁸ Tentang resep lama ini, Clements menyebutnya sebagai suatu yang menggelikan. Ketika teori Neo-Klasik bangkit dan mendiskreditkan teori Keynesian, pada saat yang sama teori Neo-Klasik secara sistematis didiskreditkan selama berlangsungnya depresi antara dua perang dunia. Hal ini sebagian bisa dijelaskan dari kenyataan bahwa teori ini merupakan wujud usaha mati-matian yang dilakukan oleh kubu kapitalis untuk menghasilkan teori yang memungkinkan mereka mereorganisasi diri tanpa mengalami perubahan-perubahan mendasar pada hubungan antara yang kaya dengan yang miskin.⁹ Sehingga, disparitas kekayaan tidak mendapat prioritas penanganan. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah kebijakan baru yang sudah ditetapkan menurut ekonomi Neo-Klasik akan membantu mewujudkan keadilan bersama dengan efisiensi dan stabilisasi. Untuk itu perlu dilihat dampak pandangan dunia Barat dalam ekonomi pembangunan dan masalah-masalah yang ditimbulkannya bagi negara-negara berkembang.

Menurut Chapra, paradigma pembangunan Barat adalah lahir dari pandangan dunia *Enlightenment*, pendekatan yang dipakai untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan analisis mereka tentang problema-problema manusia adalah sekuler. Mereka tidak mengindahkan peranan nilai moral reformasi individu dan sosial, dan terlalu berlebihan menekankan peranan pasar atau negara. Mereka tidak memiliki komitmen kepada persaudaraan dan keadilan sosial, dan tidak pula

⁸ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, Leicester, U.K : The Islamic Foundation, 1992, h. 148.

⁹ Kevin P. Clements, *Teori Pembangunan dari Kini ke Kanan*, terj, Endi Haryono, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997, h. 23.

memiliki mekanisme filter nilai-nilai moral yang disetujui oleh masyarakat. Pandangan mereka yang sangat bersifat duniawi tidak memberikan suatu dasar rasional apa pun selain materialisme dan Darwinisme sosial. Dalam Kerangka Kerja ini tidak ada motivasi untuk memenuhi kepentingan sosial kecuali bila ia secara otomatis merupakan hasil tidak langsung dari pemenuhan kepentingan pribadi.¹⁰

Ajaran Adam Smith menekankan pada kepentingan pribadi (*self-interest*) dan kebebasan alamiah (*natural-liberty*).¹¹ Ia menganggap bahwa sikap egoistis akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Dampak dari aktivitas tiap individu dalam mengejar kepentingan diri mereka masing-masing terhadap kemajuan masyarakat justru lebih baik, dibandingkan dengan tiap orang berusaha memajukan masyarakat. Melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap individu pada gilirannya adalah melayani kepentingan sosial.

Logika di balik pandangan Adam Smith ini adalah bahwa keinginan untuk melayani kepentingan diri sendiri akan mendorong menjadi pelaku yang paling efisien. Persaingan akan bertindak sebagai suatu batasan bagi pemenuhan nafsunya dan menghalanginya dari usaha melampaui batas-batas kepentingan sosial. Konsumen akan membeli produk dengan harga yang paling rendah sesuai dengan preferensinya. Produsen akan berusaha memproduksi apa saja yang diinginkan oleh

¹⁰ M. Umer Chapra, *op.cit.*, h. 149.

¹¹ Edwin R.A. Seligman, "Introduction", dalam Adam Smith, *The Wealth of Nations*, vol. II, London : JM. Dent and Sons Ltd., 1960, h. vii.

¹² Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Edisi Revisi, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997, h. 27-29.

konsumen dengan menekan biaya yang paling murah untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Perilaku konsumen dan produsen ini akan menjamin efisiensi.¹³ Dengan demikian, dalam konsep pasar (inti konsep makro paradigma neoklasik) setiap faktor di pasar mengejar tujuannya, akibatnya bukan konflik yang destruktif, melainkan sebaliknya suatu sistem yang mengekalkan diri dan dengan sendirinya harmonis. Selain itu, jual-beli akan mengorganisasi penggunaan sumber daya dengan cara yang efisien secara maksimal, tanpa campur tangan dari luar. Pemeliharaan stabilitas dan ketertiban telah diasumsikan secara implisit dan karena itu sama sekali diabaikan atau, kalau tidak, ketertiban secara eksplisit dianggap sudah ada.¹⁴ Asumsi inilah yang dinilai oleh Chapra sebagai asumsi yang tidak realistis. Tidak ada alasan mengapa dalam ketiadaan nilai-nilai moral, “konsumen yang berkuasa” akan mengerem keinginan-keinginannya sejauh ia memiliki uang untuk membeli. Adalah masuk akal mengharapkan bahwa mereka hanya akan membeli barang-barang yang sesuai dengan skala preferensinya tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkannya atas ketersediaan sumber daya untuk memuaskan kebutuhan si miskin. Dengan berpandangan Darwinisme Sosial, ia telah mengalami indoktrinasi dalam sebuah masyarakat sekuler, ia tidak merasa cemas dengan ketidakberdayaan si miskin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ia tidak akan menyalahkan permintaannya sendiri yang berlebihan atas kurang terpenuhinya kebutuhan si miskin. Malah ia akan

¹³M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2000, h. 16.

¹⁴Amitai Etzioni, *op.cit.*, h. 214.

melemparkan kesengsaraan ini kepada mereka, atas kemalasan dan ketidakefisienan mereka.¹⁵

Paradigma Neo-Klasik telah melukiskan pasar sebagai mekanisme alokatif, yaitu yang menentukan siapa mendapat apa. Bagi kaum Neo-Klasik, pada dasarnya hal ini merupakan masalah alokasi yang efisien yang “hendaknya tidak didistorsikan” oleh kriteria yang “ekstrinsik” seperti nilai-nilai orang (selain yang melekat dalam preferensi individualistik yang melayani diri). Implikasinya ialah bahwa pasar mengganjar mereka yang bekerja keras dan menabung, dan menghukum mereka yang tidak efisien atau malas. Alokasi yang “adil” dipandang sebagai alokasi di mana tidak ada posisi orang yang dapat diperbaiki tanpa memperburuk orang lain (optimal pareto).¹⁶



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Analisis pasar ini diasumsikan oleh Neo-Klasik dengan transaksi dalam konteks kompetisi sempurna. Namun, dunia tempat transaksi ekonomi terjadi tidaklah kompetitif dengan sempurna. Para ekonom sejak Walras (1954) sampai Debreu (1959) telah menaruh perhatian pada perincian prasyarat-prasyarat bagi kompetisi sempurna. Namun telah lama diakui bahwa prasyarat-prasyarat bagi kompetisi sempurna itu mungkin tidak pernah terpenuhi.¹⁷ Lebih jelasnya tentang asumsi-asumsi yang sulit dipenuhi, Chapra menyebutkan beberapa asumsi kapitalis yang tidak realistis, yang secara implisit telah dipakai dalam penalaran di atas

¹⁵M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. 34.

¹⁶Amitai Etzioni, *op.cit.*, h. 88.

¹⁷*Ibid.*, h. 215.

meskipun biasanya hal ini tidak disebutkan secara jelas dalam buku ekonomi.

Sebagian dari asumsi tersebut adalah sebagai berikut : (a) keharmonisan antara kepentingan individu dan sosial. Hal ini keliru karena kedua kepentingan tersebut tidak selalu seirama, terutama karena di dalam suatu lingkungan sekuler tidak ada yang memberikan motivasi kepada konsumen atau produsen untuk memenuhi kepentingan sosial manakala hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadinya, (b) preferensi individu menunjukkan prioritas sosial. Asumsi ini terbukti keliru, karena tanpa keinginan untuk menahani diri yang komitmen kepada nilai-nilai moral dalam penggunaan sumberdaya-sumberdaya maka pilihan yang di jatuhkan di pasar boleh jadi tidak merefleksikan prioritas sosial, (c) distribusi yang merata. Hanya dengan distribusi yang merata yang akan memberikan setiap orang suatu bobot yang sama dalam mempengaruhi proses pembuatan keputusan di pasar dalam sebuah lingkungan sekuler, yakni nilai-nilai moral tidak lagi berfungsi sebagai suatu tatanan dalam penggunaan-penggunaan sumber daya, (d) harga sebagai refleksi urgensi kebutuhan. Asumsi ini juga keliru, karena meskipun urgensi untuk membeli susu adalah sama bagi semua anak-anak, baik kaya maupun miskin. Akan tetapi jumlah uang yang digunakan oleh orang miskin untuk membeli susu tidaklah sama dengan yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk memperoleh status simbol, (e) persaingan pasar yang sempurna. Asumsi ini sulit diwujudkan dan mungkin tetap demikian terutama karena ada tendensi di bawah kapitalisme menuju ke arah promosi bisnis besar dan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan.¹⁸

¹⁸M.Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, *op.cit.*, h. 17-20.

Dalam hal ini, kaum Austrian juga mengemukakan cacatnya Neo-Klasik, di antaranya : (a) perhatian yang berlebihan terhadap keadaan keseimbangan pasar (*equilibrium*), (b) pandangan yang tidak menguntungkan terhadap sifat dan peranan persaingan di pasar (persaingan sempurna), (c) perhatian yang sangat tidak memadai terhadap peranan dan karakter subjektif pengetahuan, perkiraan dan pelajaran di dalam proses pasar, (d) suatu pendekatan normatif yang sangat tergantung pada konsep-konsep agregasi yang diragukan dan karena itu tidak peka terhadap pemikiran koordinasi perencanaan antarpartisipan pasar.¹⁹

Teori-teori sosialis yang paling masyhur dan paling banyak pengaruhnya adalah teori Karl Marx, yang pada umumnya merupakan kritik terhadap kapitalis. Dalam prosesnya, Marx menggunakan sejumlah konsep kunci semisal alienasi, eksploitasi, nilai surplus, pemilikan pribadi, perjuangan kelas, perbudakan gaji (*wage slavery*) dan determinisme ekonomi.²⁰

Dalam teorinya tentang nilai (*value*), ia mengatakan bahwa sumber satu-satunya bagi nilai adalah usaha yang dikorbankan untuk menghasilkan suatu barang. Para pemilik modal dalam sistem kapitalis telah membeli tenaga pekerja dengan upah yang tidak lebih dari sekadar mempertahankan hidupnya agar bisa bekerja. Kemudian, pekerja tersebut mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan barang-barang yang nilainya jauh melebihi upah yang diberikan kepada pekerja tersebut. Perbedaan antara yang dihasilkan oleh pekerja dengan upah riil yang diberikan

¹⁹Israil M. Kirzner, "Pandangan Austrian Terhadap Krisis" dalam Daniel Bell dan Irving Kristol, (Ed.), *Krisis Teori Ekonomi*, terj. Umar Juoro, Jakarta: LP3ES, 1988, h. 166.

²⁰M. Umer Chapra, *IEC*, *op.cit.*, h. 72.

disebut dengan nilai lebih tenaga kerja (*surplus labor and value*). Apa yang dirampas oleh pemilik modal dan pemilik pekerjaan terhadap hak-hak para pekerja disebut dengan pendapatan, laba, manfaat modal (*capital utility*).²¹ Pandangan ini dipengaruhi oleh imajinasi dialektik materialisme dan materialisme historis yang dikembangkan Marx, yaitu sejarah merupakan alur masa dengan pertentangan antara kelas budak - majikan, buruh - pemilik modal, rakyat - raja, dan sebagainya.²²

Dalam pertentangan antarkelas, yang kuat (*borjuis*) selalu dalam posisi yang diuntungkan sedangkan yang lemah (*proletar*) tetap tidak bisa memperbaiki posisinya. Ini “merendahkan” dan “mereduksi” mereka menjadi “fragmen umat manusia” (*alienasi*). Mereka menjadi tidak mampu mengembangkan potensi secara penuh. Eksploitasi menyebabkan terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas yang bertentangan dan meletakkan lahan perjuangan kelas membentuk sejarah manusia yang merupakan inti dari proses sejarah. Nasib mereka ditentukan oleh konflik yang tidak terhindarkan dari kepentingan ekonomi dalam kelas-kelas yang beragam dalam masyarakat (*determinisme ekonomi*).²³

Untuk mengakhiri alienasi, eksploitasi, dan perjuangan kelas, Marx menghapuskan pemilikan pribadi. Strategi yang digunakan adalah revolusi, yaitu memusnahkan kaum borjuis dan menasionalisasikan sarana-sarana produksi milik pribadi. Oleh karena itu, akan tercipta sebuah masyarakat rasional yang progresif

²¹Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti, 1996 h. 33.

²²Didik Rachbini, *Ekonomi Politik, Paradigma, Teori, dan Perspektif Baru*, Jakarta : CIDES, 1996, h. 5.

²³M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. 73.

tanpa upah, uang, kelas-kelas sosial dan akhirnya tanpa negara. Penjelasan rasionalnya adalah dengan menghapuskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemilikan pribadi, mesin kekuasaan negara akan mengakhiri penyelewengan, kesalahan alokasi, dan ketidakmerataan yang diperkenalkan oleh presi gelap kekuatan pasar. Namun dalam praktiknya ini tidak terbukti.²⁴

Impian Marx tentang suatu masyarakat yang egaliter, persaudaraan tanpa gaji, tidak ada kelas-kelas sosial dan akhirnya tanpa negara nyata-nyata tidak terwujud. Tujuan-tujuan yang diimpikan itu tidak selaras dengan filosofi dan strategi yang mendasarinya. Ia mengetengahkan dialektika-kebencian, pertentangan, dan pelenyapan dan mengalihkan manajemen semua sarana produksi ke tangan sebagian kecil anggota masyarakat. Dengan adanya kekuasaan yang amat besar di tangan segelintir orang, tanpa kekuatan pendorong yang mengawasi kepentingan pribadi dan sekaligus memenuhi kepentingan sosial sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan, maka sistem tersebut hanya akan mempromosikan hak-hak istimewa dan sebuah perebutan kekuasaan untuk mengekalkannya. Setiap usaha untuk memperkenalkan institusi-institusi demokrasi ke dalam sistem ini boleh jadi akan gagal karena kandas oleh kepentingan birokrasi yang amat berkuasa, yang ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak istimewa sosio-politiknya. Untuk mewujudkan cita-citanya, Marxisme tidak mempunyai mekanisme selain pemaksaan untuk menghalangi kepentingan pribadi manusia, yang dianggap sebagai biang kerakusan dalam sistem kapitalis. Dengan demikian, sementara Marx memberikan

²⁴ *Ibid.*, h. 75.

suatu kritik tajam terhadap sistem kapitalis, namun ia gagal memberikan alternatif yang konstruktif.²⁵

Sebagaimana dalam kapitalis, Chapra juga mengemukakan asumsi-asumsi Marxis yang tidak realistis. Asumsi-asumsi ini tidak diungkapkan dengan jelas dalam literatur-literatur, tetapi secara implisit harus ada jika efisiensi dan keadilan ingin direalisasikan. Asumsi-asumsi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, semua komponen masyarakat akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan sosial tanpa memperhatikan kepentingan pribadinya; (a) para pekerja harus bekerja dengan efisien, jujur dan tidak mementingkan diri sendiri tanpa insentif dalam proporsi imbalan materi; (b) para manajer perusahaan harus bekerja dengan efisien tanpa dapat mempergunakan bagi kepentingan pribadi, tanpa mengalami tekanan persaingan dan tanpa memiliki kemampuan untuk mengambil keputusannya sendiri dan untuk membeli serta menjual input dan output yang mereka anggap baik; (c) para pegawai pemerintah tidak akan mengambil manfaat yang tidak semestinya dari pembuatan keputusan yang banyak dan kekuatan eksekutif mereka. Ini juga mengimplikasikan bahwa sebagai imbalan dari semua ini mereka -- dalam kapasitas sebagai konsumen—akan membatasi klaim mereka atas sumber daya hanya sebatas apa yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk menghindari tekanan berlebihan atas sumber daya. *Kedua*, kekuasaan negara akan dijalankan oleh sekelompok orang yang kepentingannya selaras dengan kepentingan seluruh masyarakat dan dalam diri mereka tidak ada alasan yang khusus untuk

²⁵ *Ibid.*, h. 90.

mengerjakannya. *Ketiga*, mesin perencanaan pusat akan melengkapi semua informasi mengenai preferensi konsumen, biaya produksi dan harga yang perlu untuk pengambilan berbagai keputusan. *Keempat*, subsidi umum yang besar yang diimplikasikan dalam sistem penentuan harga akan menguntungkan si miskin. Ini mengabaikan bahwa daya beli orang miskin terbatas. *Kelima*, pertanian-pertanian monopolistik yang besar dan perusahaan-perusahaan negara akan beroperasi dengan efisien meskipun terjadi skala produksi yang tidak ekonomis, kurangnya persaingan dan tidak adanya aturan-aturan pasar.²⁶

Kelemahan-kelemahan dalam penalaran yang inilah membuat Marxis tidak lebih baik daripada kapitalis. Ia runtuh di tempat yang seharusnya—menurut ramalan Marxis—berjaya. Dalam hal ini Lesmana mengemukakan kelemahan yang menyebabkan kegagalan Marxis. *Pertama*, karena asumsi-asumsi dasarnya yang keliru. *Kedua*, karena mengingkari, atau bertolak belakang dari kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh W.H. Werkmeister tentang diterimanya sebuah teori. *Pertama*, dalil-dalil yang mendukung teori tersebut harus konsisten antara satu dengan lainnya. Kalau tidak, apalagi saling bertentangan (*inkonsistensi*), maka teori yang dihasilkan pasti akan bersifat kontradiktif. *Kedua*, dalil tersebut haruslah jelas, spesifik, dan *self evident*. Dengan kata lain ia harus diterima sebagai suatu kebenaran atau memang begitu adanya (tidak bertentangan dengan kodrat-tambahan dari penulis).²⁷

²⁶ *Ibid.*, h. 77-83.

²⁷ Tjipta Lesmana, *Runtuhnya Kekuasaan Komunis*, Jakarta : Erwin Rika Press, 1992, h. 265.

Dengan demikian, baik kapitalis maupun sosialis Marxis, kedua-duanya sama-sama gagal dalam menangani masalah-malah pembangunan ekonomi. Perlu dicatat pendapat sosiolog Muslim terkenal dari Iran, Ali Syariati :

*Both of these social systems Capitalism and Communism, although they differ in configuration, regard man as an economic animal. They are reflecting these issues of which to provide more successfully the need of this animal.*²⁸

2. Euro Sentrisme

Masih menjadi tanda tanya besar, apakah strategi ekonomi yang ketat atau murni ekonomi akan dapat mengurangi atau menghapus sama sekali kemiskinan? Masalahnya bukan hanya menyangkut persoalan kemiskinan dan distribusi pendapatan yang sebagian besar bersumber pada masalah politik dan kelembagaan, melainkan juga karena faktor-faktor penentu distribusi pendapatan itu secara teoretis kurang dipahami negara-negara maju dan negara-negara berkembang, yang juga menganut teori-teori dari Barat yang sebenarnya kurang sesuai bagi mereka.²⁹

Sering dikatakan bahwa konsep pembangunan itu sendiri tidak netral atau tidak bebas nilai; konsep itu sarat nilai, dan definisi yang paling populer sangat kental dengan pandangan masyarakat Barat tentang nilai-nilai kehidupan sosial yang paling mendasar. Sadar atau tidak, makna konsepsi pembangunan ala Barat itu acapkali dipaksakan terhadap masyarakat-masyarakat non-Barat. Prioritas kepada pertumbuhan ekonomi dan berbagai unsur penunjangnya yang dikatakan sebagai inti

²⁸ Dikutip dari, Anwar Ibrahim, dalam Ainur R. Sophian, (Ed.), *op.cit.*, h. 68.

²⁹ Michael P Tadaro, *Ekonomi untuk Negara Berkembang*, edisi ketiga, terjemahan Agustinus Subekti, Jakarta : Bumi Aksara, 1995, h. 229.

pembangunan itu sebenarnya merupakan tradisi Barat yang kemudian ditransformasikan ke tingkat global. Atas dasar kenyataan ini, sementara pengamat berkesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada konsep pembangunan yang benar-benar baku atau universal. Lagi pula, pola pembangunan di suatu negara tidak mungkin sama atau dipaksakan agar sama dengan pola yang terdapat di negara-negara lain, sekecil apa pun perbedaan atau variasi itu pasti ada.³⁰ Menerapkan teori-teori pembangunan yang tidak sesuai dengan historis negara-negara berkembang hanya akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang merusak. Namun, kenyataan ini tidak berhasil menenangkan negara-negara berkembang yang dengan keyakinan baik dan buruk telah mendasarkan rancangan pembangunan ekonomi dan sosial pada asumsi-asumsi teori Barat. Banyak pengambil keputusan berdasarkan ideologi-ideologi yang seringkali sangat tidak sesuai dan dimodifikasi sekadar sesuai dengan kondisi historis dan kondisi kultural setempat.³¹ Akhirnya, pembangunan model Barat menjadi satu-satunya acuan bagi negara-negara berkembang.³²

Pendekatan yang etnosentris ini dipandang oleh Chapra sebagai pendekatan yang menanamkan rasa pesimisme dalam literatur pembangunan dengan mengaitkan kemiskinan, keterbelakangan, dan penaklukan politik atas negara miskin, yang

³⁰ Jan Erik Lane & Svante Ersson, *Ekonomi Politik Komparatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994, h. 54.

³¹ Kevin P. Clements, *op.cit.*, h. 8-10.

³² Teori evolusi tentang gerak dan arah pembangunan masyarakat yang mengimplikasikan kepada pandangan arah pembangunan negara-negara berkembang untuk mengikuti pembangunan yang pernah ditempuh oleh Barat adalah gejala etnosentris yang merupakan lebel ideologis untuk mengesahkan superioritas Barat. Lihat Suwarsono dan Alvin Y.SO, *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1991, h. 51.

kebanyakan terjadi pada bangsa-bangsa non-Eropa dan institusi yang sama yang ada di negara-negara Barat. Sebagaimana juga pandangan yang berlaku di kalangan para ahli dalam Bank Dunia yang meyakini bahwa satu-satunya jalan bagi negara miskin untuk meningkatkan formasi modal, produktivitas, dan konsumsi yang sebanding dengan negara-negara maju adalah dengan cara meniru institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di negara-negara maju tersebut. Ini merupakan kesimpulan dari Kindleberger dan Spengler setelah meneliti secara berurutan tiga dan sepuluh laporan Bank Dunia pada awal tahun 1950-an.³³ Ungkapan yang paling keras adalah pandangan Eugene Staley yang mengatakan bahwa pembangunan di negara miskin hanya akan berhasil apabila dilakukan di bawah citra Amerika Serikat.³⁴ Karena itu, kebudayaan Barat dan nilai-nilai materialnya mendominasi pandangan dan cita-cita pembangunan negara-negara berkembang.

Syarat-syarat pertumbuhan yang dirumuskan menurut perspektif Barat berimplikasi terhadap diterimanya secara luas lingkaran setan kemiskinan dalam literatur pembangunan. Suatu negara dikatakan miskin karena ia miskin. Tidak mungkin negara miskin akan mampu mengatasi lingkaran setan kemiskinan. Masalahnya adalah adanya dua kesenjangan tabungan investasi dan ekspor-impor,

³³ M. Umer Chapra, *op.cit.*, h. 149. Lihat CP. Kindleberger, "Review of the Economy of Turkey: The Economic Development of Guatemala, Report on Cuba", Review of Economic and Statistics, November 1952, h. 391-2; dan Joseph P. Spengler, "IBRD Mission, Growth Theory", American Economic Review, Mei 1954, h. 586-7.

³⁴ *Ibid.*, h. 150.

dan karenanya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.³⁵

Pesimisme ini juga diungkapkan oleh Meier bahwa di semua negara terbelakang, dicirikan secara khusus oleh keterbelakangan ekonomi berupa efisiensi tenaga kerja yang rendah, berbagai faktor yang tidak mobil, terbatasnya spesialisasi dalam jenis pekerjaan dan dalam perdagangan, kebodohan, serta struktur nilai dan sosial yang memperkecil kemungkinan perubahan ekonomi. Menurut Dr. Stephen Enke, negara-negara berkembngag mempunyai apa yang disebut "Struktur Ekonomi". Pada umumnya istilah ini berarti bahwa pandangan tradisional menghambat pendayagunaan secara penuh sumber daya manusia. Lebih khusus lagi, berarti bahwa orang sulit bekerja keras untuk mendapatkan konsumsi tambahan.³⁶ Sebagaimana pesimisme yang dikemukakan oleh Boeke dan Geertz dalam konsep dualisme yang menghasilkan analisis bahwa ekonomi petani Jawa terjebak pada tingkat keseimbangan rendah. Proses involusi yang terjadi bukan hanya karena metode produksinya yang tradisional, melainkan juga karena cara (norma) bagaimana hasil produksi dibagikan. Konsep Geertz tentang involusi pertanian dan pemerataan kemiskinan (*sharing poverty*) ini sejak tahun 1970-an sudah banyak ditentang oleh para ekonom.³⁷

³⁵ Lihat R. Nurkse, *Masalah Pembentukan Modal di Negara-Negara yang sedang Membangun*, terj. Hutagalung, cet. 2, Jakarta : Bhratara, 1964, h. 13-15.

³⁶ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Pemikiran*, terj. D. Guritno, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 6, 1996, h. 30.

³⁷ Didik Rachbini, *op.cit.*, h. 66.

Teori *The Stages of Economic Growth* yang dikembangkan oleh W. Rostow, yaitu masyarakat akan mengalami lima tingkat perkembangan juga secara inheren menurut Chapra mengimplikasikan sebuah "lingkaran setan". Faktor-faktor strategis pembangunan yang menjadi fokus kepentingan dalam teori-teori tersebut mengimplikasikan sebuah lingkaran sebab-akibat. Pelaksanaan faktor-faktor sosial dan institusional tertentu akan menghalangi negara-negara miskin untuk bergerak dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Hal ini cenderung menimbulkan dampak kumulatif yang lebih sering daripada dampak yang ditimbulkan oleh lingkaran setan dalam proses pembangunan tersebut.³⁸ Menurut Rostow untuk menuju pada tingkat yang paling tinggi, langkah pertama yang harus dimulai adalah dengan menghilangkan hambatan pada masyarakat tradisional, supaya masyarakat tersebut dapat memerdekakan diri dari nilai-nilai tradisinya, dan mulai bergerak maju.³⁹

Pandangan ini mengimplikasikan modernisasi, dalam hal ini industrialisasi sebagai keharusan untuk dilakukan oleh NSB. Karena inilah yang dulu juga dilalui oleh negara-negara maju, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam lima tahapan Rostow. Padahal, sejarah ekonomi ke dalam lima tahap pertumbuhan ini juga banyak dipertanyakan, sebagaimana yang telah dibahas dalam bab tiga. Dapatkah orang mengatakan dengan tepat bahwa suatu tahapan telah selesai dan tahap yang lain telah mulai? Mempertahankan pendapat bahwa setiap perekonomian mengikuti jalur perkembangan yang sama dengan masa silam yang sama dan masa depan yang sama adalah terlalu mensistematisasikan kekuatan-kekuatan pembangunan yang

³⁸ M. Umer Chapra, *op.cit.*, h. 50-51.

³⁹ Arief Budiman, *op.cit.*, h. 31.

sebenarnya bersifat kompleks dan terlalu menggeneralisasikan urutan tahap-tahap tersebut secara tidak beralasan.⁴⁰ Buktinya, ada negara-negara yang tidak mengikuti urutan-urutan ini, seperti Amerika dan Australia. Dan, jika ini diterapkan di NSB akan menemui kesulitan ketika menentukan suatu negara saat ini dalam tahap apa. Kondisi masyarakatnya yang tidak sama dalam pencapaian pembangunan ekonomi, sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep dualisme dan ekonomi dua sektor. Ketika di daerah perkotaan modern NSB telah mencapai tinggal landas bahkan lebih tinggi, sementara itu di daerah pedesaan sistem perekonomiannya masih dalam tahap tradisional.⁴¹

B. Kritik Kebijakan

1. Trickle Down Effect

Meskipun pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) berhasil dinaikkan, namun strategi pembangunan telah dikritik karena kegagalannya. Ini ditandai dengan pengangguran yang terus-menerus. Ketimpangan distribusi pendapatan di dalam maupun di antara bangsa-bangsa kemiskinan absolut dan sebagainya. Tema umum dari semua kritik ini adalah bahwa hasil-hasil pembangunan tidak bisa dinikmati oleh golongan miskin di dunia. Yang berarti terciptanya ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Pertumbuhan GNP yang diukur secara konvensional telah terbukti tidak memuaskan untuk dijadikan sebagai tujuan pokok dari strategi

⁴⁰M.L. Jhingan, *op.cit.*, h. 188.

⁴¹Mudrajad Kuncoro, *op.cit.*, h. 48.

pembangunan dan sebagai ukuran tunggal daripada keberhasilan atau kegagalannya.⁴²

Ketidakadilan distribusi pendapatan ini bermula dari pandangan yang mengatakan bahwa pendistribusian yang sangat tidak merata justru merupakan kondisi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang cepat. Setelah diakuinya pandangan ini oleh para penganjur pasar bebas, maka cenderung memalingkan perhatian orang secara individu ataupun kolektif untuk tidak lagi memusatkan perhatian pada masalah-masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan.⁴³ Pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosio ekonomi tidak dapat dipertemukan.

Sikap antikeadilan dalam wacana pembangunan ini telah dimunculkan pada tahun 1955 selama hampir satu setengah dekade oleh Sir Arthur Lewis yang menulis bahwa pokok persoalan pembangunan adalah pertumbuhan dan bukan distribusi. Prof. Harry Johnson menekankan bahwa tidak bijaksana bagi negara yang ingin menikmati pertumbuhan cepat untuk terlalu menekan pada kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menjamin persamaan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil. Bahkan konferensi para tokoh pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 1960-an, hampir-hampir tidak menyebutkan tujuan tentang

⁴² Frances Stewart dan Paul Streeten, *Strategi-strategi Baru Pembangunan, Kemiskinan Pembagian Pendapatan*, dalam Thee Kian Wie, (penyunting), *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*, Jakarta : LP3ES, h. 96.

⁴³ Michael P. Tadar, *op.cit.*, h. 231.

mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan, sebagaimana terbukti dari laporan rapat yang diterbitkan pada tahun 1966.⁴⁴

Dalam pemikiran tradisional, walaupun banyak varian pemikiran, pada dasarnya *key-word* dari pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi.⁴⁵ Hal itu diyakini karena pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang sangat penting untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu bangsa. seperti yang pernah dikatakan oleh Rostaw, tidak terlalu mengherankan jika pemikiran paradigma pembangunan saat itu didominasi oleh pemikiran tentang bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁴⁶ Tentang distribusi pendapatan tidak perlu dimasalahkan, cepat atau lambat adanya pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan apa yang disebut *trickle down effect* yang pada gilirannya akan menghasilkan pemerataan distribusi pendapatan. Makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercapai setiap tahun, tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang tinggi akan makin cepat terealisasi.⁴⁷ Asumsi ini didasarkan pada argumen dasar ekonomi bahwa penghasilan atau pendapatan perusahaan dan perseorangan yang tinggi

⁴⁴ M. Umer Chapra, *op.cit.*, h. 154.

⁴⁵ Arif Hartono, "Menelusuri Wacana Pembangunan : Mencari Format Pembangunan Khas Negara Berkembang", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 4, Nomor 1, 1999, h. 72.

⁴⁶ Saeful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, h. 20.

⁴⁷ BS. Muljana, "Beberapa Pengertian dan Masalah Mengenai Pembangunan Ekonomi", dalam *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, disunting oleh Hendra Asmara, Jakarta : Gramedia, 1987, h. 351.

merupakan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan tabungan yang pada gilirannya akan memungkinkan tumbuhnya investasi dan pertumbuhan ekonomi.⁴⁸

Pendapat mengenai pemerataan atas dasar *trickle down effect* tersebut mungkin sekali benar. Akan tetapi, ada kemungkinan pendapat tersebut hanya benar apabila negara yang bersangkutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : peranan ekspor dan impor relatif kecil, impornya terutama terdiri atas bahan mentah, dan ekspornya atas barang jadi, penduduknya yang berpendapatan tinggi mempunyai pola hidup yang lebih berorientasi kepada produksi daripada kepada konsumsi, dan kecenderungan untuk mengkonsumsi barang-barang impor relatif kecil.⁴⁹

Dalam hal ini, MP. Tadono juga menyerang kebijakan *trickle down effect* dengan menjelaskan alasan-alasan perlunya penerapan strategi kebijakan langsung dalam menangani kemiskinan atau kesenjangan distribusi pendapatan. *Pertama*, strategi pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, dalam kenyataannya tidak lain daripada suatu kebijakan ekonomi yang hanya akan menumbuhkan sikap oportunistis (*mumpung*) bagi golongan-golongan berkepentingan (*vested interests*) dan mengabadikan status quo kelompok elit ekonomi dan politik di negara-negara berkembang yang seringkali dicapai dengan mengorbankan kepentingan mayoritas penduduk. *Kedua*, pendapatan dan tarif kehidupan rendah penduduk miskin dapat mengakibatkan merosotnya produktivitas ekonomi mereka dan oleh karenanya menyebabkan secara langsung

⁴⁸ MP. Tadono, *op.cit.*, h. 232.

⁴⁹ BS. Muljana, *op.cit.*, h. 352.

atau tidak langsung pertumbuhan ekonomi yang lamban. Sebaliknya jika strategi yang digunakan berorientasi untuk meningkatkan pendapatan kalangan bawah secara langsung (tidak dengan melalui *trickle down effect* yang berorientasi kepada kalangan atas saja), maka akan menyumbang tidak hanya kepada kesejahteraan material tetapi juga produktivitas dan pendapatan ekonomi secara keseluruhan.

Ketiga, dengan menerapkan kebijakan yang berorientasi kepada penanganan kemiskinan (memihak ekonomi bawah) secara langsung—tidak bersandar kepada *trickle down effect*—akan menaikkan tingkat pendapatan penduduk miskin yang selanjutnya juga merangsang peningkatan secara menyeluruh permintaan akan produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri. Hal ini akan mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan jumlah investasi yang selanjutnya menciptakan laju pertumbuhan ekonomi.

Keempat, semakin adil dan merata distribusi pendapatan diperoleh melalui pengurangan kemiskinan masyarakat secara menyeluruh—tidak dapat dicapai dengan pendekatan *trickle down effect*—akan dapat merangsang semakin luasnya perekonomian yang sehat, yang pada gilirannya secara psikologis dan politis akan merangsang peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Sebaliknya, disparitas atau kesenjangan pendapatan yang lebar dan kemiskinan absolut yang merata dapat berfungsi sebagai penghambat munculnya rangsangan-rangsangan psikologis dan politis dalam memacu perkembangan ekonomi. Keadaan demikian itu bahkan dapat menciptakan kondisi yang mendorong sebagian masyarakat yang

frustasi dan yang secara politis mudah meledak, khususnya mereka yang terpelajar, untuk menolak berpartisipasi atau menentang usaha-usaha pembangunan.⁵⁰

Dari kenyataan ini, pada awal tahun 1970-an terjadi perubahan yang luar biasa berkenaan dengan persepsi pemerintah dan masyarakat mengenai tujuan utama kegiatan ekonomi. Di negara-negara maju ataupun berkembang tumbuh kekecewaan terhadap tekad untuk mengejar pertumbuhan sebagai tujuan pokok dan beralih kepada tujuan yang memperhatikan kualitas hidup (*quality of life*)⁵¹ pertumbuhan tidak lagi identik dengan pembangunan. Hipotesis *trickle down effect* yang melekat pada *growth economic paradigm* ternyata tidak terwujud. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, kesenjangan justru semakin lebar.⁵² Para pengusaha (kalangan ekonomi atas) yang telah mendapatkan kemudahan untuk mengakumulasi kapital dari jerih payah keringat orang lain, yaitu tenaga-tenaga kerja murah yang tidak terampil dan kurang pendidikan, diharapkan akan memberikan tetesan ke bawah ternyata tidak bisa diharapkan. Mereka cenderung mereinvestasikan modalnya dengan membeli peralatan canggih penunjang produksinya—untuk menambah akumulasi kapital—yang sifatnya menghemat tenaga kerja (*labor saving*). Ini tidak bisa menangani masalah pengangguran tenaga kerja.⁵³ Selain itu, mereka juga gemar membelanjakan penghasilannya untuk barang-barang mewah ke luar negeri,

⁵⁰ MP. Todaro, *op.cit.*, h. 233.

⁵¹ Lincoln Arsyad, *op.cit.*, h. 224.

⁵² Saeful Arif, *op.cit.*, h. 20.

⁵³ Lihat teori pertumbuhan Arthur Lewis tentang penawaran tenaga kerja.

menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk perhiasan-perhiasan atau rekening di bank-bank negara lain (*capital flight*). Investasi dan tabungan semacam ini tidak akan menambah sumber-sumber produktif domestik, malah menghabiskan sumber-sumber daya ekonomi bangsa. Sehingga, semakin para pengusaha kapitalis tersebut meningkatkan kapitalnya, semakin lebar kesenjangan dengan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan.

Berbagai kekecewaan inilah agaknya yang mendasari munculnya pemikiran-pemikiran baru dalam pembangunan yang tidak hanya menekankan kepada pertumbuhan saja seperti *redistribution with growth*, yaitu pertumbuhan yang diikuti dengan pemerataan. Kebutuhan pokok (*basic needs*), pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan alam (*ecodevelopment*), serta pembangunan memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut jenis etnis (*ethno development*).⁵⁴ Beberapa kritik tajam terhadap pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan pun telah banyak dilakukan oleh para ekonom, terutama kelompok struktural. Dudley Seers (1974) mengemukakan bahwa tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan perkapita, melainkan juga harus disertai dengan distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Chenery (1974) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi haruslah diiringi dengan pemerataan hasil-hasil pertumbuhan. Sen (1983) mendefinisikan perkembangan ekonomi bukan hanya pada meningkatnya

⁵⁴Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1997, h. 7-14.

pendapatan per kapita melainkan juga kapabilitas rakyat dengan meluasnya pemilikan harta atau sumber-sumber ekonomi di kalangan rakyat. Chakravarty (1987) memberikan definisi pembangunan dengan pertumbuhan GNP, distribusi pendapatan yang adil, meningkatnya kemampuan rakyat untuk berkreasi. Myrdal (1973) mencirikan pembangunan dengan terjadinya peningkatan kualitas keseluruhan sistem sosial yang mencakup ekonomi, politik, dan struktural sosial yang merefleksikan keadilan sosial dan partisipasi rakyat secara demokratis.⁵⁵

Menurut Chapra kecenderungan ekonomi pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan yang terjadi memang tidak mencerminkan perhatian kepada keadilan. Strategi penanganan tidak langsung melalui pertumbuhan GNP dengan mengandalkan pada penetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang otomatis kepada golongan-golongan miskin ini dinilai tidak efektif. Bahkan campur tangan dari pemerintah dalam sistem tersebut mempunyai kecenderungan yang fatal yang lebih menguntungkan golongan atas.⁵⁶ Bukan saja tidak terjadi penetesan otomatis dari hasil-hasil pembangunan ke bawah, melainkan sebaliknya mengakibatkan penetesan ke atas (*trickle up effect*) yang menguntungkan golongan menengah ke atas.⁵⁷ Hal ini karena pengaturan institusional di kebanyakan negara berkembang cenderung menguntungkan golongan atas, sehingga tidak bisa dihindari bahwa

⁵⁵ Sritua Arief, *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta: CIDESINDO, 1998, h. 54-55.

⁵⁶ M. Umer Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi", dalam Ainur R. Sophiaan (Ed.), *Etika Ekonomi Politik*, Surabaya : Risalah Gusti, 1997, h. 45.

⁵⁷ Irma Adelman, "Ekonomi Pembangunan, Suatu Penilaian Kembali tentang Tujuan-tujuan" dalam Thee Kian Wie, *op.cit.*, h. 176.

golongan atas akan memperoleh beberapa keuntungan dari kebijakan-kebijakan investasi dan konsumsi yang sebenarnya khusus disusun untuk menolong golongan miskin saja. Bahkan dalam hal tertentu jelas seperti subsidi pangan untuk keluarga-keluarga yang paling miskin juga tidak lepas terkena korupsi dan inefisiensi.⁵⁸

Hal ini tepat sekali dengan apa yang dinyatakan oleh Paul Baran (1952), bahwa yang menyebabkan realisasi program pembangunan menjadi bagaikan ilusi adalah struktur politis dan sosial pemerintah yang berkuasa. Masuknya kapitalisme ke dalam masyarakat feodal terbelakang tidaklah menghasilkan pembangunan kapitalis. Yang dihasilkan adalah campuran ekonomi dan politik yang mengkombinasikan segi-segi terburuk dari kedua dunia—feodalisme dan kapitalisme—dan menghalangi secara efektif semua kemungkinan pertumbuhan ekonomi.⁵⁹ Pembangunan seperti ini menurut Mochtar Mas'oeed akan menciptakan kemiskinan buatan (*artificial*) yang sering juga disebut dengan kemiskinan struktural.⁶⁰

Menurut Chapra, sangat tidak realistis untuk berharap dapat menyelesaikan masalah pertumbuhan dan keadilan ini tanpa mengadakan perubahan struktural yang besar dan menciptakan nilai-nilai dan sistem motivasi yang kondusif. Kalau tidak,

⁵⁸ Franklyn Lisk, "Strategi Pembangunan Konvensional dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar", dalam Thee Kian Wie, *op.cit.*, h. 240.

⁵⁹ Arndt, *Pembangunan Ekonomi, Studi tentang Sejarah Pemikiran*, terj. Fahzemil, Jakarta: LP3ES, 1991, h. 138.

⁶⁰ Mochtar Mas'oeed, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, h. 138. Lihat juga, Revisond Baswir, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IDEA, 1997, *Pembangunan tanpa Perasaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, IDEA dan ELSAM, 1999.

maka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang sangat melekat ini sulit dipecahkan,⁶¹ yang akibatnya sangat buruk bagi kondisi sosio- ekonomi yang ada.⁶²

2. Trade-Off

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika upaya pengentasan kemiskinan selalu mengandalkan kekuatan-kekuatan alamiah dalam pertumbuhan ekonomi maka hasilnya tidak akan memuaskan. Namun sayangnya kenyataan ini sering diabaikan. Sebagian besar teori yang ada tampaknya memang mengisyaratkan bahwa distribusi pendapatan yang sangat tidak merata merupakan sesuatu yang terpaksa dikorbankan demi memacu laju pertumbuhan ekonomi. Selama dasawarsa 1960- an dan awal dekade 1970-an, serta pada tahun 1980-an (dalam jangkauan yang lebih terbatas ini ditandai dengan munculnya aliran kotrarevolusi neoklasik), menunjukkan bahwa mereka para pendukung pertumbuhan cepat tidak begitu memperhatikan atau menganggap penting masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kekaguman akan pertumbuhan ekonomi sudah menjurus ke pemujaan sehingga apa saja bisa mereka anggap “sekadar biaya” demi tercapainya laju ekonomi secara pesat. Lebih jauh mereka tidak saja menganggap ketidakadilan pendapatan sebagai syarat yang pantas dikorbankan dalam rangka menggapai proses pertumbuhan ekonomi secara maksimum, bahkan mereka juga menilai bahwa

⁶¹ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 156.

⁶² Pembangunan yang mengabaikan pemerataan hanya akan menimbulkan patologi sosial dan banyak liabilities dalam bentuk pengorbanan-pengorbanan secara sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya. Lihat Sri Bintang Pamungkas, *Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*, Jakarta : Yayasan Daulat Rakyat, Edisi Kedua, 1996, h. 292.

perhatian yang langsung ditujukan kepada pengentasan kemiskinan justru dianggap sebagai pendekatan gegabah.⁶³

Nada antikeadilan dalam literatur pembangunan telah dimunculkan pada tahun 1955 selama hampir satu setengah dekade oleh Sir Arthur Lewis yang menulis :”yang pertama kali perlu dicatat ialah bahwa pokok persoalan kita adalah pertumbuhan dan bukan distribusi”. Pada tahun 1957, Bauer dan Yamey mengungkapkan bahwa “redistribusi pendapatan untuk membantu rakyat miskin mungkin tidak dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi dalam pengertian *output* yang lebih besar untuk setiap orang”. Harry Johnson (1962) menekankan bahwa “tidak bijaksana bagi negara yang ingin menikmati pertumbuhan cepat untuk terlalu menekan pada kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menjamin persamaan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil”.

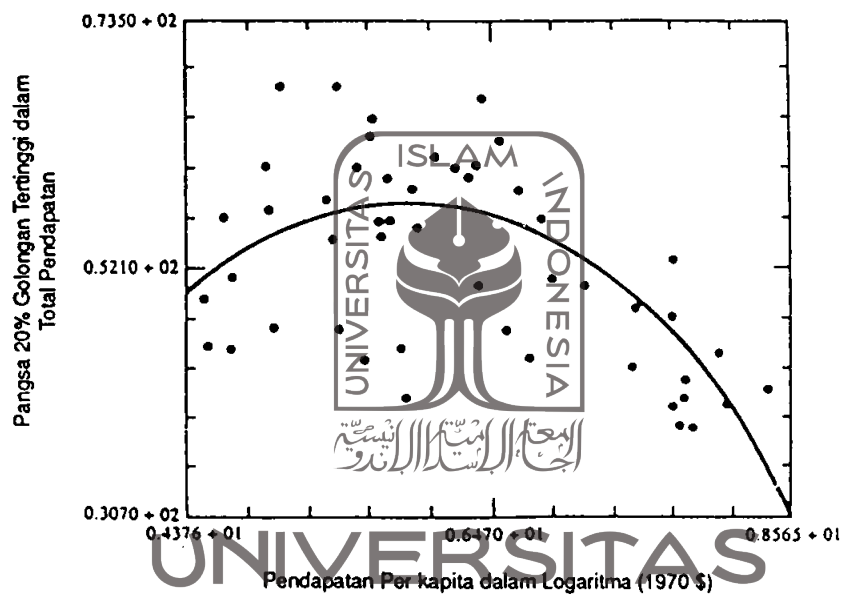
Argumen yang sering dilontarkan dalam rangka menciptakan kesan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi sementara yang “tidak terelakkan” adalah bahwa akumulasi pendapatan perseorangan dan perusahaan setinggi-tingginya memang harus diciptakan demi membentuk formasi modal yang kuat guna merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Masalah pemerataan, nanti akan terjadi pertukaran (*trade off*) dengan sendirinya antara pertumbuhan dan pemerataan. Dukungan empiris untuk pandangan-pandangan tersebut terlihat dalam kurva U-terbalik (*inverted U curve*) yang diasosiasikan dengan nama Kuznets. Simon

⁶³M.P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Buku I, h. 194.

⁶⁴M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. 154.

Kuznets (1955) membuat hipotesis bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.⁶⁵ Lihat gambar di bawah ini;

Gambar 0.1. *KURVA KUZNETS*



Sumber: Meier (1995), Dikutip dari Mudrajad Kuncoro (*Ekonomi Pembangunan*, 1987, h. 106)

Terlepas dari apa pun penjelasan teoretis atas kurva Kuznets, keabsahan empiris atas fenomena tersebut masih patut dipertanyakan. Meskipun data-data jangka panjang atau pengalaman negara-negara Barat tampaknya mendukung proporsi tersebut, berbagai kajian yang dilakukan atas NSB ternyata menunjukkan hasil yang bertentangan. Hipotesis U terbalik versi Kuznets menyatakan adanya *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Namun, kenyataannya bukti empiris berkata lain. Cukup banyak studi kasus terhadap suatu negara yang spesifik seperti

⁶⁵Mudrajad Kuncoro, *op.cit.*, h. 105.

Taiwan, Korea Selatan, Cina, Kosta Rika, Sri Lanka, Hongkong dan beberapa negara lainnya yang membuktikan bahwa peningkatan pendapatan justru sering disertai dengan terus melebarnya kesenjangan pendapatan. Dan, ternyata yang mengagungkan kebenaran konsep Kuznetz terutama adalah para pemimpin negara-negara yang distribusi pendapatan nasionalnya terus melebar. Dengan demikian, mereka sebenarnya lebih sering memanfaatkan konsep tersebut secara politis sebagai kedok atas kegagalan mereka dalam upayanya memperbaiki tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunan atau kurang memadainya kebijakan-kebijakan yang mereka jalankan dalam meningkatkan pemerataan.⁶⁶ Sejak zaman Adam Smith, sejarawan ekonomi telah menekankan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan dan ketidakmerataan yang menjadi pusat model tenaga kerja surplus klasik (*classical labour-surplus model*), yang dianggap benar secara apriori untuk seluruh negara-negara berkembang. Akan tetapi, bukti tidak mendukung hubungan negatif tersebut.⁶⁷

Bahkan suatu kebijakan inflasi telah didukung karena hal itu dianggap meringankan beban pembayaran kembali pemerintah dan juga “memaksa” rakyat untuk menabung. Diasumsikan bahwa inflasi mampu mewujudkan suatu redistribusi untuk membantu individu dan kelompok-kelompok yang mungkin dapat menyimpan sebagian besar dari pendapatannya yang diterima. Lewis menyatakan bahwa naiknya harga yang disebabkan oleh inflasi lunak akan meningkatkan keuntungan kelompok

⁶⁶M.P. Todaro, *op.cit.*, h. 190.

⁶⁷M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj.Ikhwan Abidin Basri, Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia institute, 2000, h. 36.

industri dan perdagangan. Dengan demikian, akan meningkatkan simpanan yang telah diinvestasikan. Hal ini menurut Chapra tidak benar, karena didasarkan pada asumsi yang salah bahwa setiap uang yang dibayarkan digunakan untuk konsumsi dan setiap uang yang tidak dibayarkan kepada tenaga kerja adalah disimpan dan diinvestasikan secara produktif.⁶⁸

Chapra juga mempertanyakan Konsep Kapitalis tentang *trade-off* antara pengangguran dan inflasi. Inflasi dianggap tidak adil dan menentang kepentingan jangka panjang kesejahteraan manusia, sedangkan pengangguran sumber daya manusia juga tidak adil yang tidak hanya bertentangan dengan harga diri manusia sebagai khalifah tetapi juga meremehkan upaya merealisasikan distribusi pendapatan yang adil.⁶⁹ Orang mungkin juga bertanya apakah inflasi diperlukan untuk mencapai *full employment* atau sebaliknya *unemployment* diperlukan untuk menghindari inflasi. Kenyataan yang terjadi adalah hampir semua negara industri dan banyak negara berkembang melihat adanya fenomena yang menjurus pada kenyataan bahwa *trade off* inflasi dan pengangguran telah berhenti. Tingkat pengangguran dan inflasi yang tinggi menimbulkan keraguan besar terhadap Kurva Philips. Munculnya stagflasi dan analisis terhadap Kurva Philips membuat setiap orang dapat mengakui bahwa adanya Kurva Philips dalam jangka pendek menyesatkan dan menjadi masalah adanya *trade off* dalam jangka panjang. Abraham Lincoln mengatakan :

⁶⁸ M. Umer Chapra, *op.cit.*, h. 155.

⁶⁹ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. M. Sonhadji dan Murwanto, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 12.

*Kau dapat mengibuli beberapa orang dalam suatu waktu, tetapi kau tidak dapat membodohi mereka sepanjang waktu.*⁷⁰

Kurva Philips ini bermula dari penelitian empiris yang dilakukan oleh A.W. Philips mengenai hubungan antara perubahan tingkat pengangguran dan perubahan tingkat upah. Philips menemukan bahwa pada periode tertentu tingkat pengangguran rendah, saat itu pula terdapat perubahan yang drastis atas tingkat upah. Penelitian Philips tersebut kemudian diperluas dengan melihat hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, yaitu disimpulkan adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Artinya apabila pemerintah ingin menetapkan tingkat pengangguran yang rendah, maka ini hanya akan dapat dicapai dengan tingkat inflasi yang tinggi, dan begitu sebaliknya.

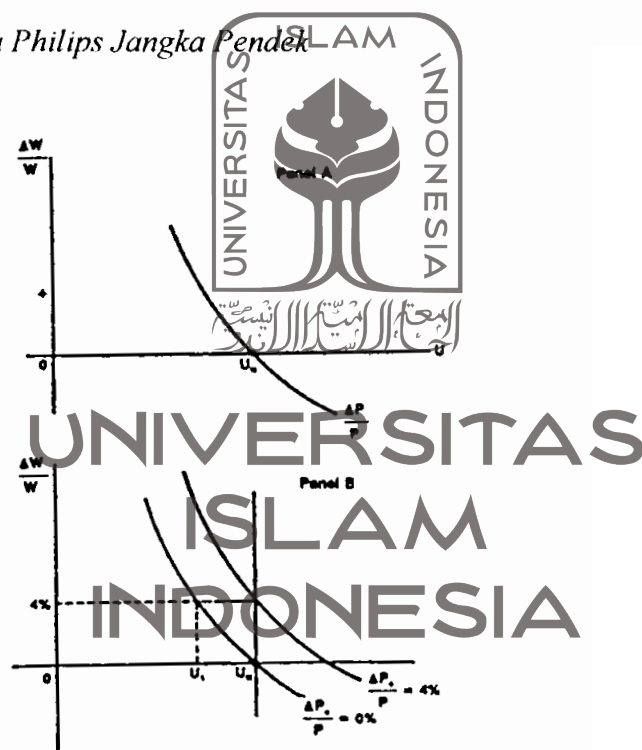
Kelemahan Analisis Philips adalah karena Philips menganggap yang terjadi adalah hubungan antara pengangguran dan upah nominal, sedangkan dalam teori ekonomi senantiasa dikatakan bahwa tenaga kerja mempertimbangkan upah riil dan bukan upah nominal. Dalam hal ini ada konsistensi antara upah nominal dan tingkat harga. Artinya, upah nominal dan harga tidak mengalami perubahan (tetap) atau berubah dalam tingkat yang sama. Kenyataannya, penyesuaian atas tingkat harga barang dan jasa lebih cepat apabila ada ekspansi moneter dibandingkan dengan penyesuaian atas upah buruh yang disebabkan olehnya upah buruh ditetapkan

⁷⁰ Lihat Iswardono SP, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 1991, h. 259.

⁷¹ Guritno Mangkoesobroto dan Algifari, *Teori Ekonomi makro*, Yogyakarta : STIE YKPN, 1998, h. 170-71.

berdasarkan kontrak kerja yang berlaku beberapa waktu. Oleh karena itu harga mengalami kenaikan lebih cepat daripada upah buruh, sehingga terjadi penurunan upah riil dalam jangka pendek. Penurunan upah riil terjadi karena tenaga kerja tidak tepat mengantisipasi adanya kenaikan harga. Karena itu, kurva Philips dapat diinterpretasikan sebagai hubungan antara tingkat perubahan upah nominal dan tingkat pengangguran untuk suatu pengharapan mengenai keadaan inflasi pada masa yang akan datang. Hal ini dapat ditunjukkan pada Gambar 0-2 berikut.

Gambar 0.2. Kurva Philips Jangka Pendek



Sumber: Guritno (*Teori Ekonomi Makro*, 1998, h. 174)

Kurva Philips digambarkan untuk perubahan tertentu ($\Delta P_e / P$), yakni P_e menunjukkan perubahan harga yang diharapkan, sedangkan P menunjukkan tingkat harga yang aktual (yang sebenarnya terjadi).

$\Delta P/P = 0\%$, sehingga tingkat pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*) terjadi pada (U_N). Apabila tingkat perubahan upah ($\Delta W/W$) mengalami penurunan, maka buruh akan mengira terjadi penurunan upah riil. Ini mengakibatkan pengangguran mengalami kenaikan. Hubungan negatif yang ditunjukkan oleh kurva Philips pada Gambar 0-2 tersebut tidak mungkin berlangsung dalam jangka waktu yang lama, karena buruh akan menyadari bahwa upah riil yang diharapkan tidak pernah tercapai, sehingga mereka akan kembali pada tingkat pengangguran alamiah (U_N). Apabila terjadi ekspansi moneter yang menyebabkan terjadi harga sebesar 4%, mula-mula pengangguran akan turun dari U_N menjadi U_1 . Tingkat pengangguran sebesar U_1 tidak stabil karena masyarakat kemudian menyesuaikan pengharapan mengenai tingkat harga sebesar 4%, dan ini ditunjukkan dengan pergeseran kurva Philips ke kanan. Pada kurva Philips yang baru yaitu $\Delta P/P = 4\%$, maka tingkat kenaikan upah riil sebesar 4% menunjukkan tingkat pengangguran yang sama dengan sebelum terjadi ekspansi moneter, yaitu pada U_N . Jadi, dalam jangka panjang, ekspansi moneter yang menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat harga dan tingkat upah riil tidak akan mengurangi pengangguran, dan pengangguran tetap terjadi pada tingkat pengangguran alamiah (U_N).⁷² Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh James W. Dean, bahwa usaha-usaha untuk mengurangi pengangguran di bawah tingkat yang alamiah adalah didasarkan pada penipuan karena keberhasilan mereka adalah terletak pada kesalahan

⁷²*Ibid.*, h. 174-175.

pengertian kaum buruh terhadap upah nyata sebenarnya.⁷³

Menanggapi hal ini, sesuai dengan orientasi alternatif yang ditawarkan, yaitu untuk kepentingan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi, menurut Chapra ada satu nilai yang perlu dibuat, yaitu yang berkaitan dengan tuntutan mana yang perlu dipertahankan atau diturunkan dan bagaimana hal ini dapat dicapai. Dalam sistem yang berorientasi pada nilai tidak dapat dibenarkan pengembangan kebijaksanaan yang menjurus pada hal-hal yang kurang penting demi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mengurangi pengangguran sumber daya manusia tidak harus dengan menciptakan inflasi. Demikian juga sebaliknya, harus dihindari memilih kebijakan yang menciptakan atau melanggengkan pengangguran. Bagaimanapun *full employment* harus dapat diyakinkan meskipun harus melakukan restrukturisasi produksi dan perancangan teknologi yang tepat. Adalah penting untuk melakukan kombinasi yang tepat antara kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter, fiskal, dan pendapatan guna menghindari inflasi dan pengangguran sekaligus memantapkan kesejahteraan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar semua individu sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁴

3. Kontroversi Kebijakan

Ekonomi pembangunan dalam perjalanannya telah diwarnai oleh berbagai macam pertentangan kebijakan yang karena tidak adanya komitmen kepada suatu mekanisme filter nilai-nilai khususnya kepada keadilan sosio ekonomi,

⁷³James W. Dean, "Runtuhnya Kesepakatan Keynesian", dalam Daniel Bell dan Irving Kristol. Ed., *op.cit.*, h. 36.

⁷⁴M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, *op.cit.*, h. 13-14.

menjadikannya sulit untuk menyelesaikan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak produktif. Hal ini tampak pada tidak adanya hubungan positif dengan tujuan-tujuan pembangunan karena kebijakan yang menafikan perbedaan-perbedaan kondisi sosio ekonomi negara-negara berkembang.⁷⁵ Akibatnya terjadi ketidakseimbangan, tingkat pertumbuhan yang lambat, inflasi, beban hutang, dan beban-beban sosial (*social cost*) lainnya berupa patologi sosial yang cukup tinggi.⁷⁶ Kontroversi-kontroversi tersebut terjadi pada : pertanian lawan industrialisasi, pembangunan desa lawan pembangunan kota, pertumbuhan yang seimbang lawan pertumbuhan yang tidak seimbang, substitusi impor lawan promosi ekspor, dan kekuatan pasar lawan perencanaan. Kontroversi-kontroversi ini tidak akan terjadi. Jika mekanisme filter mengenai nilai-nilai yang disepakati telah ada dan keadilan sosio ekonomi telah jelas menjadi target kebijakan. Dalam hal ini Chapra menyoroiti kebijakan pertanian lawan industrialisasi dan substitusi impor lawan promosi ekspor.

Untuk menjelaskan kontroversi di atas akan diuraikan beberapa teori atau konsep pembangunan yang menyoroiti prototipe perekonomian NSB. Dalam hal ini akan dikemukakan konsep dualisme dan teori keseimbangan (*equilibrium theory*).

Dualisme merupakan konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama untuk menjelaskan kondisi sosio-ekonomi NSB. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Perbedaan

⁷⁵ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 157.

⁷⁶ Lihat Saeful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, *op.cit.*, h. 21.

ini sering dikaitkan dengan adanya unsur-unsur “superior” dan “inferior” sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di bab tiga.

Dualisme ini dapat dibedakan dalam beberapa macam yaitu dualisme sosial, dualisme teknologi, dualisme finansial, dan dualisme regional. *Dualisme sosial* adalah hasil penelitian seorang ekonom Belanda J.H Boeke (1910) tentang sebab-sebab kegagalan kebijaksanaan ekonomi kolonial Belanda (1870) di Indonesia terutama di Jawa. Ia menunjukkan perbedaan tujuan kegiatan ekonomi di Barat yang berorientasi kepada kebutuhan ekonomi dengan di Timur (Jawa, Indonesia) yang berorientasi kepada kebutuhan sosial. Dengan demikian teori-teori pembangunan Barat tidak dapat diterapkan langsung dalam memahami permasalahan ekonomi negara-negara jajahan (tropis) tanpa suatu “modifikasi” teori.

Clifford Geertz (1963) dengan *dualisme ekologis*-nya mengatakan bahwa di Indonesia ada dua sistem ekologis, yaitu “Indonesia dalam” (Jawa) yang berciri pertanian padat karya, seperti padi dan tebu, dan “Indonesia luar” yang berciri pertanian padat tanah dan modal, seperti karet dan kelapa sawit. Benjamin Higgins (1956), menjelaskan adanya dua sektor ekonomi, yaitu yang menggunakan teknik produksi modern dan yang tradisional. Ini disebut dengan *dualisme teknologi*. Dan, *dualisme finansial* oleh Hla Myint (1967) dijelaskan adanya dua pasar uang di NSB, yaitu pasar uang yang terorganisir berupa bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan nonbank, dengan pasar uang yang tak terorganisasi seperti para rentenir dan petani-petani kaya. Terakhir, *dualisme regional*, pada tahun 1960-an

menjelaskan ketidakseimbangan pembangunan di berbagai daerah di negara-negara berkembang, yaitu daerah-daerah pusat perkotaan dan pedesaan.⁷⁷

Berbagai macam dualisme ini mempengaruhi jalannya pembangunan di NSB yang masih menjalankan kegiatan ekonominya dengan cara-cara tradisional. Dualisme sosial dan teknologi menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketidaktepatan mekanisme pasar ini selanjutnya mengakibatkan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia tidak dapat digunakan secara efisien. Penggunaan teknologi yang terlalu tinggi di sektor modern mempersulit proses perkembangan kesempatan kerja di sektor modern. Hal ini akan menambah kerumitan masalah pengangguran yang dihadapi dan akan memperbesar jurang pendapatan antara sektor-sektor ekonomi yang lebih modern dengan sektor-sektor yang tradisional.⁷⁸

Teori keseimbangan atau teori pertumbuhan berimbang dapat diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara bersamaan (*simultaneous*), sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu juga bisa diartikan sebagai pembangunan berimbangan antarsektor, misalnya, sektor pertanian dan sektor industri, sektor luar negeri dan domestik. Singkatnya, strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Paul Rosenstein-Rodan (1953) dengan nama *the big*

⁷⁷Lincoln Arsyad, *op.cit.*, h. 252-57.

⁷⁸*Ibid.*, h. 258.

push theory, yang menulis gagasan untuk menciptakan program pembangunan di Eropa Timur dan Tenggara dengan melakukan industrialisasi besar-besaran. Menurut Rodan, pembangunan industri secara besar-besaran akan menciptakan tiga macam eksternalitas ekonomi yaitu : (a) yang diakibatkan oleh perluasan pasar, (b) karena industri yang sama letaknya berdekatan, dan (c) karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut.⁷⁹

Adapun tokoh lain yang sering juga dikaitkan dengan teori ini adalah, Nurkse(1953) yang terkenal dengan konsep lingkaran setan kemiskinannya (*the vicious circle of poverty*),⁸⁰ Tibor Scitovsky dan Arthur Lewis (Hirschman mengelompokkannya sebagai pencipta strategi pembangunan keseimbangan pada sisi *penawaran* sedangkan Rodan pada sisi *permintaan*), yang terkenal dengan teori penawaran buruh yang tidak terbatas atau *ekonomi dua sektor*. Arthur Lewis berpendapat bahwa jika pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian, maka akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Masalah kekurangan barang pertanian akan terjadi dan akan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang tersebut. Keadaan ini akan mendorong terjadinya inflasi. Masalah lainnya adalah kesulitan untuk menjual barang-barang industri dengan menguntungkan. Kenaikan

⁷⁹ *Ibid.*, h. 89-91.

⁸⁰ Ungkapan Nurkse yang terkenal adalah *a poor country is poor because it is poor* (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Menurut analisisnya bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan, rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Mudrajat Kuncoro, *op.cit.*, h. 107.

harga barang pertanian akan mendorong kenaikan upah di sektor industri, sedangkan harga barang industri tidak dapat dinaikkan untuk menjaga pasar yang telah ada. Atau, jika pendapatan petani dipertahankan supaya tetap rendah, maka mereka tidak akan mampu membeli barang-barang industri dan oleh karenanya pasar dari produk industri akan tetap terbatas, kecuali jika pasar luar negeri bisa dikembangkan atau pemerintah yang membeli barang-barang tersebut. Akan tetapi, kedua langkah yang terakhir tersebut juga mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menciptakan pasar bagi industri. Lewis menyimpulkan untuk dilakukannya secara berbarengan pembangunan di kedua sektor tersebut.⁸¹

Sebagaimana lainnya, teori ini juga banyak dikritik oleh para ekonom, di antaranya adalah Singer dan Hirschman. Mereka menyatakan bahwa program ini sulit dilaksanakan karena negara berkembang biasanya mempunyai sumber daya yang terbatas. Fleming mengemukakan bahwa pembangunan seimbang itu selain menciptakan efisiensi dan keuntungan yang lebih tinggi kepada masing-masing industri juga bisa menimbulkan eksternalitas disekonomis seperti menghancurkan cara-cara bekerja masyarakat, dan *big push theory* – nya Rodan yang memberikan dorongan kuat kepada program industrialisasi secara tiba-tiba juga sulit dilakukan di NSB.⁸² Berdasarkan hal itu, Jhingan juga menyimpulkan (seperti kesimpulan Singer) bahwa doktrin pertumbuhan berimbang adalah terlalu awal, kalau bukan salah,

⁸¹ Lincoln Arsyad, *op.cit.*, h. 95-96.

⁸² ML. Jhingan, *op.cit.*, h. 236-237.

dalam arti bahwa doktrin tersebut lebih cocok untuk diterapkan pada tahap sesudah pertumbuhan berdikari daripada untuk memecahkan jalan buntu.⁸³

Lepas dari kritikan-kritikan yang dilakukan oleh Singer, Hirschman, dan Fleming, Chapra memandang bahwa pembangunan pertanian dan industri bukan merupakan alternatif pilihan. Keduanya saling melengkapi dan mendukung berkaitan dengan *input* dan *output*. Ini juga yang diungkapkan oleh Nigel Hesetline (1961) bahwa suatu kesalahan adalah menganggap industrialisasi sebagai suatu usaha industri yang besar dan bukannya sebagai proses pengaruh mempengaruhi antara banyak industri, penduduk konsumen yang sudah berkembang, produsen industri masing-masing dan produsen pertanian.⁸⁴

Yang menjadi masalah menurut Chapra bukannya pembangunan industri atau pertanian, tetapi manusia dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka. Jika kesejahteraan manusia adalah tujuan yang hendak dicapai, maka hubungan timbal-balik dan saling membantu antara industri dan pertanian ini untuk merealisasikan tujuan sosio-ekonomi yang disepakati adalah patut dihargai. Dalam hal ini program pembangunan apa pun yang mendukung pertumbuhan yang tidak seimbang dan penekanan industrialisasi yang melebihi pertanian atau penekanan melebihi industri, maka akan mengarah kepada ketidakadilan dan kemiskinan di samping menciptakan kemacetan yang sangat sulit untuk ditangani tanpa adanya

⁸³ *Ibid.*, h. 241.

⁸⁴ Beling dan Totten, *Modernisasi, Masalah Modal Pembangunan*, terj. Mien Jobhaar dan Hasan Basari, Jakarta : Rajawali dan YIIS, 1985, h. 235.

kebijakan yang berlawanan untuk mengembalikan keseimbangan,⁸⁵ untuk itu tidak sedikit biaya sosial (*social cost*) yang harus dikorbankan.

Untuk itu, Todaro juga merekomendasikan adanya perubahan kebijakan pemerintah kepada keseimbangan pembangunan antara kota dan desa, yang selama ini lebih menekankan pembangunan yang berorientasi pada kota dan industri saja.⁸⁶

Sebagaimana juga yang disyaratkan oleh Muljana terhadap negara-negara yang ingin mencapai tinggal landas.⁸⁷

Bagaimanapun peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di NSB sangat penting, karena sebagian besar anggota masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika pemerintah bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian itu. Cara ini bisa ditempuh dengan meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan atau menaikkan harga atas produk-produk yang dihasilkan. Tentu saja kebijakan ini tidak boleh hanya menguntungkan petani-petani kaya saja. Oleh karena itu perlu diatur sehingga petani-petani kecil juga merasakannya.⁸⁸

Sebagaimana pembangunan industri dan pertanian, Chapra memandang sama pentingnya antara strategi substitusi impor dan promosi ekspor. Dalam pelaksanaannya, kedua strategi ini harus mempertimbangkan efisiensi dan keadilan

⁸⁵ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 158.

⁸⁶ Michael P. Todaro, *op.cit.*, h. 337.

⁸⁷ Muljana, *op.cit.*, h. 368.

⁸⁸ Lincoln Arsyad, *op.cit.*, h. 327.

terhadap pemakaian sumber-sumber yang langka. Realisasi keadilan sosial-ekonomi dan peningkatan pembangunan ekonomi harus menjadi tujuan kebijakan. Oleh karena itu, harus diupayakan untuk mendorong terutama pertanian dan perusahaan-perusahaan kecil dan mikro (*Small and Micro Enterprises, SMEs*). Hal ini akan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan membuka kesempatan di desa dan kota kecil.⁸⁹ Sehingga tidak terjadi kekosongan di desa yang akan menyebabkan ketidakseimbangan.⁹⁰

Jika demikian, bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa dan pengusaha kota tidak hanya mencakup bea proteksi⁹¹ tetapi juga membangun infrastruktur fisik, sosial, dan keuangan yang efisien di samping impor atau pembangunan domestik dari teknologi yang sederhana tetapi efisien untuk SMEs. Ini akan membuat mereka mampu meningkatkan produksi dan akhirnya mampu bersaing dengan barang-barang asing. Pekerjaan dan pendapatan akan naik di daerah pedesaan dengan berkurangnya penyumbatan di pusat kota. Pendapatan yang meningkat di daerah pedesaan juga akan membantu pertanian dengan menjadikan para petani mampu memanfaatkan input pertanian yang lebih baik. Pada awalnya produksi dimaksudkan untuk bisa memenuhi permintaan pasar domestik.

⁸⁹ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 159.

⁹⁰ Lihat teori Lewis tentang perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota.

⁹¹ Salah satu mekanisme pokok dalam strategi substitusi impor adalah pemberlakuan tarif proteksi (berupa pajak atau bea masuk untuk setiap produk impor) atau kuota (pembatasan jumlah atau volume produk untuk setiap kurun waktu tertentu). Hal ini perlu untuk memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan lokal guna mempelajari seluk beluk produk tersebut. Dengan waktu dan proteksi yang memadai, maka sektor-sektor industri lokal tersebut pada akhirnya akan berkembang sehingga mampu bersaing dengan produk-produk luar. Pada puncaknya tidak hanya mampu memproduksi untuk pasar domestik tapi juga untuk ekspor ke negara-negara lain di seluruh dunia.

Selanjutnya ketika produksi meningkat dan ekonomi eksternal telah terwujud, keuntungan ekspor juga akan diperoleh.⁹² Dalam hal ini Emil Salim mencirikan industrialisasi dengan dimulai dari industri substitusi yang menggantikan barang impor dengan produksi dalam negeri. Tersedianya pasar dalam negeri kemudian ditutup untuk barang impor dengan pintu tarif, mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Lambat laun industri dalam negeri semakin kuat untuk masuk pasaran luar negeri melalui industri ekspor.⁹³ Arah industrialisasi tahap awal ini tidak mengimplikasikan pada tahap pembangunan berikutnya. Ketika kebutuhan telah terpenuhi dan masalah pengangguran telah terselesaikan, maka substitusi impor dan promosi ekspor untuk barang-barang modal berat dan tahan lama tidak bisa menjadi sasaran kebijakan nasional.⁹⁴



Bagaimanapun juga yang terpenting bukan pada kebijakan semata, melainkan pelaksanaannya harus dapat menjamin kepentingan orang bawah, bukan hanya orang kaya. Di samping juga perlu ada antisipasi-antisipasi akan terjadinya distorsi di kalangan pemerintah dan pengusaha.⁹⁵ Jika substitusi impor tidak mengambil arah yang benar, promosi ekspor juga tidak akan terwujud. Kalau

Lihat Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi keenam, jilid 2, terjemahan Haris Munandar, Jakarta : Erlangga, 1998, h. 62-63.

⁹² M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 161.

⁹³ Emil Salim, "Pembangunan Berkelanjutan", dalam M. Arsyad Anwar, dkk. (Ed.), *Pemikiran, Pelaksanaan, dan Perintisan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992, h.379.

⁹⁴ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 161.

⁹⁵ Aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam prakteknya sering dilanggar melalui kegiatan penyelundupan sehingga secara ekonomis tidak efisien, dan juga cenderung menyuburkan praktek-praktek korupsi seperti saat pemberian lisensi impor. Lihat, Struktur Tarif dan Proteksi Efektif, dalam MP. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, *op.cit.*, h. 68-89.

dipaksakan hanya akan merugikan orang-orang miskin. Hal ini bertentangan dengan tujuan keadilan sosio ekonomi.⁹⁶ Dampak akhir dari kebijakan apa pun mengenai keadilan sosial ekonomi tidak boleh dikesampingkan, dengan alasan sejumlah industri berskala besar yang tidak efisien telah berdiri. Devaluasi besar-besaran dari mata uang bersamaan dengan pembekuan gaji nominal memungkinkan industri perkotaan yang tidak efisien yang telah didirikan oleh orang-orang kaya dan orang-orang yang berpengaruh untuk melakukan ekspor, dan dengan begitu industri-industri tersebut dapat bertahan, tetapi ia akan merugikan orang-orang miskin karena akan benar-benar menurunkan gaji pokok mereka.

Untuk menekankan strategi promosi ekspor dengan mengesampingkan substitusi impor bagi negara-negara berkembang adalah riskan, karenanya perlu dipertimbangkan.⁹⁸ Di samping itu juga ekspor negara-negara berkembang selalu dan akan terus menghadapi segala bentuk tantangan bea dan nonbea di negara-negara industri dengan meningkatnya fenomena proteksionisme baru (*new protectionism*). Fenomena ini berangkat dari kenyataan bahwa semakin banyak negara berkembang berhasil tampil sebagai penghasil produk primer dan produk olahan sekunder yang cukup kompetitif di pasar-pasar internasional. Selain itu, para

⁹⁶ Sebuah penelitian atas 32 negara-negara berkembang yang menerapkan berbagai kebijakan perdagangan pada tahun 1980-an, memberikan gambaran bahwa prestasi ekspor yang baik tidak selamanya sama dengan prestasi ekonomi yang baik seluruhnya. Trade and Development Report, UNCTAD 1989. Lihat juga, "Export Reforms No Guarantee of Economic of Growth", *Financial Times*, 6 September 1989, h. 6.

⁹⁷ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 162.

⁹⁸ Apalagi jika kebijakan ditekankan pada spesialisasi produk tertentu. Lihat *Kasus Kopi Brasil*, Peter H. Lindert, terj. Agustinus Subekti, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 67-69.

pekerja bergaji tinggi di negara-negara maju juga semakin khawatir bahwa tekanan persaingan produk ekspor dunia ketiga akan menggusur produk domestik sehingga nantinya akan melenyapkan lapangan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, mereka pun berusaha mendesak pemerintahnya untuk melindungi mereka dengan cara membatasi, bahkan kalau perlu mengganjal sama sekali produk impor yang berasal dari dunia ketiga. Kecenderungan ini terjadi hampir di semua negara maju, entah itu di kawasan Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Serikat, Jepang maupun di negara-negara Eropa Barat. Bertolak dari fakta-fakta yang mengecewakan itu, para pengecam perdagangan bebas pun menyimpulkan bahwa perdagangan bebas itu merugikan negara-negara dunia ketiga.⁹⁹⁾

Menurut *The Economist*, negara-negara miskin merupakan korban utama dari kejahatan perdagangan yang paling merusak, misalnya, kebijakan pertanian umum Eropa dan kesepakatan negara-negara kaya untuk melakukan kecurangan.¹⁰⁰⁾

Bantuan pemerintah untuk pertanian dan industri telah berkembang secara berarti di negara-negara industri selama tiga dekade terakhir dan rintangan terhadap impor juga membesar. Akibatnya, impor pertanian dan negara-negara berkembang sangat

⁹⁹⁾ Michael P. Todaro, *Pembangunan di Dunia Ketiga*, *op.cit.*, h. 78. Kesimpulan ini mereka tarik dari tiga alasan pokok. Pertama, pertumbuhan permintaan terhadap produk-produk ekspor tradisional mereka relatif rendah. Itu berarti peningkatan kuantitas ekspor mereka hanya akan mengakibatkan penurunan harga dan meningkatnya transfer pendapatan dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya. Kedua, elastisitas impor Dunia Ketiga. Sebaliknya relatif tinggi sehingga tanpa pembatasan impor negara-negara berkembang akan terus mengalami kesulitan dalam penyeimbangan neraca pembayarannya, serta akan terus mengalami krisis atau kelangkaan devisa. Ketiga, karena keunggulan komparatif negara-negara Dunia Ketiga dalam komoditi primer itu relatif statis maka kebijakan promosi ekspor hanya akan menghambat industrialisasi Dunia Ketiga, sehingga pada akhirnya akan menyulitkan usaha mereka untuk mengembangkan teknologi atau dalam rangka mengakumulasi keahlian teknis serta bakat-bakat kewirausahaannya.

¹⁰⁰⁾ *The Economist*, 22 Juli 1989, h. 65.

dirugikan. Pada saat bea turun, proteksi melalui rintangan nonbea telah mengalami peningkatan yang berarti. Negara-negara berkembang yang mencoba berusaha keras agar menjadi negara pengekspor yang besar, menghadapi peraturan yang ketat tentang batasan kuota, sehingga akan kesulitan untuk meluaskan ekspornya.¹⁰¹

4. Implikasi Kebijakan: Inflasi, Hutang, dan Sulitnya Perencanaan

Ketika para pendukung ekonomi pembangunan menekankan strategi dirigiste, setelah filsafat Laissez Faire diterpa badai depresi besar tahun 1930-an,¹⁰² ternyata tidak bisa juga menjamin untuk tidak muncul masalah-masalah serius dalam ekonomi pembangunan. Seperti kerugian yang tidak terantisipasi atas pemakaian sumber-sumber dana yang berlebihan, meluasnya kultur Konsumerisme Barat secara besar-besaran, bahkan negara-negara berkembang pada tahap permulaan pembangunan telah didorong menuju kehidupan dan sarana hidup yang tinggi dari tahapan kelima Rostow.¹⁰³ Hal ini menyebabkan meningkatnya impor barang-barang mewah secara tidak beralasan, sehingga memperbesar gap antara ekspor-impor dan investasi-tabungan. Pemborongan dan penyerapan yang tidak penting menuntut

¹⁰¹ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 163.

¹⁰² Momentum ini telah menghancurkan kepercayaan yang telah lama kepada Hukum Say yang meyakini bahwa perekonomian akan memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis. Ungkapan Keynes dalam hal ini yang terkenal adalah, "in the long-run we may all be dead", sehingga tak seorangpun yang sabar menunggu jangka panjang itu. Sebagaimana yang telah dikutip oleh M. Umer Chapra, *Islam The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 54.

¹⁰³ Lima tahapan Rostow: the traditional society, the precondition for take-off, the take-off, the drive to maturity, dan the age of high mass-consumption, Lincoln Arsyad, *op.cit.*, h. 47.

pertimbangan-pertimbangan nilai, dan ekonomi pembangunan tidak mampu memenuhinya.¹⁰⁴

Untuk menekan konsumsi maka dipakai kebijakan pajak dan inflasi. Akan tetapi, tetap tidak bisa menghindari defisit anggaran dan *current account*. Karena, penghasilan dari pajak tidak bisa ditingkatkan seiring dengan pengeluaran karena dasar-dasar perpajakan yang terbatas dan ketidakefisienan dan korupsi administrasi perpajakan di negara-negara berkembang. Untuk membiayai defisit ini, Keynes mendorong perlunya ekspansi moneter dan pendekatan *two gap* terhadap bantuan asing. Dalam hal ini keseluruhan modal luar negeri telah berfungsi untuk membiayai surplus impor dalam perkiraan yang sedang berjalan (*current account*) dalam neraca pembayaran. Dalam situasi peranan seperti itu negara akan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi pihak asing untuk melaksanakan operasi "*monopoly price*" yaitu penentuan harga secara sepihak sehingga defisit dalam perkiraan yang sedang berjalan dalam neraca pembayaran terus-menerus yang mengakibatkan perlunya menambah hutang secara terus-menerus juga.¹⁰⁵

Mereka yang mendukung ekspansi moneter mungkin tidak menyadari bahwa negara-negara berkembang, dengan hambatan-hambatan struktural dan pembatasan-pembatasan permintaan mereka, rentan terhadap tingkat inflasi yang tinggi dan selisih ekspor impor yang lebih besar, daripada negara-negara maju. Mereka yang menekankan bantuan mungkin tidak menyadari bahwa hanya sebagian

¹⁰⁴ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 163.

¹⁰⁵ Sritua Arief, *op.cit.*, h. 418.

kecil dari bantuan tersebut yang berupa pemberian (*grants*) sebagian besarnya adalah pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga. Oleh karena itu ekspansi moneter dan pinjaman yang besar (internal dan eksternal) menjadi sandaran pemerintah. Sekali pemerintah tergantung kepada bantuan ini, sering sulit untuk keluar dari ketergantungan tersebut.¹⁰⁶

Akibat ekspansi moneter yang berlebihan adalah kian pesatnya laju inflasi. Hal ini mempunyai dampak yang berlawanan baik terhadap efisiensi maupun keadilan. Meskipun pada mulanya, hal ini mengarah pada suatu peningkatan *output* dan kesempatan kerja,¹⁰⁷ pada akhirnya ia mengarah pada stagnasi, kenaikan harga dan gaji bersamaan dengan permintaan yang menurun, produksi rendah, pengangguran yang tinggi dan kelebihan kapasitas produksi. Laju pertumbuhan di negara-negara industri menjadi rendah dan pengangguran secara relatif menjadi lebih tinggi. Dalam kondisi demikian, pengelolaan permintaan agregat model Keynes menjadi sulit. Ia lebih memperbesar inflasi tanpa membantu peningkatan pertumbuhan dan mengurangi pengangguran. Seluruh skenario yang stabil kini secara luas dianggap penting untuk merangsang pertumbuhan riil dan mengurangi pengangguran.¹⁰⁸

¹⁰⁶ M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. 164.

¹⁰⁷ Keynesian berpendapat bahwa ada *trade-off* antara inflasi dan *unemployment*. Kurva Phillip mempunyai lereng negatif, maka kestabilan harga dan kesempatan kerja yang tinggi adalah dua hal yang tidak bisa terjadi bersama-sama. Kalau menghendaki kesempatan kerja yang tinggi harus mau menanggung beban inflasi, jadi keduanya tidak bisa terjadi bersama-sama, harus ada *trade off*, Nopirin, *Ekonomi Moneter 2*, Yogyakarta : BPFE, 1987, h. 37.

¹⁰⁸ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 56.

Inflasi mempengaruhi kontrol harga dan subsidi makanan serta konsumsi penting lainnya. Pada saat kontrol harga merugikan pertumbuhan penawaran jangka panjang terhadap barang-barang ini, subsidi sangat membebani anggaran pemerintah dan sulit dipikul oleh pemerintah. Inflasi juga menyebabkan penilaian kurs valuta yang berlebihan yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengurangi tekanan inflasi. Hal ini akan mendorong impor dan merugikan ekspor karena tidak mampu bersaing di pasar internasional. Pertanian dan SMEs sangat menderita karena keduanya tidak mendapat dukungan sebagaimana yang diterima oleh industri berskala besar. Ketergantungan pada impor naik dan defisit valuta asing melonjak lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan pinjaman dan memperberat beban pembayaran hutang. Meskipun sekarang pemerintah ingin – di bawah tekanan IMF dan Bank Dunia -- menghapuskan kontrol harga dan bantuan dan mengambil kurs yang realistis, secara politis mereka kesulitan untuk melakukannya sebab akan berpengaruh buruk terhadap biaya hidup.¹⁰⁹

Akibat naiknya pinjaman, maka hutang-hutang negara berkembang baik internal maupun eksternal pun menjadi meningkat.¹¹⁰ Ini menyebabkan ketidakseimbangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh negara-negara

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 165.

¹¹⁰ Jumlah hutang Indonesia menurut Laporan Bank Dunia "Indonesia: Public Spending in a Time of Change", telah meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 134 milyar dollar AS (83 persen dari GDP) pada awal tahun 2000, dari 53 milyar dollar AS (23 persen dari GDP) sebelum krisis, *Kompas*, 5 Juni 2000.

berkembang menjadi rumit.¹¹¹ Pemanfaatan pasar keuangan domestik yang kecil untuk pinjaman pemerintah yang besar, tidak hanya merugikan sektor swasta tetapi juga melemahkan lembaga-lembaga keuangan, membebani pemerintah dengan hutang yang kurang membawa hasil. Mereka tidak mampu menyediakan cadangan yang cukup untuk kerugian yang diakibatkan oleh utang-utang yang tidak dapat dibayar. Bersandar pada bank-bank multinasional untuk pinjaman luar negeri, pada mulanya dibenarkan berdasarkan ketidakmampuan pemerintah membayar hutang yang tinggi, telah menaikkan beban utang ke tingkat yang membahayakan karena ketidakmampuan negara-negara pengutang untuk membayar utang sangat mengancam kelangsungan hidup dari bank-bank tersebut.¹¹² Bahkan proses pembangunan saat ini telah membahayakan. Tingkat pertumbuhan nyata telah menurun, usaha-usaha untuk menurunkan inflasi dan ketidakseimbangan eksternal bahkan semakin memperlambat hal ini.¹¹³

Selain itu, ekonomi pembangunan juga menghadapi kesulitan perencanaan. Lebih-lebih lagi, adanya kecenderungan untuk terlalu berharap dari sebuah model perencanaan. Tidak disadari bahwa suatu model perencanaan tidak bisa menghapuskan atau menyederhanakan pilihan-pilihan sulit yang harus dibuat oleh

¹¹¹ Lihat krisis hutang dunia, dalam Peter H. Lindert, *Ekonomi Internasional*, *op.cit.*, h. 6-8.

¹¹² Pada tahun 1982, pengungkapan sembilan bank ternama di AS mengenai pinjaman-pinjaman luar negeri yang mengalami guncangan adalah dua kali besarnya dari seluruh nilai modal yang harus mereka terima sebagai pembayaran kembali (*paid-in capital*). Hal yang serius ini juga dialami oleh negara-negara debitur itu sendiri. Ketika suku bunga riil yang tinggi menghantam para peminjam lebih keras dari pada yang mereka alami ketika terjadi kemerosotan ekonomi pasar (*great slump*) pada tahun 1930-an. Peter H. Lindert, *op.cit.*, h. 611-12

¹¹³ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 165-66.

pembuat kebijakan. Konflik antartujuan yang sering dihadapi dalam program-program pembangunan tidak bisa diselesaikan tanpa menetapkan prioritas. Sebuah model ekonometrik tidak bisa menggantikan filsafat pembangunan yang memberikan garis petunjuk dalam bentuk tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang disetujui, yang demikian itu tidak bisa diwujudkan dalam kerangka kerja optimalitas pareto. Sebuah filsafat pembangunan dan motivasi untuk para pembuat kebijakan dari masyarakat umum dibutuhkan untuk mengambil dan menerima keputusan dengan sukarela demi kepentingan yang lebih luas bagi kesejahteraan umum. Tidak adanya filsafat dan sistem motivasi semacam itu dapat dijelaskan mengapa hampir seluruh rencana pembangunan menempatkan keadilan di antara tujuan-tujuan perencanaan, tetapi tidak satu pun darinya yang menyusun suatu program yang efektif untuk menyelesaikannya.¹¹⁴

Banyak rencana pembangunan yang di atas kertas teruji efisiensi dan konsistensinya (meskipun bukan keadilan), tetapi gagal dalam praktik karena kekurangan prasyarat-prasyarat politis dan administratif.¹¹⁵ Pelaksanaan rencana-rencana tersebut cenderung sangat sulit karena rumusannya didasarkan pada model ekonometrik yang paling maju. Rencana-rencana itu terlalu baik untuk dipraktikkan. Kebanyakan negara-negara berkembang bisa memanfaatkan lebih banyak dari penerapan yang benar dari prinsip-prinsip dasar ekonomi ketimbang dari upaya-

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 166-67.

¹¹⁵ Galbraith menekankan komponen-komponen non ekonomi sebagai prasyarat, seperti pemerintah yang efektif, pendidikan dan keadilan sosial. Lihat, J.K. Galbraith, *Economic Development n Perspective*, Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1962, h. 9-10.

upaya menerapkan gaya teori tinggi. Dan, yang penting lagi menurut Chapra bahwa model-model makroekonomi memiliki preferensi *built-in* yang mendukung komponen-komponen yang bisa diukur daripada komponen yang relatif dilupakan yang tidak bisa diukur, tetapi sangat penting untuk mewujudkan tujuan rencana pembangunan itu, khususnya keadilan sosio-ekonomi.¹¹⁶

C. Kembalinya Ideologi Pasar

Kebijakan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang telah berubah secara drastis sejak tahun 1980-an. Hampir semua negara berkembang menggeser kebijakan-kebijakan ekonomi mereka ke arah liberalisasi yang lebih besar pada mekanisme pasar melalui serangkaian reformasi ekonomi berorientasi pasar. Nyaris di segala penjuru dunia, negara-negara berkembang mulai mengadopsi kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk merestrukturisasi watak peran negara dalam perekonomian, untuk meliberalisasi perdagangan domestik dan regulasi investasi serta untuk menswastakan perusahaan-perusahaan milik negara. Berbagai reformasi kebijakan tersebut nyaris mengganti secara keseluruhan semua kebijakan sebelumnya yang mendominasi negara-negara berkembang. Reformasi yang mengenyahkan nasionalisme ekonomi dari perbendaharaan kata negara-negara itu, mengurangi peran eksekutif negara dalam perekonomian, dan menghentikan kecenderungan pada pembangunan jenis sosialis, orientasi mutakhir pembangunan di negara-negara berkembang didasarkan pada premis kebijakan-kebijakan memandang keluar, dirancang untuk mengintegrasikan perekonomian ke dalam pasar global,

¹¹⁶ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit*, h. 167.

utamanya ketika strategi-strategi berorientasi ekspor menggantikan industrialisasi substitusi impor.¹¹⁷ Keberpihakan kepada ideologi pasar ini telah dijelaskan oleh M.

Friedman :

Tampak jelas bahwa, paling tidak hingga saat ini, sebuah pasar bebas tanpa perencanaan terpusat telah menjadi bukan hanya jalan pertumbuhan ekonomi yang paling efektif, bahkan satu-satunya jalan yang efektif untuk meningkatkan standar hidup rakyat banyak. Dan, sangat jelas pula bahwa cara ini telah menjadi satu-satunya jalan yang cocok dengan kebebasan politik dan demokrasi.¹¹⁸

Kebangkitan kembali secara menyeluruh kepentingan politik praktis teori Neo-Klasik bermula dari jawaban bernada ortodoks/konservatif yang diajukan oleh teori ini untuk menanggulangi krisis ekonomi yang tidak mampu diselesaikan oleh usulan-usulan kontradiktif teori Keynesian.¹¹⁹ Di samping itu juga runtuhnya sistem ekonomi yang dikendalikan secara terpusat di Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur lainnya, secara dramatis menunjukkan kegagalan sistem ekonomi yang didasarkan pada pengendalian oleh pemerintah secara terpusat.¹²⁰ Sehingga, tidak heran kesalahan-kesalahan dilemparkan pada strategi sosialis mengenai pemerintahan yang besar dan rencana pembangunan menyeluruh yang dianutnya selama masa kurang lebih tiga dekade. Telah dikatakan bahwa bersandar pada investasi sektor publik dan kontrol untuk meningkatkan pertumbuhan telah

¹¹⁷ Muhadi Sugiono, *op.cit.*, h. XI

¹¹⁸ M. Friedman, *Foreign Economic Aid : Means and Objective*, dalam T. Baghwati dan R.Eckans (Ed.), *Foreign Aid*, London: Penguin, 1970, h. 72-73.

¹¹⁹ Kevin P. Clements, *op.cit.*, h. 22.

¹²⁰ Suhadi Mangkusuwondo, *op.cit.*, h. 158.

menimbulkan bukan saja penyelewengan pada alokasi sumber-sumber, melainkan juga pada ketidakseimbangan makroekonomi dan eksternal. Hal ini telah merintangikan realisasi inisiatif dan potensi investasi bagi sektor swasta. Antusiasme terhadap industri-industri berat yang padat modal dan berskala besar telah menimbulkan industrialisasi yang tidak efisien yang merugikan pembangunan pedesaan dan pertanian sebagaimana ditekankan oleh Michael Camdessus :

Ekonomi yang mengalami inflasi terus-menerus, defisit anggaran yang tinggi, pembatasan perdagangan yang besar, salah menetapkan kurs, suku bunga yang tidak realistis, hutang eksternal yang besar, dan larinya modal tidak sehat yang terus-menerus adalah tidak dapat dan tidak tumbuh cepat dalam masa yang panjang.¹²¹

1. Program Penyesuaian (*Adjustment*)

Kebangkitan ekonomi Neo-Klasik pada masa kegagalan strategi sosialis telah menyebabkan negara-negara berkembang kembali ke tempat mereka mengawali langkah, yaitu problema mewujudkan efisiensi dan keadilan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka. Hal ini telah terjadi sejak permulaan tahun 1970-an ketika mulai muncul kesadaran bahwa pembangunan bukan identik dengan pertumbuhan rata-rata pendapatan per kapita saja, melainkan juga penurunan angka kemiskinan.¹²² Karena itu, ekonomi pembangunan tidak lagi mendewakan GNP, hanya mementingkan pertumbuhannya, ia juga mengklaim

¹²¹ Michael Camdessus, "Opening Remarks", Victoria Corbo, dkk., "Growth Oriented Adjustment Programmes", dikutip oleh M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 167-168.

¹²² Suatu perbaikan dalam tingkat hidup manusia di negara-negara berkembang hanya dapat tercapai melalui akselerasi pertumbuhan dengan keadilan, Sumitro Djojohadikusumo, "Menuju Tata Ekonomi Internasional Baru", dalam Thee Kian Wie, (penyunting), *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*, *op.cit.*, h. 252.

sebagai pendukung redistribusi, ia menyeru ke arah pertumbuhan dengan redistribusi, pengurangan kemiskinan absolut dan pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Ekonomi Neo-Klasik sekarang tidak saja mengaku menjadi pengawal rasionalitas, ia juga hendak menjadi penyantun orang-orang miskin.¹²³

Dalam pertemuan tahunan Bank Dunia di Nairobi tahun 1973, Mr. McNamara, yang setelah itu menjadi pimpinan Bank tersebut, mengimbau dunia untuk memfokuskan kepada kemiskinan absolut yaitu mereka yang mengalami kondisi hidup yang buruk karena penyakit, buta huruf, kurang gizi dan kemelaratan, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Theodore Schultz pada waktu menerima hadiah Nobel tahun 1979, menyatakan, sebagian besar rakyat dunia adalah miskin. Apabila kita mengetahui ekonomi yang miskin ini, kita akan banyak mengetahui keadaan ekonomi yang sebenarnya. Gerald Meier dalam karyanya *Leading Issues in Economic Development* yang terbit pertama kali pada tahun 1964, menyatakan bahwa kemiskinan, ketidakadilan, dan distribusi pendapatan benar-benar telah hilang dan pada edisi keempat (1984) dengan penekanan yang berarti pada distribusi pendapatan di negara-negara berkembang dan seterusnya mengatakan bahwa "yang muncul dari kemiskinan" adalah "masalah ekonomi yang sebenarnya", pada buku yang lain, yang juga diterbitkan pada tahun 1984.¹²⁴

¹²³ M. Umer Chapra, *Islam and...*, *op.cit.*, h. 168.

¹²⁴ *Ibid.*, h. 169.

Kenyataan, bahwa keadilan sosio-ekonomi telah dihapuskan dari kepentingan formasi dan pertumbuhan modal yang cepat. Kini diakui kembali merupakan perubahan yang menggembirakan. Bagaimanapun pertanyaan yang penting adalah apakah teori ekonomi neoklasik yang bebas nilai mampu memberikan strategi yang efektif untuk merealisasikan tujuan ini di negara berkembang? Strategi yang ditekankan adalah penyesuaian "adjustment". Melihat kondisi negara-negara berkembang yang ditimpa ketidakseimbangan, strategi ini bukan lagi menjadi sebuah pilihan, ia menjadi suatu keharusan. Bagaimanapun yang lebih penting adalah apakah komponen program penyesuaian yang dirumuskan oleh teori ekonomi neoklasik bisa membantu merealisasikan keadilan dan efisiensi. Jika keadilan sosio-ekonomi akan direalisasikan, perlu penurunan konsumsi diwujudkan sedemikian rupa, sehingga efek yang merugikan tertimpa pada orang kaya dan mereka yang cukup kuat untuk memikulnya, sehingga kondisi orang-orang miskin setidaknya tidak diperburuk, jika tidak bisa, karena alasan-alasan yang kuat, menjadikan mereka lebih baik, yang merupakan alternatif paling diinginkan. Di segi penawaran, keadilan sosio-ekonomi menuntut diwujudkannya peningkatan *output* sedemikian rupa sehingga kebutuhan-kebutuhan bisa dikurangi. Jelasnya, jangan sampai orang miskin yang telah tertekan oleh ekonomi pembangunan sekuler selama masa ekspansi, akan tertekan lagi oleh ekonomi Neo-Klasik selama masa penyesuaian.¹²⁵

¹²⁵ Barber Conable mengakui bahwa pemotongan dalam standar hidup dalam jangka pendek adalah sangat sulit yang kadang-kadang sangat buruk pengaruhnya kepada rakyat miskin, (*Opening Remarks*, Corbo, dkk., 1987, *ibid.*, h. 170.

Karena program penyesuaian ini tidak lepas dengan benang liberalisasi, maka negara-negara berkembang yang mempertahankan umumnya menghadapi kendala struktural harus berbagi kerja dengan aktor-aktor di luarnya, terutama sektor bisnis. Proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi kapitalis global, keharusan bertumpu pada negosiasi dan perjanjian internasional, dan ketidakmampuan untuk mengisolasi diri dari serbuan arus informasi dan ideologi memaksa para elit penguasa untuk melakukan reformasi politik. Mereka terpaksa membuka diri dan menerapkan aturan main baru yang membuat mereka harus mempertanggungjawabkan perilaku mereka dan membuat proses pemerintahan jadi transparan, yaitu aturan main yang menjamin kepentingan pemilik kapital dan menempatkan negara dan birokrasinya di bawah peraturan dan undang-undang yang jelas. Dan, mekanisme pasar merupakan pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumber daya.¹²⁶

Pembentukan liberalisasi dan deregulasi perdagangan serta investasi ataupun langkah-langkah lain itu menempatkan elit-elit negara berkembang dalam

¹²⁶ Mohtar Mas'oeed, *op.cit.*, h. 59. Hal ini sangat jelas ketika Ronald Reagan menempuh segala upaya untuk membuka negara-negara berkembang bagi pergerakan modal internasional. Secara khusus ia menghadiri dan memanfaatkan dialog utama selatan di Cancun Meksiko tahun 1981 untuk mengeksport gagasan-gagasannya ke negara-negara berkembang melalui kuliahnya tentang keajaiban pasar, yaitu mengenai kebaikan pasar dan keburukan negara. Bukannya mempersoalkan ketimpangan hubungan antara negara maju dan negara berkembang, ia malah bersikukuh menjalankan kebijakan domestik negara-negara berkembang sebagai penghalang bagi kemakmuran dan sumber masalah ekonomi negara-negara berkembang. Muhadi Sugiono, *op.cit.*, h. 159.

blok historis baru hyper-liberalisme bersama dengan elit-elit transnasional lainnya.¹²⁷

Dengan mendukung reduksi peran negara dalam perekonomian dan pemulihan mekanisme pasar, maka program penyesuaian telah mengangkat sebuah lingkungan yang menguntungkan bagi modal internasional dan meningkatkan kekuatan struktural modal ini *vis a vis* kekuatan-kekuatan sosial lainnya seperti buruh terorganisasi dan warga negara kebanyakan. Keberpihakan program penyesuaian pada kepentingan modal internasional bisa dengan mudah dipahami bahwa secara historis Bank Dunia sangat tergantung pada kekuatan modal internasional.¹²⁸ Muhadi Sugiono menambahkan bahwa *Structural adjustment programmes* yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh IMF dan Bank Dunia sebagai sebuah pakar stabilisasi ekonomi dan tindakan-tindakan penghematan merupakan bukti paling nyata dari penerapan paksa ide-ide pasar yang diangkat para intelektual Kanan Baru bagi negara-negara berkembang.¹²⁹ Komponen paling utama dari liberalisasi



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹²⁷ Transnasionalisasi berlangsung melalui bermacam-macam media. Pendidikan mahasiswa (ekonomi) pascasarjana dari negara-negara berkembang di Universitas yang ide-ide Neo Klasiknya dominan seperti di AS dan Eropa sesudah tahun 1970-an merupakan media efektif bagi importasi ideologi pasar ke negara-negara berkembang. Disamping itu juga program-program pelatihan yang ditawarkan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia bagi para teknokrat negara-negara berkembang, didukung juga dengan tersedianya bermacam-macam berkala internasional seperti *The Wall Street Journal*, *The Economist* dan *The Financial Times*. Semuanya ini berujung pada institusionalisasi ideologi pasar di seluruh dunia dan membantu mendefinisikan agenda kebijakan ekonomi negara-negara itu sejalan dengan ideologi pasar. Muhadi Sugiono, *op.cit.*, h. 158.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 168.

¹²⁹ *Ibid.*, h. 162.

Neo Klasik, sebagaimana diungkapkan oleh IMF dalam program penyesuaian adalah:

(a) mengurangi peranan pemerintah dalam bidang ekonomi, (b) mengizinkan pasar untuk memainkan peranannya, dan (c) liberalisasi perdagangan asing.¹³⁰

Dengan kecondongan Bank Dunia dan IMF kepada modal, institusi mekanisme pasar yang difasilitasi Bank Dunia dan IMF melalui kondisionalitas reformasi di bawah program penyesuaian hampir tidak bisa dikatakan sebagai sentral.¹³¹ Sebuah studi yang disponsori UNICEF mengenai Konsekuensi Program Penyesuaian (1987), sangat jelas mengindikasikan bahwa beban-beban yang diakibatkan oleh langkah-langkah penghematan dan pemangkasan pengeluaran kesejahteraan secara tidak proporsional dipikul oleh kelompok-kelompok miskin dan tidak beruntung di negara-negara berkembang. Di banding yang kaya, orang-orang miskin lebih tidak mampu melindungi diri dari dislokasi sosial sebagai akibat dari segala langkah penghematan.¹³² Tidak ada kebijakan-kebijakan dari program pemberian dana yang mempunyai tujuan secara eksplisit untuk meringankan dampak-dampak distribusi yang merugikan dari goncangan yang timbul dari luar atau dari penyesuaian ekonomi yang dibutuhkan pada masa lalu, mereka mengakui masalah distribusi merupakan kepentingan politik internal. Akibatnya tidak satupun

¹³⁰ M. Umer Chapra, IFC, *op.cit.*, h. 171.

¹³¹ Liberalisasi dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) umumnya juga diterapkan atas dasar negara yang paling diuntungkan (*most-favored-nation-MFN*), blok-blok ekonomi secara eksplisit mendiskriminasi bagian dunia di luar mereka dengan memberikan pengaturan dagang preferensi kepada negara-negara anggotanya saja. Philip Kotler, dkk., *Pemasaran Keunggulan Bangsa*, terj. Aldi Jenie, Jakarta : Prenhallindo, 1998, h. 16.

¹³² Muhadi Sugiono, *op.cit.*, h. 169.

dari laporan konsultasi tahunan IMF mengenai negara-negara anggota yang pernah membicarakan kemajuan usaha negara anggota dalam menanggulangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan, dan mengurangi ketidakadilan. Suatu negara mendapat penghargaan dari IMF apabila negara berhasil mengurangi ketidakseimbangan tanpa memandang apakah hal ini dicapai dengan atau tanpa efek yang merugikan keadilan.¹³³

Suatu pembicaraan mengenai sisi pasokan dari program dana hanya menyinggung terutama masalah pemberian insentif yang lebih baik untuk mengenakan tabungan, investasi dan ekspor melalui harga yang realistis, suku bunga, kurs valuta dan pajak.¹³⁴ Di antara komponen program penyesuaian lainnya adalah devaluasi mata uang dan penyesuaian nilai tukar. Devaluasi dianggap sebagai langkah jangka pendek dalam rangka menyesuaikan *current account* dan neraca perdagangan ketika di mata Bank Dunia dan IMF nilai tukar yang *over valued* di negara-negara berkembang mengakibatkan bias terhadap ekspor. Dengan mendevaluasi mata uang bias tersebut bisa dikoreksi dan membuat ekspor lebih kompetitif sambil mereduksi impor yang menjadi makin mahal.¹³⁵ Akan tetapi, devaluasi ini juga bisa menyebabkan harga-harga lain ikut naik, juga harga bahan-

¹³³ M. Umer Chapra, *Islam and ...*, *op.cit.*, h. 171.

¹³⁴ *Ibid.*, h. 172.

¹³⁵ Muhadi Sugiono, *op.cit.*, h. 164.

bahan yang dibutuhkan untuk industri dalam negeri.¹³⁶ Untuk mengatasi inflasi ditawarkan manajemen *demand*, yaitu tindakan-tindakan penghematan yang melibatkan reduksi suplai uang yang melalui reduksi upah, reduksi pengeluaran publik, dan pelayanan publik.¹³⁷

Dengan demikian tujuan dari manajemen permintaan adalah mencapai suatu keseimbangan antara kesempatan kerja dan inflasi. Namun, fenomena baru telah muncul, yang dikenal sebagai stagnasi, dalam hal ini inflasi tetap tinggi walaupun tingkat pengangguran meningkat.¹³⁸ Sementara itu, tidak ada yang menyinggung suatu perubahan dalam komposisi pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kinerja anggaran yang ada. Tidak ada pembicaraan tentang cara menghemat sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menaikkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan kebersihan bagi rakyat miskin dalam rangka meningkatkan kualitas faktor sumber daya manusia dalam pembangunan.¹³⁹

Penyandaran kepada mekanisme harga dan sistem perbankan yang berdasarkan bunga untuk mengalokasikan sumber-sumber daya tetapi bertentangan

¹³⁶ T. Gilarso, *op.cit.*, h. 329.

¹³⁷ Muhadi Sugiono, *op.cit.*, h. 164-65.

¹³⁸ Philip Kotler, *op.cit.*, h. 40.

¹³⁹ Sudah jelas bahwa pembangunan memerlukan konsentrasi modal, namun masalahnya yang mendasar adalah bagaimana dengan cepat menyebarkan hasil-hasil pertumbuhan ekonomi ke mayoritas penduduk sehingga tidak terjadi disparitas pendapatan antara yang kaya dan yang miskin.

dengan upaya pemenuhan kebutuhan dan distribusi yang adil, dari pendapatan dan kekayaan adalah aspek yang terlupakan.¹⁴⁰ Aspek ini bagaimanapun ada di luar pikiran mereka ketika memprediksikan yang sebenarnya tentang pengaruhnya atas orang-orang miskin. Mereka beranggapan, dan anggapan mereka itu realistis dalam kerangka kerjanya yang bebas nilai bahwasannya tidak satu pun yang bisa dilakukan untuk menghindari pengaruh paling buruk atas orang-orang miskin. Segala bentuk usaha untuk menghindari akibat kekuatan-kekuatan pasar akan menimbulkan penyimpangan yang dapat menyebabkan ketidakefisienan dan pertumbuhan yang rendah. Karena itu, satu-satunya alternatif yang menarik adalah mengizinkan pertumbuhan yang lebih tinggi yang dicapai melalui liberalisasi untuk meningkatkan posisi orang-orang miskin. Namun, masalahnya, bisakah pertumbuhan yang lebih tinggi secara otomatis menghasilkan keadilan.¹⁴¹ Jawabannya adalah negatif. Ekonomi neoklasik menurut Chapra bisa efektif hanya jika berkenaan dengan masalah pemenuhan kepentingan pribadi setiap orang, yang diperlukan untuk meningkatkan inisiatif dan efisiensi. Akan tetapi, distribusi yang adil tidak bisa dicapai oleh setiap orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja. Kepribadian semacam itu cenderung memperburuk distribusi pendapatan. Distribusi yang seimbang memerlukan motivasi untuk memenuhi kepentingan sosial yang melibatkan pengorbanan kepentingan pribadi. Pendekatan bebas nilai yang sekuler

¹⁴⁰ M. Umer Chapra, *Islam and ...*, *op.cit.*, h. 172.

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 173.

dari liberalisasi tidak memiliki mekanisme apa pun untuk memotivasi masyarakat agar mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi kepentingan sosial pada saat keduanya tidak serupa.¹⁴²

Ironisnya, tidak ada negara yang memiliki ideologi pasar diberlakukan secara paksa lebih dari yang terjadi di negara-negara berkembang : Amerika Serikat dan Australia, misalnya, merupakan dua negara yang paling gigih memperjuangkan pasar bebas. Namun, kenyataannya masih memiliki banyak peraturan hambatan dan menerapkan tarif bea masuk.¹⁴³ Ternyata, mereka menghadapi persaingan ketat di pasar dalam dan luar negeri, surplus perdagangan AS telah hilang, sementara defisit perdagangannya makin terbuka lebar.¹⁴⁴ Sehingga, tepat sekali apa yang disimpulkan oleh Amitai Etzioni (1992), bahwa semakin diterima paradigma neoklasik sebagai pedoman perilaku, semakin dilemahkan kemampuan untuk mempertahankan ekonomi pasar.¹⁴⁵ Berkaitan dengan ideologi pasar ini, di kebanyakan kawasan selatan sebenarnya juga ada kesadaran yang mendalam akan keterbatasan bermain strategi pembangunan, serta ada keyakinan yang semakin berkembang bahwa jalan

¹⁴² *Ibid.*, h. 187.

¹⁴³ *Kompas*, tarif impor bahan baku Agro Industri harus dihapus, 5 Juni 2000.

¹⁴⁴ Anggota United Auto Workers memprotes impor mobil yang tidak dibatasi pada bulan Maret 1981. Mereka menghancurkan sebuah mobil Toyota di dekat pabrik pemasangan label Ford Motor Company di Chicago Heights, Illinois. Peter H. Lindert, *op.cit.*, h. 2.

¹⁴⁵ Amitai Etzioni, *op.cit.*, h. 277.

keluar dari krisis saat ini tidak bisa ditentukan dengan cara berpaling kembali pada strategi-strategi tersebut (kembali ke Neo-Klasik).¹⁴⁶

Bahkan George Soros, yang sering dituduh sebagai spekulan dan pengguncang pasar juga mengakui keburukan pasar, sehingga mengusulkan konsep tentang pasar perlu ditinjau ulang. Kekhawatirannya terhadap ancaman pasar inilah sehingga Soros menyebut pasar (*laissez faire*) sebagai musuh baru (*the new enemy*) bagi masyarakat terbuka (*open society*) setelah ideologi-ideologi totaliterian.¹⁴⁷ Dalam *The Capitalist Treath* (1997), Soros menyatakan bahwa musuh utama dalam masyarakat terbuka tidak hanya komunis tetapi juga kapitalis. Kalau Karl Popper dalam *Open Society and Its Enemies* (1945), menyatakan bahwa komunisme dan fasisme telah menjadi musuh masyarakat terbuka karena mempercayai kekuatan negara untuk menekan dan menindas kebebasan individu, maka Soros (1997) menyatakan bahwa masyarakat akan terancam jatuh karena individualisme yang berlebihan. Semakin banyak kompetisi dengan disertai terlalu sedikitnya aturan dapat menyebabkan kondisi yang tidak toleran dan tidak stabil. Meskipun demikian, bukan berarti Soros menyamakan antara *laissez faire* dengan Nazisme dan komunisme. Karena, bagaimanapun ideologi-ideologi *totaliterian* sejak kelahirannya memang sudah berseberangan dengan *open society*.

¹⁴⁶ Lihat Komisi Selatan, *Tantangan yang Menghadang Selatan*, terj. Suwandi S. Brata, Jakarta : Gramedia, 1990, h. 103.

¹⁴⁷ Istilah masyarakat terbuka "*open society*" telah dikenalkan oleh Henri Bergson dalam bukunya *The Two Sources of Morality and Religion* (1932), kemudian dikembangkan oleh filosof Austrian Karl Popper dalam bukunya *The Open Society and Its Enemies* (1945).

Soros tidak mengingkari dengan segala kemudahan yang didapat dari masyarakat terbuka, tetapi karena tidak diakuinya adanya kebutuhan terhadap sesuatu yang mendukung nilai-nilai dan institusi-institusi yang melindungi masyarakat terbuka, maka muncul ancaman tersebut. Ancaman *laissez faire* sekarang ini bagi Soros lebih potensial daripada ideologi *totaliterian*.¹⁴⁸ Hal ini juga yang dikemukakan oleh Antony Giddens, bahwa manusia perlu dilindungi terhadap terkaman dan ancaman pasar bebas global. Memang pasar dibutuhkan untuk mendatangkan kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama juga diperlukan baik peranan pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi ancaman pasar.¹⁴⁹

Soros mengkritik paradigma pasar yang terlalu menekankan kepada terjadinya keseimbangan secara otomatis tanpa melihat kekurangan-kekurangannya.

Ia mengatakan sebagai berikut :

*Kita harus mengakui bahwa kita menciptakan pasar global, dan pasar finansial global ini tanpa memahami ciri dan kodrat pasar itu sendiri. Kita mempunyai teori keliru, bahwa biarkan saja pasar berjalan dengan kekurangannya, nanti pasar itu akan menciptakan ekuilibrium sendiri.*¹⁵⁰

Pandangan ini agaknya bermula dari kritik Popper terhadap ideologi totaliterian yang menurutnya telah memonopoli klaim kebenaran. Mengapa tidak seorang pun berhak mengklaim kebenaran? Soros mengaitkan penjelasannya dengan

¹⁴⁸ *BurmaNews Network (BNN), EBN, UVI.net, The Atlantic Monthly, Soros Foundations, 18 Januari 1997.*

¹⁴⁹ "Sindhunata, enuju Masyarakat Risiko", dalam , *BASIS*, Edisi Januari-Februari 2000, h. 3

¹⁵⁰ *Ibid*, h. 7.

konsep *refleksivity* dan *fallibility*. Menurut konsep *refleksivity*, manusia selalu mempunyai ide tentang dunia sosial, tentang dirinya sendiri, tentang masa depannya, tentang kondisi kehidupannya. Dan, idea itu bukanlah ide independen, artinya ide tentang suatu dunia atau keberadaan yang begitu lepas dari dirinya. Dengan mempunyai ide itu, manusia juga masuk ke dalam dunia sambil mempunyai niat untuk mempengaruhi dan mengubahnya. Dengan demikian, hidup ini semakin hari semakin sedikit ditentukan oleh kepastian dan ketentuan tradisi. Keputusan diambil dari reflektivitas yang tidak lepas dari resiko-resiko. Oleh karena itu perlu dibarengi dengan konsep *fallibility* (kesalahan pengetahuan). Artinya, ide manusia tentang dunia di luar dirinya itu selalu tidak memadai. Ada bagian dari realitas dunia yang di luar pengetahuannya. Sehingga, pengetahuan manusia selalu mengandung cacat dan kekurangan, karena tidak mengerti realitas seluruhnya. Oleh karena itu manusia perlu kritis terhadap setiap pernyataan, mencari lubang kesalahan dan cacat itu. Termasuk dalam aktivitas pasar dan finansial, sehingga resiko dapat dikurangi.¹⁵¹ Tanpa ada koreksi maka pasar sangat berpotensi untuk kolaps. Jika setiap orang mempunyai reflektivitas sendiri-sendiri, maka pasar akan menjadi tidak stabil. Tidak ada yang dapat memegang dan mengendalikan pasar, akibatnya pasar semacam itu menjurus menjadi *chaotic*. Dan, jika pasar dibiarkan berkembang terus dengan mekanisme yang seperti ini maka akan menjurus untuk menghancurkan masyarakat.

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 6.

Giddens sependapat dengan Soros bahwa reflektivitas harus disertai dengan falibilitas, namun ia mengingatkan, tidak mungkin orang harus terus-menerus bertanya dengan kritis. Artinya, di samping bersikap kritis orang juga memerlukan seperangkat patokan hidup atau kebiasaan-kebiasaan yang akan dipatuhi dan dijadikan pegangan.¹⁵² Di sinilah letaknya bahwa harus ada aturan atau *filter* yang disepakati bersama oleh masyarakat untuk dijalankan. Dalam hal ini Chapra menekankan perlunya injeksi dimensi moral yang akan membatasi perilaku-perilaku menyimpang.¹⁵³

2. Kesalahan Klaim Ekonomi Neo-Klasik (Melihat Keberhasilan Asia Timur)¹⁵⁴

Para pemikir neoklasik mengklaim pengalaman-pengalaman Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Republik Korea (Korea Selatan), Hongkong, dan Singapura sebagai sebuah teladan perdagangan bebas dan kebijakan-kebijakan liberal. Memang tidak diragukan bahwa liberalisasi dan orientasi ekspor berperan dalam mempercepat pertumbuhan di negara-negara tersebut, tetapi tidak benar untuk mengalamatkan semua keberhasilannya kepada kedua faktor ini. Masih banyak faktor lain lagi yang sama, jika tidak lebih bertanggung jawab. Di antaranya adalah, campur tangan

¹⁵² *Ibid.*, h. 7.

¹⁵³ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, *op.cit.*, h. 9.

¹⁵⁴ Pembahasan khusus tentang keberhasilan Asia Timur ini juga merupakan kritik Chapra terhadap neoklasik yang menganggap bahwa negara-negara Asia Timur berhasil karena menerapkan sistem liberalisasi. Dalam pembahasan ini Chapra menunjukkan akan kesalahan pendapat tersebut dan menolak anggapan yang mengatakan bahwa liberalisasi adalah obat yang mujarab untuk mengatasi perekonomian NSB.

pemerintah, keadilan sosio ekonomi dan keharmonisan sosial yang diwujudkan oleh *Land reform* dan nilai-nilai sosial yang ekstensif, kecenderungan yang tinggi untuk menabung dan menginvestasi, dan dukungan aktif dalam *substitusi impor* serta *promosi ekspor* untuk industrialisasi. Tidak seluruh faktor tersebut sesuai dengan model Neo-Klasik, bahkan sebagian besar nyata-nyata bertentangan dengan teori ini.¹⁵⁵

Konsepsi pasar sendiri sekitar tahun 1990-an sudah banyak perbedaan, tergantung bagaimana menafsirkannya. Pengertian Asia Timur mengenai ekonomi pasar, misalnya, pasti berbeda dari Konsepsi Eropa dan Amerika. Bagi elit-elit Asia Timur, pengertian pasar semata-mata berarti adopsi kebijakan-kebijakan berorientasi ekspor, tanpa harus ada sangkut pautnya dengan keterbukaan ekonomi.¹⁵⁶ Bahwa perdagangan bebas itu baik untuk perekonomian tampaknya menjadi ide semua ahli ekonomi yang baik, dalam arti bahwa orang tidak perlu dikaitkan dengan ilmu ekonomi neoklasik untuk menghasilkan resep-resep kebijakan berorientasi pasar semacam itu.¹⁵⁷ Professor Perkins menyatakan bahwa satu ciri unik yang membuat kinerja perekonomian di Asia Timur berbeda dengan negara-negara berkembang lainnya mungkin lebih terletak pada ideologi atau kerangka pikiran elite-elite

¹⁵⁵ Peter H. Lindert, *op.cit.*, h. 173-4.

¹⁵⁶ Barbara Stallings, 'Introduction: Global Change Regional Response', dalam Barbara Stallings, (Ed.), *Global Change, Regional Response: The New International Context of Development*, Cambridge : Cambridge University, 1995, h. 22.

¹⁵⁷ Muhadi Sugiono, *op.cit.*, h. 174.

daripada keinginan pribadi sebenarnya yang berakar pada struktur sosial,¹⁵⁸ jadi bukan liberalisasi.

a. Peranan Pemerintah

Dalam *The East Asian Miracle* (1994) John M. Page menyatakan bahwa selain Hongkong, negara-negara Asia Timur, Jepang, Korsel, Taiwan, dan Singapura, semuanya menerapkan intervensi pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi.¹⁵⁹ Intervensi itu dalam bentuk perdagangan negara, subsidi, peraturan, dan pertimbangan lain yang mempengaruhi pasar modal, tabungan domestik, perdagangan, dan hampir di setiap aspek ekonomi. Pemerintah juga mengarahkan perdagangan swasta pada saluran yang telah ditentukan melalui pengontrolan izin industri, pinjaman luar negeri dan perjanjian teknologi, dan pemakaian insentif dan hukuman yang selektif. Oleh karena itu, tidak mungkin menyebut mereka sebagai negara liberal yang menganut teori Neo-Klasik.¹⁶⁰

Pemerintah Jepang jauh lebih banyak terlibat dalam pembangunan ekonomi daripada pemerintah negara Barat. Pada awal zaman Meiji, pemerintah telah merintis industrialisasi dengan membuat model pabrik-pabrik dan memperkenalkan teknologi mesin dari Barat. Pemerintah merupakan investor terbesar dan paling

¹⁵⁸ Dwight H. Perkins, "There Are at Least Three Models of Asian Development", *World Development*, Vol. 22, no. 4, 1994, h. 660.

¹⁵⁹ Philip Kotler, *op.cit.*, h. 56.

¹⁶⁰ M. Umer Chapra, *Islam and ...*, *op.cit.*, h. 174.

penting dalam perekonomian. Setelah PD II, pemerintah mengambil peran aktif, kontrol impor, kuota, dan valuta asing.¹⁶¹

Tentu saja intervensi ini akan lebih positif jika tidak hanya pada kontrol yang menghambat inisiatif dan gerakan sektor swasta. Akan tetapi, lebih diarahkan kepada pemberian fasilitas dan dukungan sektor swasta, serta menghapuskan ketidakmenentuan tentang kebijakan-kebijakan dan memberi inspirasi lebih banyak kepada kepercayaan pada investor.¹⁶² Menurut John Page, kebijakan campur tangan ini digolongkan ke dalam dua bagian besar: campur tangan fundamental dan selektif. Kebijakan-kebijakan kunci fundamental mencakup stabilitas ekonomi makro, sistem keuangan yang stabil dan aman, pembatasan distorsi harga, keterbukaan terhadap teknologi asing, dan investasi modal besar dalam sumber daya manusia. Di antara campur tangan selektif yang paling penting adalah kebebasan dalam memilih industri yang akan dipromosikan, dukungan kebijakan perdagangan yang mendorong kegiatan ekspor, dan pendanaan strategis (tingkat bunga yang rendah dan kredit yang terarah).¹⁶³

b. Land Reforms dan Distribusi Kekayaan

Pelaksanaan program *land reforms* dan pengurangan kepemilikan lahan kaum kaya di Jepang, Korsel, dan Taiwan setelah Perang Dunia II mempunyai dampak yang sangat luas terhadap pemerataan distribusi pendapatan di pedesaan dan

¹⁶¹Yoshihara Kunio, *Pembangunan Ekonomi Jepang*, edisi 2, terj. Pondam Guritno, Jakarta: UI press, 1992, h. 43.

¹⁶²M. Umer Chapra, *Islam and ...*, *op.cit.*, h. 175.

¹⁶³ Philip Kotler, *op.cit.*

membuat perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan semakin kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Pembentukan badan yang besar daripada petani, merubah keseimbangan kekuatan politik untuk membantu kaum tani. Karena pemerintah memerlukan dukungan mereka, maka pemerintah berkewajiban memberikan proteksi atas pertanian dan membangun infrastruktur pedesaan. Infrastruktur, bersamaan dengan pengalihan pemilikan tanah menjadikan para petani mampu memenuhi kepentingan pribadi mereka, yang selanjutnya memberikan motivasi untuk menciptakan peningkatan dan investasi jangka panjang dalam pertanian. Dengan pemilikan tanah yang sempit para petani bisa memanfaatkannya dengan baik, teknik tenaga kerja yang intensif untuk mendorong kenaikan yang penting dalam pengeluaran dan pendapatan. Hal ini bukan hanya menawarkan yang dibutuhkan melainkan juga memenuhi tabungan dan pasar yang diperlukan untuk ekspansi industri. Dengan begitu juga memungkinkan bagi mereka untuk menginvestasikan simpanannya dalam teknologi dan mesin buatan Barat. Hal ini menimbulkan sebuah ekspansi yang cepat dalam *output* industri melalui pendirian sejumlah unit perusahaan yang saling bersaing dalam meningkatkan produksi, sehingga terwujud pertumbuhan serempak dan seimbang dalam bidang pertanian dan industri.¹⁶⁴

c. Keadilan Sosial

Pertumbuhan besar yang dihasilkan oleh *Land Reforms* mengantarkan pada keadilan sosial yang lebih besar. Keadilan juga mengurangi konsumsi yang berlebihan dan investasi terkait yang dipromosikan oleh kesenjangan pendapat di

¹⁶⁴ M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. 136.

kalangan orang kaya. Sumber-sumber daya diperuntukkan memenuhi kebutuhan orang miskin dengan demikian meninggikan tingkat kesehatan dan pendidikan sebagai dasar yang kuat untuk pertumbuhan yang lebih cepat dan berkesinambungan. Pengurangan penderitaan orang miskin menghilangkan perasaan antisosial antarsesama, meningkatkan motivasi kerja dan efisiensi serta pemborosan sebagai akibat dari pemogokan dan konflik.¹⁶⁵

d. Teknik-Teknik Padat Karya

Keadilan lebih ditekankan oleh pilihan kebijakan padat karya yang telah membantu masalah pekerjaan di negara-negara tersebut. Tidak sama dengan Jepang dan Korsel, Taiwan telah memilih peranan yang efektif dengan perusahaan-perusahaan kecil di bidang pertanian dan manufaktur, dan tidak mengizinkan konglomerasi yang besar dalam bisnis domestik. Kebijakan ini tidak hanya memberikan dukungan teknik padat karya dalam mengurangi pengangguran dan kurangnya lapangan kerja, tetapi juga memberikan kelompok petani kecil berkesempatan memperoleh pendapatan di pedesaan. Taiwan telah beralih dari ekonomi yang memiliki kelebihan tenaga kerja pada tahun 1950-an kepada ekonomi yang kekurangan tenaga kerja pada tahun 1970-an. Keberhasilan mencapai *full employment* di desa dan kota menyebabkan peningkatan pendapatan seluruh keluarga dan selanjutnya meningkatnya keseimbangan pendapatan yang telah tercapai sebagai hasil dari *land reforms*. Dalam persamaan pendapatan ini Taiwan

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 177.

mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Rasio pendapatan dari 20 persen orang terkaya dari seluruh jumlah penduduk atas pendapatan 20 persen orang termiskin menurun dari 20,5 pada tahun 1953 menjadi 4,2 pada tahun 1980 dan ini bisa jadi rasio terendah di negara-negara berkembang mana pun.¹⁶⁶

e. Nilai-Nilai Budaya

Selain banyak faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Asia Timur, ideologi, nilai-nilai budaya, dan homogenitas penduduk juga dipandang sebagai bagian yang utama. Bahkan keberhasilan model pembangunan di Asia Timur ini dianggap timbul dari seperangkat kondisi yang khusus, yang mungkin tidak akan terulang di mana pun.¹⁶⁷ Lepas dari anggapan di atas, yang jelas kondisi yang ada telah membantu menciptakan kedamaian dan stabilitas sosial. Sistem nilai mereka dipusatkan pada kewajiban individu dan masyarakat yang dapat menjaga kepentingan pribadi di bawah kontrol dan melayani kepentingan sosial. Mengapa hal ini tidak terjadi sebelum perang? Salah satu faktor yang dapat menciptakan lingkungan demikian ini adalah keadilan sosio-ekonomi yang diwujudkan oleh restrukturisasi ekonomi dan politik setelah perang. Faktor lain adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam ekonomi yang buruk akibat perang. Setiap orang mengetahui secara jelas apa yang dituntut oleh rekonstruksi rasional-

¹⁶⁶ Meier, *Emerging from Poverty* (1984) h. 178. Dikutip dari Chapra, IEC, *Ibid.*, h. 178.

¹⁶⁷ Philip Kotler, *op.cit.*, h. 64.

ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya. Kesadaran ini memberikan nilai-nilai budaya yang mengikat mengenai kehidupan yang sederhana dan penahanan diri dari konsumsi yang mencolok. Dengan demikian, semuanya tanpa kecuali, keluarga-keluarga individual untuk hidup sangat hemat. Hal ini membantu konsumsi yang moderat dan meningkatkan tabungan. Tabungan domestik kotor sebagai persentase dari GDP adalah 33,4 ; 30,7 ; 39,9 ; 37,6 ; dan 37,0 persen di Jepang, Hongkong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan pada tahun 1987 dibandingkan dengan rata-rata 19,8 persen untuk Amerika Latin dan Karibia, 13,0 persen untuk Sub-Sahara Afrika, 17,0 persen untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, dan 13,9 untuk Asia Selatan.¹⁶⁸



Melihat kenyataan ini, wajar kalau Jepang kemudian menjadi Bankir Dunia, menduduki peringkat pertama dalam sistem keuangan. Karena, Jepang telah menabung bagian lebih besar dari pendapatannya. Tabungan berarti akumulasi aset atau pengurangan utang. Akumulasi aset Jepang telah sedemikian besar, sehingga dominasinya terhadap sistem keuangan dunia sulit dipungkiri. Pada akhir tahun 1980-an pembelian aset Jepang melaju dengan cepat meliputi hampir semua aset di dunia.¹⁶⁹

Tabungan yang tinggi sangat membantu terhadap keberhasilan ekonomi di negara-negara tersebut, karena akan menjaga suku bunga di negara-negara tersebut

¹⁶⁸ M. Umer Chapra, IEC *op.cit.*, h. 178.

¹⁶⁹ Peter H. Lindert, *op.cit.*, h. 9.

relatif lebih rendah daripada negara-negara lain, sehingga sangat mendorong investasi. Di samping itu juga negara-negara tersebut tidak bersandar kepada ekspansi moneter dan kredit serta pinjaman luar negeri yang besar yang tidak semestinya. Oleh karena itu inflasi menjadi terkontrol dan meningkatkan persaingan di pasaran ekspor.¹⁷⁰

f. Kontrol Impor dan Promosi Ekspor

Ketika nilai-nilai sosial mendukung meningkatkan tabungan di negara-negara tersebut, hal ini juga kondusif bagi pengendalian impor yang kurang penting. Di negara-negara berkembang lainnya kebutuhan nasional yang sah ini telah dipenuhi oleh bea impor yang tinggi dan kontrol pertukaran yang ketat yang menimbulkan penyelundupan, *under-invoicing* dan korupsi. Di dalam konsensus nonlegal masyarakat di negara-negara ini, kebutuhan telah dipenuhi oleh norma-norma sosial yang tidak mungkin ditinggalkan tanpa ada hukuman dari masyarakat. Karena itu, ketika ekonomi tersebut memungkinkan untuk berorientasi ke luar, hubungan keluar itu tetap dalam hal ekspor dan bukan impor, meskipun tidak adanya kontrol impor yang ketat bisa membuat ekonomi tersebut tampak demikian. Pada tahun 1983, tingkat bea rata-rata di Jepang 4,5 persen untuk impor yang dikenakan bea cukai dan 2,5 persen untuk seluruh impor, lebih rendah dari Amerika dan Eropa.

¹⁷⁰ M. Umer. Chapra, IEC, *op.cit.*, h. 179.

Bahkan pada tekstil dengan biaya 13,8 persen masih lebih rendah dari Amerika yang 22,7 persen dan demikian juga di Eropa.¹⁷¹

Pada mulanya negara-negara ini memang memilih proteksi ketat, baru kemudian meninggalkan substitusi impor menuju promosi ekspor, tetapi tanpa perubahan yang berarti dalam filsafat pembangunan. Seluruh ekonomi tetap diorganisasi untuk meminimalkan impor barang-barang yang tidak penting.¹⁷² Kalau diamati, sebagian besar contoh-contoh sejarah dari Jerman dan Amerika Serikat sampai Jepang telah melibatkan proteksi. Bahkan dewasa ini, semua negara tersebut mengambil jalan proteksi yang ketat berkenaan dengan industri dan pertanian. Oleh karena itu, mereka meminta negara-negara berkembang untuk melakukan apa yang belum dan tidak dilakukan oleh negara-negara maju adalah saran yang tidak realistis.¹⁷³

g. Pengeluaran untuk Pertahanan yang Rendah

Di Jepang, pengeluaran untuk militer telah diturunkan hingga kurang dari satu persen GNP dibandingkan dengan rata-rata 4 persen di negara-negara industri dan sekitar 3 persen di negara-negara berkembang. Pengurangan ini justru membuat

¹⁷¹ "An Open and Shut Case", dalam "Japan: A Survey", *The Economist*, 7 Oktober 1985, 1.20.

¹⁷² Dengan demikian negara-negara Asia Timur meskipun lebih sering berorientasi keluar, tidak bisa begitu juga dikatakan telah berhasil berkat kesetiaan mereka mendukung perdagangan bebas. Karena mereka bukan sepenuhnya penganut perdagangan bebas, mereka juga menerapkan strategi substitusi impor yang berbau proteksionis, sehingga keberhasilan mereka bukan semata-mata dari prinsip pasar bebas. MP. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, *op.cit.*, h. 55.

¹⁷³ M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. 179-180.

pembangunan infrastruktur lebih efisien. Dan, juga membantu mempertahankan pajak pada tingkat yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Jepang, pajak merupakan 21 persen GDP pada tahun 1975 dan 31,3 persen pada tahun 1988 dibandingkan dengan 33 persen dan 40,8 persen secara berurutan di MEE. Dibandingkan dengan Jepang, Taiwan dan Korsel relatif lebih tinggi pengeluarannya dalam bidang militer, beban pajak negara-negara tersebut telah berkurang dengan bantuan asing, khususnya dari Amerika Serikat.¹⁷⁴

Demikianlah beberapa faktor telah berperan penting dalam pertumbuhan yang cepat di negara-negara ini, khususnya dalam mengurangi konflik tujuan antara pertumbuhan dan keadilan. Karena itu, tidak benar untuk menghubungkan keberhasilan ini dengan hanya liberalisasi, meskipun liberalisasi juga berperan penting untuk meningkatkan promosi ekspor. Berkenaan dengan keberhasilan ini, ada pertanyaan penting, mungkinkah negara-negara Asia Timur mempertahankan keadilan yang dulu pernah mereka realisasikan karena kondisi-kondisi tertentu? Beberapa faktor yang telah mengurangi ekuiti di negara-negara tersebut memberikan jawaban yang relatif.

Di Korea Selatan yang menerapkan konglomerasi yang dijalankan oleh keluarga besar (*Chaebol*) dalam bidang industri telah menyebarkan benih-benih disparitas pendapatan, konsumsi yang mencolok dan persaingan industri. Dari tahun 1981 ke 1985, hanya ada 100 pemogokan kerja dalam setahun. Pada tahun 1986, ada

¹⁷⁴ *Ibid.*, h. 181.

276 pemogokan. Pada tahun 1987 jumlah pemogokan melonjak menjadi 3008.¹⁷⁵ Begitu juga di Jepang, ramalan tentang masa depan adalah naiknya ketidakadilan secara perlahan. Pembuatan Zaifatsu (keluarga yang mengontrol kelompok-kelompok perusahaan monopolistik, misalnya, mitsui, mitsubishi, sumitomo dan yasuda). Setelah perang bersamaan dengan *land reforms* menyebarkan kekuatan ekonomi yang merata ke semua rakyat, menjadikan kelompok rakyat kecil, kesulitan untuk mendominasi ekonomi dan politik nasional. Hal ini menumbuhkan perdagangan kelas kecil dan menengah dan menciptakan persaingan yang hebat di seluruh industri. Bagian terbesar dari tabungan juga beralih ke bursa efek dan spekulasi tanah dan menaikkan saham dan nilai tanah, dengan begitu memberikan momentum kepada *trend* yang ada ke arah pemusatan.¹⁷⁶

Meskipun negara-negara ini mulai membangun setelah perang dengan persamaan yang relatif dan memenuhi kondisi-kondisi dasar untuk pertumbuhan dan keadilan, mereka merasa sulit untuk mempertahankan keadilan sosio-ekonomi dalam kerangka kerja ekonomi kapitalis dan sistem keuangan yang berlaku di negara-negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sekiranya ketidakadilan bisa diminimalkan sejak awal oleh situasi yang tidak biasa, mereka akan muncul kembali dan akan mengarah pada pemusatan kekayaan, kecuali kalau seluruh ekonomi direstrukturisasi dan sistem keuangan direorganisasi yang akan dapat membantu

¹⁷⁵ *Ibid.*, h. 182

¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 182-83.

mempertahankan dan meningkatkan *equity*.¹⁷⁷ Tentang hal ini akan dibahas pada bab berikutnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 185.

BAB V

KE ARAH SISTEM YANG BERKEADILAN : PERSPEKTIF CHAPRA

Bab ini merupakan alternatif yang ditawarkan oleh Chapra tentang sebuah sistem ekonomi pembangunan yang berorientasi kepada keadilan. Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi dua subbab.

Subbab pertama adalah tentang prinsip dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah mekanisme kebijakan. Dalam hal ini akan dibahas pandangan Chapra terhadap fungsi negara, dan pendekatan komprehensif Islam yang ditawarkannya.

Subbab kedua adalah dimensi kebijakan yang merupakan aplikasi dari pendekatannya yang komprehensif. Di sini akan dibahas lima dimensi kebijakan, *pertama*, adalah *pembangunan faktor manusia*. Di sini akan dibahas pentingnya manusia dalam pembangunan. Untuk itu harus ditumbuhkan hal apa saja yang dapat memotivasi manusia untuk dapat turut aktif dalam pembangunan. Dalam hal ini penghargaan diri, kebebasan tanpa tekanan serta menumbuhkembangkan kemampuan menjadi yang ditekankan.

Kebijakan kedua adalah *mengurangi pemusatan kekayaan*. Di sini akan dibahas kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kebijakan *land reforms*, pengembangan usaha-usaha kecil, dan fungsionalisasi sistem zakat dan waris.

Ketiga adalah kebijakan *restrukturisasi ekonomi*. Untuk yang pertama Chapra mengharuskan adanya sistem *filter* moral yang dapat mengendalikan perilaku

seorang konsumen. Selanjutnya, reformasi keuangan publik yang menyangkut kebijakan fiskal, kemudian meningkatkan iklim investasi, reformasi pertanian, serta mengurangi pengangguran.

Keempat adalah *restrukturisasi keuangan*. Di sini akan dibahas pentingnya sebuah lembaga keuangan, dengan meluruskan tujuan dan fungsinya dalam pembangunan, yaitu sebagai penengah yang adil dan perantara yang efisien.

Kelima adalah *perencanaan kebijakan strategis*. Di sini akan dikemukakan hal-hal yang dapat memberikan arah yang harus dilakukan dari kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan dengan tidak mematikan kreativitas dan respons masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri.

A. Prinsip Dasar

1. Fungsi Negara menurut Chapra

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Semua aspek tersebut saling terkait, sedangkan pandangan hidup Islami merupakan kesatuan yang utuh, maka tujuan dan nilai pada satu bidang kehidupan akan menentukan tujuan dan nilai pada bidang lainnya.

Pandangan hidup Islam yang berorientasi pada tujuan ini menurut Chapra tidak dapat tegak tanpa terbentuknya suatu komunitas yang diatur sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya organisasi dan kekuasaan dalam masyarakat. Penekanan itu tampak sekali baik dalam berbagai pernyataan Rasulullah maupun perilaku para sahabat dan dalam berbagai pemikiran para fuqaha. Umar, Khalifah kedua, menegaskan bahwa tidak ada masyarakat yang terorganisasi jika

tidak ada imam (yang berdaulat) dan tidak ada imam tanpa ada ketaatan. Ulama terkenal Imam Syafi'i (150-204 H.) menyatakan, terhadap konsensus (*ijma'*) di kalangan umat Islam, bahwa harus ada seorang khalifah. Demikian pula imam Hambali yang mengatakan bahwa tidak adanya imam akan berakibat pada kegaduhan.¹

Hal ini juga dinyatakan oleh ulama besar panutan para kaum “modernis” Ibnu Taimiyah. Ia mengatakan keharusan sebuah keadilan ditegakkan oleh negara sekalipun bukan negara Islam :

Tuhan mendukung kekuasaan yang adil meskipun kafir, dan tidak mendukung kekuasaan yang zalim meskipun Islam. Dunia akan tetap bertahan dengan keadilan sekalipun kafir, dan tidak akan bertahan dengan kezaliman sekalipun Islam.



Allah juga mengisyaratkan perlu adanya sistem organisasi untuk mencapai tujuan dalam hidup bersama :

*Sesungguhnya Allah menyukai mereka yang berperang di jalan-Nya dengan membentuk barisan seakan mereka itu sebuah bangunan yang kokoh.*³

Bangunan yang kokoh adalah sebuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling menopang. Karena itu mengandung ide tentang pembagian kerja atau organisasi, dan lebih luas lagi adalah sistem negara.

¹ M. Umer Chapra “Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophiaan (Ed.), *Etika Ekonomi Politik*, Surabaya : Risalah Gusti, 1997, H. 23.

² Dikutip dari Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1995, 258.

³ Q.s. Ash-Shaf (61) : 4.

Chapra memandang bahwa negara dalam Islam adalah salah satu instrumen untuk merealisasikan tujuan akhir; spiritual dan material masyarakat Islam. Akan tetapi, kekuasaan yang disandang negara tidaklah mutlak. Kekuasaan adalah amanat Allah swt. Dan, ia harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak syariah. Amanat itu oleh Chapra diwujudkan dalam bentuk *demokratis* dan *kemakmuran* baik spiritual maupun material.⁴

a. Orientasi Demokratis

Demokrasi menurut Chapra harus diorientasikan kepada kedaulatan Allah swt., yang berarti berlakunya semua hukum dalam perspektif Islam. Sebab hanya Allahlah yang memiliki kedaulatan itu, sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an :

Bukankah Dia yang menciptakan sekaligus memerintah.⁵ Kedaulatan bukanlah untuk siapa pun kecuali Allah.⁶ Ikutilah wahyu yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jangan engkau jadikan sesuatu pun sebagai teman maupun pelindung, kecuali Dia.⁷

Manusia harus sadar untuk mengabdikan bilamana manusia mengerti bahwa Allah adalah puncak kebijaksanaan sekaligus pemandu terbaik manusia dengan seluruh urusannya. Berdasarkan hukum Allah, manusia yang tunduk kepada-Nya berarti telah menjalankan ajaran-Nya. Karena itu, begitu kedaulatan Allah diakui, kemampuan untuk mengamalkan merupakan tanggung jawab umat. Ia harus dilaksanakan sesuai dengan al-Qur'an dan Sunah melalui proses musyawarah dengan

⁴ M. Umer Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi", dalam Ainur R. Sophiaan (Ed.), *Etika Ekonomi Politik*, Surabaya : Risalah Gusti, 1997, H. 25.

⁵ Q.s. al-A'raaf (7): 54.

⁶ Q.s. Yusuf (12): 40.

⁷ Q.s. al- A'raaf (7): 3.

umat secara demokratis (wakil-wakilnya yang bijak) sebagaimana dikemukakan dalam al-Qur'an :

Dan Bermusyawarahlah dalam berbagai masalah.⁸ Dan mereka melaksanakan semua urusannya dengan cara musyawarah.⁹

Dengan demikian, Chapra tidak menghendaki adanya sistem pemerintahan yang bersifat totaliter dan masyarakat yang menerapkan *laissez faire*. Bagaimana pun demokrasi harus mencerminkan peran negara yang positif dalam memantapkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, tidak boleh bertindak sewenang-wenang, ia harus tetap berada dalam batas-batas *syariah* dan melalui suatu saluran demokrasi dari konsultasi (syura).¹⁰ Kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada tujuan-tujuan *maqashid* harus menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun swasta.



b. Komitmen Kemakmuran (kesejahteraan)

Misi Rasulullah digambarkan dalam al-Qur'an sebagai pembawa *rahmat* bagi seluruh umat manusia. Beberapa perwujudan sifat ini dinyatakan secara jelas dalam Islam. Misalnya perlunya kehidupan sejahtera (*hayat thayyibah*) dan kesejahteraan (*falah*), sikap ramah dan keras, generasi yang makmur, mendidik dalam suasana penuh cinta dan kasih sayang, jaminan keamanan dari bahaya korupsi, kelaparan, ketakutan dan tekanan mental. Karena itulah semua lembaga

⁸ Q.s. Ali Imran (3): 159.

⁹ Q.s. Asy-Syura (42): 38.

¹⁰ M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. 223.

organisasi, termasuk negara harus mencerminkan sifat *rahmatan* dan harus melahirkan kesejahteraan bagi semua manusia. Inilah yang tergambar dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Umar, khalifah kedua pernah mengirim surat kepada salah satu gubernurnya :

*Sebaik-baik penguasa adalah yang dapat memakmurkan masyarakatnya. Sebaliknya, sejelek-jelek penguasa adalah yang menyengsarakan masyarakatnya.*¹¹

Dalam memandang kesejahteraan, Chapra kembali kepada fitrah manusia yang komprehensif. Manusia diciptakan dari dua unsur materi dan ruh yang semuanya saling melengkapi. Materi dan ruh membentuk bersama-sama jati diri manusia yang bebas, namun bertanggung jawab di depan Allah atas semua tindakannya. Tugas manusia adalah melaksanakan kewajiban sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mencapai tingkat kedirian yang lengkap (spiritual ataupun material) selaras dengan statusnya sebagai khalifah dan memberikan kontribusi yang optimal kepada umat dan seluruh manusia. Dengan demikian, konsep kesejahteraan tidak semata-mata *ukhrawi* atau *duniawi*. Melupakan salah satu atau kedua aspek kehidupan tadi akan menghalang-halangi tercapainya kesejahteraan sejati.¹²

Selanjutnya, Chapra menegaskan bahwa kesejahteraan individu dalam masyarakat Islam dapat terealisasi bila ada iklim yang cocok bagi: (1) pelaksanaan nilai-nilai

¹¹ Dikutip dari M. Umer Chapra, dalam Ainur R. Sophiaan, (Ed.), *op.cit.*, h.27.

¹² *Ibid.*, h. 28.

spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu ataupun masyarakat, (2) pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup.¹³

1) Peningkatan Spiritual

Untuk merealisasikan nilai-nilai spiritual Islam dalam pribadi dan masyarakat, sebuah negara Islam harus berjuang keras menuju ketiga arah. *Pertama*, harus diciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknya rumah tangga yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan moral bagi generasi baru. *Kedua*, negara Islam harus berusaha menciptakan suatu sistem pendidikan yang dijiwai dengan semangat Islam sehingga melahirkan pemuda dan pemudi yang disinari dengan cita-cita Islam. *Ketiga*, Islam harus menegakkan nilai-nilai dan norma Islam berupa penegakan hukum (*legal enforcement*) serta menghukum para pelanggar sedemikian rupa, sehingga membuat jera bagi calon pelanggar berikutnya.

2) Kesejahteraan Material

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Islam menganggap sama pentingnya antara kebutuhan material dan spiritual. Beberapa kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi menurut Chapra adalah :

- (1) Pelatihan dan pendidikan yang mengembangkan kepekaan jiwa seseorang serta memungkinkannya untuk secara independen memenuhi kesejahteraan tanpa menjadi beban orang lain.
- (2) Pekerjaan, profesi, atau perdagangan yang sesuai dengan sikap, kemampuan, ambisi dan kebutuhan masyarakat sedemikian rupa,

¹³ *Ibid.*, h. 30-34.

sehingga ia dan masyarakat dapat menikmati hasil kemampuan dan pelatihannya.

- (3) Sandang atau pakaian yang cukup.
- (4) perumahan yang nyaman.
- (5) Lingkungan yang sehat disertai fasilitas kesehatan yang layak.
- (6) Fasilitas transportasi yang cukup sehingga memungkinkan setiap pekerja cocok dengan tempat kerjanya tanpa adanya keresahan yang tidak masuk akal. Selain itu, ia juga mampu menghasilkan produk untuk dipasarkan dengan harga pantas.

Pentingnya pemenuhan kebutuhan material dan spiritual individu ataupun masyarakat tersebut mengharuskan sebuah negara Islam untuk menerapkan sistem Ekonomi Islam. Apa pun peran negara tujuannya adalah untuk mendorong individu dan masyarakat untuk berbuat seoptimal optimalnya dalam mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual. Islam sangat melarang sikap-sikap malas, menerima nasib tanpa usaha untuk menuju perbaikan. Sebaliknya, Islam menekankan kerja keras dan memusuhi praktik-praktik mengemis dan meminta-meminta. Sehingga, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh negara bukan berarti membuat rakyat selalu tergantung kepadanya. Bagaimanapun harus diupayakan untuk menjadikannya mandiri membangun ekonominya.

Beberapa asumsi dasar di atas inilah yang mendasari ide-idenya tentang keharusan Islamisasi segala tatanan ekonomi kontemporer, tentunya menyangkut segala tatanan kehidupan, ekonomi, sosial, dan politik.

2. Pendekatan Komprehensif

Kenyataan mengatakan bahwa strategi-strategi yang didasarkan pada *Enlightenment* yang sekuler telah gagal mewujudkan tujuan-tujuan efisiensi dan keadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemakmuran yang meningkat bagi banyak orang telah membuat orang lain tertinggal dan tersisih. Dua puluh negara terkaya di dunia telah mengalami peningkatan kemakmuran yang stabil sejak tahun 1980. Kira-kira seperempat populasi dunia hidup dalam negara-negara ini. Stagnasi ekonomi, atau bahkan penurunan absolut, telah menjadi ciri dari banyak masyarakat miskin. Kira-kira 30 persen dari populasi dunia hidup dalam garis kemiskinan. Wilayah Afrika sebelah selatan Sahara, kecuali Afrika selatan, merupakan wilayah kontinen yang tersisih. Bahkan di kalangan negara miskin pun terdapat eksklusi di tingkat atas. Kelompok-kelompok kecil elite, kadang-kadang amat kaya, hidup dalam keterisolasian fisik dan kultural dari sejumlah besar mayoritas. Disparitas inilah yang selalu menjadi isu dunia, dan tidak habis-habisnya. Sementara itu, banyak orang yang terjerumus ke dalam pandangan bahwa pada akhirnya segala sesuatunya akan berjalan dengan baik.¹⁴

Dari kegagalan teori-teori pembangunan Barat yang menimbulkan ketidakpuasan khususnya di negara-negara dunia ketiga,¹⁵ maka tidak ada alasan bagi negara-negara muslim untuk menjadikannya model yang akan diterapkan. Oleh

¹⁴Lihat Anthony Giddens, *Jalan Ketiga*, terj. Ketut Arya Mahardika, Jakarta : Gramedia, 2000, h. 176-177.

¹⁵Teori ekonomi pembangunan barat menganggap kekayaan dan keuntungan sebagai indikator kemajuan, sedangkan nilai pembangunan itu sendiri telah gagal memenuhi kebutuhan pokok manusia, Anwar Ibrahim, "Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat", dalam Anwar R Sophiaan (ed), *Etika Ekonomi Politik*, Surabaya : Risalah Gusti, 1997, h. 66.

karena itu, negara-negara muslim perlu mengambil suatu sistem tersendiri yang dapat memberikan semua unsur yang perlu untuk kesejahteraan manusia sesuai dengan tuntutan persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi. Sistem ini harus mampu tidak hanya memberantas ketidakseimbangan, tetapi juga mewujudkan suatu realokasi sumber-sumber daya sedemikian rupa, sehingga tujuan-tujuan efisiensi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan. Ia juga harus mampu mendorong para partisipan untuk mematuhi prinsip-prinsipnya dan berbuat sebaik-baiknya bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan juga masyarakat. Sistem ini harus mampu menciptakan suatu lingkungan positif melalui restrukturisasi sosio-ekonomi yang menyeluruh bukan parsial.¹⁶ Targetnya adalah kesehatan sosial yang terpancar dari dalam kesadaran manusia, disertai dengan keadilan dan keterbukaan pada semua tingkat interaksi manusia. Kesehatan semacam ini hanya bisa dicapai dengan transformasi moral dari setiap individu dan masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, perlu ada adaptasi melalui reformasi politik, ekonomi, dan sosial sehingga tidak ada individu atau kelompok yang dapat mengambil manfaat yang tidak semestinya dengan cara melanggar prinsip-prinsip dasar sistem ini.

Karena yang dihadapi adalah masyarakat yang kompleks, sulit menyatukan kepentingan individu dan sosial dan mewujudkan tujuan-tujuan sosial, menurut Chapra, tanpa suatu pendekatan yang komprehensif tidak mungkin ada strategi yang

¹⁶M. Umer chapra, *Islam and the Economic Challenge (IEC)*, *Op.cit.*, h. 199.

¹⁷M. Umer Chapa, *Al Qur;an menuju Sistem Moneter yang Adil*, *Op.cit.*, h. xxv.

efektif.¹⁸ Yang ada hanyalah adonan dari kebijakan-kebijakan yang tidak serasi, yang diciptakan dengan cara mengompromikan dengan tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari kelompok-kelompok pluralis dan kelas-kelas sosialis. Sikap yang komprehensif ini selaras dengan pandangan Islam yang seimbang antara unsur material dan spiritual, antara dunia dan akhirat.¹⁹ Tidak ada pemisahan atau anggapan bahwa yang satu lebih penting sehingga mengabaikan yang lain. Berbeda dengan Barat, yang memisahkan antaraktivitas ekonomi dan agama. Seolah-olah berlaku *adagium* “bisnis adalah bisnis, agama adalah agama, keduanya harus dipisahkan”.²⁰ Inilah di antara yang mendasari pemikiran mengenai sekularisme yang berlaku di bidang ilmu pengetahuan, politik dan ekonomi.

Sebagian ada yang beranggapan bahwa strategi Islam hanya didasarkan pada tiga hal : norma-norma perilaku, zakat, dan pengharaman. Ketiga hal ini bukanlah merupakan keseluruhan sistem ekonomi Islam, meskipun berperan penting dalam restrukturisasi ekonomi. Ketiga hal ini bisa efektif jika didukung dan diperkuat oleh mekanisme filter yang tepat, sistem motivasi yang kuat, restrukturisasi yang efektif, dan peranan positif pemerintah. Tanpa dukungan ini semua, ketiga hal ini tidak mampu memikul beban tanggung jawab untuk mewujudkan *maqāṣ id*. Keterkaitan ini diibaratkan oleh Chapra seperti manusia yang terdiri dari organ-organ tubuh berupa fisik dan nonfisik. Tidak satu pun dari

¹⁸M. Umer Chapra, *IEC, Op.cit.*, h. 225.

¹⁹Ini berarti dalam Islam, pembangunan tidak dibatasi semata-mata dalam bidang ekonomi secara terpisah dengan persoalan moral dan keadilan. Ia harus merupakan proses yang menyeluruh, yang melibatkan multi dimensional, Anwar Ibrahim, *Islam, Pembangunan, Keadilan sosial*, Surakarta : Hapsara, 1982, h. 35.

semua organ membentuk manusia jika dipisahkan. Sebagaimana juga ramuan yang terpisah dari keseluruhan resep, tidak akan memberikan rasa, aroma, dan warna suatu makanan, tidak peduli betapa pentingnya ramuan tersebut dalam resep itu. Dan, yang tak kalah pentingnya juga faktor norma-norma keyakinan dalam mentransformasikan manusia dan memotivasi mereka untuk bertindak dengan suatu sikap yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Kenyataannya, tanpa suatu keyakinan dan norma-norma semacam itu, tidak ada sistem yang dapat bertahan, tanpa memandang apakah tangan yang terlihat atau tidak itu membimbingnya.²¹

Banyak kajian yang menghubungkan keyakinan ini dengan sikap dan perilaku ekonomi. Tesis Weber yang membuktikan bahwa etik protestantisme turut memberi saham terhadap perkembangan kapitalisme dan revolusi industri menarik perhatian luas. Tawney ikut mengembangkan tema ini dan Robert N. Bellah berusaha mencari pola hubungan yang serupa antara agama Tokugawa dan Kebangkitan Kapitalisme Jepang. Karl Marx dalam membahas berbagai aspek ekonomi, juga tidak luput melihat agama. Di Asia para sosiolog ikut disibukkan dalam membuktikan tesis Weber dalam konteks agama-agama penduduk Asia, seperti Islam, Konfusianisme, Hindu, dan Budha.²²

Bagaimanapun, di negara yang mengalami penipisan berat dalam hal norma-norma keyakinan, tidak cukup mampu memotivasi kebanyakan individu

²⁰Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1990. h. 28

²¹M. Umer Chapra, *IEC*, *op.cit.*, h. 225-26.

²²Dawam Rakarjo, *op.cit.*, h. 29, lihat RH. Tawney, *Religion and Rise of Capitalism*, Penguin Book, 1977, Delos B. Mc Kown, *The Classical Marxist Intiques of Religion: Marx, Engels, Lenin*, Kanis Kg, Martinus Nijhoff (1975)

untuk menjaga kepentingan pribadi mereka dalam batas-batas kesejahteraan sosial sejauh ia perlu untuk mewujudkan kualitas restrukturisasi yang diperlukan guna mewujudkan keadilan sosio ekonomi. Oleh karena itu, tidak ada satu pun yang tidak penting, semuanya merupakan bagian dari suatu reorganisasi total sosio-ekonomi dan potensi penuh, mereka tidak berarti jika diamalkan secara terpisah. Oleh karena itu, program Islam harus diterima dan diterapkan secara keseluruhan, bukan sepotong-potong agar benar-benar efektif dalam rangka mencapai tujuan-tujuan.²³

Al-Qur'an menegaskan :

*Hai orang-orang yang beriman! Masuk Islamlah kamu dengan keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata.*²⁴



B. Dimensi Kebijakan

1. Pembangunan Faktor Manusia

a. Motivasi

Pertumbuhan pesat negara-negara Asia Timur sejak tahun 1970-an, dan terutama selama tahun 1980-an, kemudian melahirkan paradigma baru yaitu bahwa yang tidak kalah penting, bahkan lebih penting daripada akumulasi modal fisik adalah akumulasi modal manusia, terutama kualitas sumber daya manusia yang meningkat melalui pendidikan dan perbaikan kesehatan. Setelah banyak kajian mengenai ini, kebijakan ekonomi pun bergeser dengan memberikan prioritas utama pada pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci pertumbuhan ekonomi

²³M. Umer Chapra, *Islam and*, op. cit., h. 226.

²⁴Q. s. al Baqarah (2) :208.

yang pesat dan berkesinambungan.²⁵ Alex Inkeles dan David H. Smith menempatkan manusia sebagai komponen penting dari pembangunan dan merekomendasikan pendidikan sebagai sarana yang paling efektif untuk membentuk manusia modern.²⁶ Para ekonom kemudian menjadikan sumber daya manusia sebagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat usaha-usaha pembangunan suatu negara.²⁷

Bagaimanapun, memang pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia. Permasalahannya adalah bagaimana menciptakan kondisi lingkungan, baik lingkungan politik maupun budaya yang bisa mendorong manusia kreatif. Dalam hal ini yang ditekankan adalah faktor-faktor nonmaterial, seperti adanya rasa aman, rasa bebas dari ketakutan, dan sebagainya.²⁸ Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berhubungan dengan *infrastruktur* tetapi juga *suprastruktur*. Sehingga, manusia tidak hanya dilihat sebagai faktor produksi yang penekanannya pada peningkatan produksi saja, atau masalah manusia tidak hanya masalah teknis untuk meningkatkan keterampilan melalui bermacam-macam sistem pendidikan.

Yang dibutuhkan menurut Chapra adalah kebangkitan moral dari setiap individu dengan suatu ideologi yang mengubah semua pandangannya terhadap

²⁵Suhadi Mangkusuwondo, *op.cit.*, h. 156

²⁶Arif Hartono, *op.cit.*, h. 74.

²⁷B.S. Muljana, *op.cit.*, h. 365.

²⁸Arif Budiman, *op.cit.*, h. 14. Lihat Michael M. Cernea (Ed.) *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan : Variabel-variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan*, Jakarta : UI Press, 1988, h. 446. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dari 68 proyek yang tidak menekankan

kehidupan dan motivasi untuk berbuat secara benar sesuai dengan nilai-nilai internal tertentu. Ideologi harus mendorong persaudaraan dengan membuat semua individu secara sosial mempunyai kedudukan yang sama dan membuang ketidakadilan sosio-ekonomi serta ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Ideologi itu juga harus mampu menawarkan sistem ekonomi yang adil dan manusiawi, yang memperbaiki harga diri menjadi manusia, menyediakan pekerjaan dan standar kehidupan yang dapat diterima. Ideologi mestinya mampu menciptakan suatu lingkungan sosial yang mengurangi ketamakan akan konsumsi, korupsi, dan pemborosan, serta mendorong keseimbangan tuntutan dan penawaran akan sumber daya. Ideologi juga mengarahkan semua sumber daya nasional untuk produksi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi keseimbangan kebutuhan antara kepentingan individu dan nasional tanpa mendorong akibat-akibat negatif.²⁹

Kebijakan-kebijakan itu harus diarahkan kepada :

- 1) Menjamin kepentingan individu seimbang dengan kepentingan sosial, disertai penerapan nilai-nilai moral dan restrukturisasi sosio ekonomi sehingga individu tidak mungkin dapat memenuhi kepentingan pribadinya, kecuali dalam batas-batas keadilan sosio ekonomi.³⁰ Hal ini untuk menumbuhkan inisiatif, motivasi,

rancangan sosial (tidak mengutamakan manusia), 36 (53 %) mengalami kegagalan atau tidak mencapai tujuan yang seharusnya dicapai (belum termasuk keadilan dan efisiensi).

²⁹ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang adil*, *op.cit.*, h. xxxi.

³⁰ Ini tidak sesuai dengan konsep sosialis dan kapitalis yang tidak realistis memandang kepentingan individu dan sosial. Lihat kegagalan sosialis dan kapitalis dalam bukunya Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, *op.cit.*, h. 17-107, "The Capitalis Chaos", dalam Syaikh Mahmud Ahmad, *Economics of Islam*, Pakistan : SH. Muhammad Ashraf, 1952, h. 1-17, lihat juga "The Unsocial Socialisme", h. 45-77.

dan efisiensi yang menurut Chapra gagal diwujudkan oleh ekonomi sekuler.

- 2) Membangun infrastruktur di kawasan pedesaan, untuk mendorong pertanian dan perusahaan-perusahaan kecil dan mikro (*Small and Micro Enterprises, SMEs*).

Ini untuk mengurangi pemungutan kekayaan di perkotaan yang berakibat kepada berpindahnya tenaga kerja dalam jumlah besar ke kota. Bagaimanapun masalah urbanisasi ini juga menjadi perbincangan serius di kalangan para ekonom, menandakan dampaknya yang tidak bisa dianggap ringan.³¹

- 3) Keadilan sosio ekonomi harus menjadi tujuan dari segala kebijakan. Ketika imbalan materi tidak diberikan sepantasnya bagi kerja keras, kreativitas dan sumbangan kepada output, maka akan menyebabkan rakyat apatis, dan menurunkan inisiatif, motivasi dan efisiensi. Inilah di antaranya yang mengantarkan sosialis pada kehancuran, begitu juga kapitalis. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang bias dan tidak realistis, serta usaha-usaha yang mengarah kepada pemusatan kekayaan pada segelintir orang, baik di desa maupun di kota harus dihilangkan seperti konsentrasi struktur industri yang sangat *oligopolistik* dan *monopolistik* yang merugikan *public interest*.³² Tidak mendasarkan kebijakan pada *betting on the strong*, dasar yang lebih menguntungkan golongan kaya di kota atau desa, sebagaimana yang disebut oleh

³¹Pada mulanya gejala perpindahan tenaga kerja ini tidak ada masalah. Tapi bagaimana jika surplus laba para pemilik modal diinvestasikan kembali dalam bentuk peralatan yang hemat tenaga kerja (Labor-saving). Dan bagaimana juga jika semua tambahan pendapatan dan pertumbuhan output didistribusikan hanya kepada beberapa gelintir pemilik modal sedangkan tingkat pendapatan sebagian besar pekerja tidak berubah sama sekali. Lihat teori Lewis dan Kritik terhadapnya, dalam, Lincoln Arsyad, *op.cit.*, h. 279-283.

³²Lihat industrialisasi yang timpang dalam, Saeful Arif, *op.cit.*, h. 236.

WF. Wartheim dalam *East-West parallels sociological Approaches to Modern Asia* (1964). Akan tetapi perlu ditekankan pada *betting on the Many*, untuk menjadikan mereka kuat.³³

- 4) Reformasi tenaga kerja dengan menghilangkan perilaku-perilaku majikan yang tidak manusiawi terhadap para pekerja. Hubungan antara majikan dan pekerja adalah hubungan antarkeluarga yang saling menghormati. Gaji riil secara ideal setidaknya dengan para pekerja dapat memenuhi semua kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya secara wajar. Termasuk juga hak-hak lainnya seperti jaminan keamanan pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan efisien.³⁴ Meskipun demikian, bukan berarti para pekerja bebas melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Bagaimanapun Islam memerangi kegiatan antisosial pekerja dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, kompromi antara majikan dan pekerja menjadi sangat penting. Dan, jika para pekerja dan majikan diresapi nilai-nilai Islam, larangan terhadap pemogokan dan ditutupnya tempat-tempat kerja, menjadi tidak perlu. Jadi, persoalannya bukan bagaimana melarang atau membatasi pemogokan melainkan bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam antara pekerja dan majikan.³⁵

Untuk mengurangi eksploitasi dan meningkatkan produktivitas pekerja serta memperluas peluang baik di desa maupun di kota maka kebijakan-kebijakan

³³Anwar Ibrahim. *Islam, Pembangunan, Keadilan Sosial*, *op.cit.*, h. 35.

³⁴M. Umer Chapra, *Islam and...*, *op.cit.*, h. 253.

³⁵MA. Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 117.

yang ada harus meliputi : (a) pemberian pelatihan kejuruan yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas, (b) perluasan fasilitas keuangan untuk meningkatkan SMEs, dan (c) restrukturisasi seluruh ekonomi dengan mendukung program pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan yang lebih adil. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan ini harus diarahkan kepada kebijakan membuat pembagian laba dan rencana pemilikan stok pekerja (*Employee Stock Ownership Plan*, ESOP) seluas-luasnya. Setiap perusahaan harus diminta menetapkan skema pembagian laba untuk para pekerja. Suatu proporsi tertentu yang disepakati mengenai laba bersih perusahaan harus diminta agar sebagiannya dialokasikan untuk didistribusikan di kalangan para pekerja sebagai bonus pembagian laba dan sebagiannya lagi digunakan untuk memberikan fasilitas pelatihan, meningkatkan kondisi kerja dan memberikan pelayanan medis, jatah uang untuk pendidikan anak-anak, fasilitas perumahan, dan subsidi makanan. Hal ini akan mempunyai dampak positif bagi majikan dan pekerja, seperti, *pertama* mengurangi sikap apatis yang ada melalui peningkatan moral para pekerja, dengan begitu akan melahirkan kesungguhan yang lebih besar, pengurangan pemborosan dan produktivitas yang lebih tinggi. *Kedua*, memperbaiki hubungan antara buruh manajemen melalui partisipasi pekerja dalam manajemen. *Ketiga*, menjaga agar penghidupan para pekerja tetap fleksibel dan responsif terhadap kesehatan ekonomi nasional dan kinerja perusahaannya, bagian para pekerja meningkat pada saat perusahaan memperoleh laba yang baik, tetapi mereka tidak diberhentikan ketika laba rendah atau perusahaan mengalami kerugian. *Keempat*, mengurangi tingkat penggelapan pajak (asalkan sistem perpajakan direformasi), sebab para

pekerja, dalam mempertahankan kepentingannya sendiri akan menjaga laba aktual perusahaan yang selama ini mereka kesampingkan. *Kelima*, meningkatkan daya saing ekonomi dan perusahaan, dengan begitu akan memperbaiki iklim umum untuk investasi ekonomi dan kinerja makro ekonomi. Menerapkan skema pembagian laba ini harus menjamin bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan eksploitasi yang bisa terjadi jika upah pokok, yang bebas resiko, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja.³⁶

Dengan diterapkannya ESOP akan dapat mengurangi pemusatan kekayaan dan kekuasaan ini memungkinkan pekerja untuk memiliki saham, dengan demikian akan menambah bantuan keuangan mereka dalam kesuksesan perusahaan. Suatu bagian dalam manajemen dan partisipasi aktif dalam kebijakan boleh jadi tidak hanya meningkatkan hubungan pekerja-manajemen tetapi juga mengurangi perselisihan industri, menjadikan para pekerja lebih sungguh-sungguh dan efisien. Ini akan menaikkan tabungan, menurunkan alternatif yang tidak produktif, juga menaikkan status sosial mereka dalam perusahaan dan masyarakat.³⁷

- 5) Keuntungan yang adil kepada para pemegang obligasi dan saham yang kecil. Rendahnya tingkat keuntungan obligasi dan saham di beberapa negara karena wewenang administrasi dan korupsi perusahaan merugikan, terutama para

³⁶ *Ibid.*, h. 254.

³⁷ *Ibid.*, h. 255. ESOP ini telah diadopsi bahkan di negara-negara kapitalis seperti Prancis, Inggris dan Amerika Serikat, lihat J.W. Middendorf 11, "Employee Share Ownership: An ESOP's Moral for The Third World", *Financial Times*, 25 Maret 1987, hal. 25.

kreditor dan investor kecil. Perusahaan-peusahaan besar menggunakan perangkat berbeda untuk memperoleh keuntungan yang semestinya. Di samping itu mereka diduga menyimpan kebanyakan tabungan mereka di luar negeri untuk menghindari pajak, melindungi diri mereka dari penurunan mata uang nasional, dan untuk memperoleh suatu keuntungan pasar internasional terkait. Bagaimanapun mereka meminjam dari bank-bank lokal dan institusi keuangan pemerintah pada tingkat yang sangat tinggi atau konsesi yang lebih rendah untuk investasi domestik. Ini meningkatkan ketidakadilan. Kebijakan ini untuk mendukung pembiayaan ekuiti dan reformasi bank-bank perusahaan-perusahaan nonbank sesuai dengan syarat untuk memberikan keuntungan kepada para kreditor dan investor serta mewujudkan efisiensi alokasi, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

- 6) Keadilan untuk para produsen, pengeksportir dan konsumen. Kurs valuta asing yang tidak realistis dan kontrol harga yang tidak perlu akan merugikan para produsen dan eksportir, sedangkan proteksi yang tinggi merugikan para konsumen. Dalih bahwa langkah-langkah ini memenuhi kepentingan umum dan meningkatkan pembangunan negara biasanya hanya sekadar kedok. Kenyatannya, tidak demikian. Semuanya ini hanya memenuhi kepentingan pribadi orang-orang kaya dan berkuasa yang bertambah kaya dengan mengorbankan massa yang menjadi semakin lebih miskin. Ini menghalangi penguasa untuk mengambil kebijakan-kebijakan sehat yang akan mengekang inflasi, memperluas penawaran untuk

³⁸*Ibid*, h. 256, lihat, M.Umer. Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem...*, *op.cit.*, h. 103-118.

memenuhi kebutuhan akan barang-barang dan jasa-jasa, dan memperbesar lapangan kerja dan pendapatan.

- 7) Reformasi moral untuk pembangunan sosio ekonomi. Hubungan timbal balik antara kerja dan upah memang penting untuk menciptakan kerja keras dan efisiensi, tetapi ia tidak dengan sendirinya dapat melahirkan integritas dan kesungguhan. Ia juga tidak menjamin untuk memotivasi rakyat agar mengubah perilaku konsumsi, simpanan dan investasi sesuai dengan *maqāsid*. Pengalaman membuktikan bahwa sekularisme, baik sosialisme maupun kapitalisme tidak mampu mewujudkan tujuan-tujuan di atas. Bagaimanapun Islam mempunyai suatu potensi besar untuk menciptakan kualitas-kualitas yang dikehendaki dan memiliki kharisma yang diperlukan untuk memberi inspirasi dan mengubah masyarakat.³⁹ Suatu contoh yang sangat bagus dalam hal ini adalah yang telah terjadi pada periode awal-awal Islam. Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas tentang pembangunan dalam Islam yang berinspirasi pada masa-masa awal munculnya Islam.

Change, Development and progress, according to the Islamic view-point, refer to the return to the holy prophet (may God bless and give him peace) and his noble companions and their followers (blessing and peace be upon them all) and the faith and practise of genuine muslims after them, and they also refer to the self and mean its return to its original nature and religion (Islam).⁴⁰

³⁹M. Umer Chapra, *IEC*, *op.cit.*, h. 257.

⁴⁰Dikutip oleh Anwar Ibrahim, *Islam, Pembangunan, Keadilan Sosial*, *op.cit.*, h. 6.

Sistem sosial dan ekonomi masyarakat jahiliyah Mekkah telah diserang karena ia didasarkan kepada nilai kebendaan melulu, seperti dikatakan Bashier.

*“Capitalistic values of the money-conscious mercantile society or mecca”.*⁴¹

Al-Qur’an mencela golongan tersebut dengan keras.

*Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak ! sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.*⁴²

Begitu pula diserang kepura-puraan golongan penindas Quraish dengan ayat-ayat Al-Qur’an.

*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan Agama ? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah bagi orang yang shalat, yang mereka itu lalai dari shalatnya, yang mereka itu membuat riya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.*⁴³

Demikian juga dengan *“aristocratic of values of the high finance society of mecca”*, menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang bermegah-megah dan disibukkan oleh harta benda sehingga lupa kepada Allah, baik dalam soal harta, pangkat, kemuliaan anak, pengikut dan sebagainya, mereka itu adalah orang-orang yang merugi.⁴⁴ Untuk hal ini, Chapra mengharuskan pemerintah melepaskan kecenderungan sekuler dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk

⁴¹ *Ibid*

⁴² Q.S. al Humazah (104) :1-3

⁴³ QS. al Ma’un (107) :1-7.

⁴⁴ Lihat QS. at Takasur (102) :1-8.

gerakan reformasi. Ini akan mempercepat perubahan sosial untuk menuju pada kualitas rakyat yang dikehendaki. Kalau tidak maka erosi moral akan terus dan menyebabkan semakin menurunnya kualitas rakyat dan dampaknya sangat buruk bagi pembangunan dan stabilitas ekonomi. Penggunaan lembaga pendidikan dan media berita secara efektif akan dapat membantu pemerintah mempercepat langkah perubahan sosial dan menghapuskan atau mengurangi dengan lebih cepat pelaksanaan sejumlah nilai-nilai sosial yang tidak Islami.

b. Kemampuan

Keadilan sosio ekonomi, kesadaran moral, dan lingkungan sosial yang baik adalah penting untuk memotivasi rakyat, tetapi itu belumlah cukup untuk mewujudkan efisiensi dan keadilan. Karena, masih ada perbedaan kemampuan yang bukan sekadar bawaan tetapi juga yang diperoleh, baik melalui pendidikan dan latihan maupun akses pada keuangan. Oleh karena itu, ekspansi fasilitas pendidikan dan pelatihan dan akses rakyat miskin pada keuangan menjadi penting.⁴⁵

Telah diakui bahwa pendidikan membuka pintu untuk persamaan sosial dan peluang ekonomi, dan dengan tepat telah dianggap sebagai pemerataan yang agung dari kondisi umat manusia dan roda keseimbangan mesin sosial. Tekanan utama pendidikan menurut Chapra harus untuk menciptakan manusia yang “baik” dan “produktif”. Ini yang akan membantu memobilisasi semangat dan bakat yang masih

⁴⁵ *Ibid*, h. 259

belum dimanfaatkan di negara-negara muslim.⁴⁶ Setiap pelajar muslim harus dididik mengenai kualitas-kualitas seorang muslim sejati dan benar-benar dimotivasi untuk menanamkan kualitas-kualitas itu dalam diri mereka. Akan tetapi, ini saja tidak cukup perlu juga mengajarkan kepada mereka keterampilan yang dibutuhkan dan teknik-teknik produksi, manajemen dan pemagaran yang paling efisien. Oleh karena itu, perlu suatu perubahan yang berarti dalam kurikulum pendidikan dengan tujuan menanamkan nilai-nilai Islam dan memberikan keterampilan-keterampilan teknis yang diperlukan, juga menciptakan suatu jaringan kerja institusi-institusi yang luas sehingga anak orang miskin di pedalaman pun atau kawasan kumuh perkotaan dapat memiliki akses yang sepantasnya terhadap pendidikan teknik dan fasilitas pelatihan. Ini adalah upaya untuk menghapuskan salah satu sumber utama ketidakadilan dan kemiskinan dan memberi peluang kepada setiap orang untuk meningkatkan dasar kemampuan baik yang bawaan maupun yang tidak bawaan.⁴⁷

Adapun akses terhadap keuangan yang kurang dari orang-orang miskin menjadi faktor terpenting dari kegagalan mewujudkan basis pemilikan yang besar dari perusahaan-perusahaan dan industri. Dengan demikian, akan menyebabkan

⁴⁶Kritik Chapra terhadap sistem pendidikan sekular di negara-negara muslim, bahwa ia tidak hanya gagal membuat manusia yang "baik" tapi juga gagal menjadikannya lebih "produktif". Kurangnya fasilitas ikut memperburuk kondisi, dimana para pemuda berbakat menjadi kehilangan kesempatan. Sementara silabus konvensional yang diterapkan melahirkan generasi yang dibekali dengan ilmu-ilmu liberal yang sekular dengan orientasi utama untuk kerja administrasi dan kepegawaian yang kini telah lebih dari sangat mencukupi karena itu terjadi peningkatan tajam dalam jumlah kaum terdidik yang menganggur di kota-kota meskipun terjadi kelangkaan tenaga terlatih di beberapa sektor ekonomi. sementara orang-orang kaya dengan mudah dapat menikmati pendidikan teknik di dalam maupun luar negeri, sedang orang-orang miskin yang lebih memerlukan, tidak mampu. Ini cenderung memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. *Ibid.*, h. 260.

⁴⁷*Ibid.*, 260.

gagalnya realisasi tujuan-tujuan egaliter Islam. Sistem pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan pendapatan. Akan tetapi, tidak efektif dalam mengurangi kesenjangan kekayaan secara berarti, sehingga mengakibatkan tidak berartinya pembicaraan mengenai upaya menciptakan masyarakat Islam yang egaliter. Oleh karena itu Islam memberikan jalan keluar yang jelas melalui sistem keuangan yang dibangun dalam sistem nilainya dan yang memberikan kekuatan untuk mewujudkan keadilan sosio ekonomi.⁴⁸ Lebih jauh lagi, hal ini akan dibahas dalam bab restrukturisasi keuangan.

2. Mengurangi Pemusatan Kekayaan

Paradigma pembangunan yang lebih menekankan kepada kebijakan “economic growth” daripada pertimbangan “social justice”, saat ini telah memberikan predikat bahwa pembangunan adalah “growth with poverty” dengan jurang yang semakin melebar yang ditandai dengan pemusatan pemilikan atas sarana produksi terutama di negara-negara berkembang.⁴⁹ Inilah kendala yang paling serius untuk merealisasikan *maqāsid* dan tujuan-tujuan egaliter, sehingga perlu perubahan atau langkah-langkah radikal menuju arah kemajuan. Apa yang telah dilakukan oleh kapitalisme dan sosialisme adalah mereduksi manusia kepada suatu keadaan permanen dari perbudakan upah dan membunuh inisiatif dengan sistem kolektivisasi dan sentralisasi. Bagi Islam, apa pun usaha untuk langkah-langkah perubahan harus

⁴⁸ *Ibid.*, 261.

⁴⁹ Di antara kebijakan yang mendukung maldistribusi adalah kebijakan dualisme ekonomi. Dalam hal ini sumberdaya yang paling baik diambil untuk mengembangkan pertanian komersial besar dan berorientasi ekspor sementara petani kecil dan pinggiran tidak punya kesempatan berkembang. Mohtar Mas’oed, *op.cit.*, h. 146.

sesuai dengan martabat, kebebasan, dan inisiatif yang dikaitkan dengan konsep kekhilafahan.⁵⁰ Untuk itu, strategi yang ditawarkan oleh Chapra adalah pengembangan pemilihan dan desentralisasi pembuatan keputusan. Adapun komponen-komponen kebijakannya adalah :

a. Land Reforms

Keberadaan para tuan tanah dan lintah darat di negara-negara berkembang yang memiliki akses besar terhadap keuangan dan kekuasaan adalah benar-benar telah mengeksploitasi para petani kecil, membunuh insentif mereka, memperlambat pertumbuhan output, dan melanggengkan kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi.⁵¹ Lingkaran setan kemiskinan semakin buruk ketika diikuti dengan menurunnya kontrol sosial yang menyebabkan tingginya kejahatan dan keresahan sosial. Reformasi yang dibutuhkan adalah yang dapat mengurangi pusat-pusat kekuasaan melalui reformasi tanah dan keuangan. Dengan demikian, kebijakan redistribusi hendaknya digunakan untuk mengatasi masalah pemusatan kekayaan. Salah satu cara yang paling efektif adalah *Land reform*. Menurut M.P. Tadaro, konsep dasarnya adalah mengubah petani penyewa untuk menjadi pemegang

⁵⁰Konsep Khilafah menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di dunia, sedang amanat yang diemban adalah menyangkut manusia sebagai muslim maupun sebagai anggota dari masyarakat sosial. Dari sini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial. Khurshid Ahmad, *op.cit.*, h. 13.

⁵¹ Dalam Gerald M. Meier (Ed.), *Pioneers in Development*, Second Series (1987), h. 33. Theodore Schultz menyatakan bahwa untuk mengetahui potensi ekonomi pertanian tidak boleh tidak untuk memperhatikan insentif-insentif mereka. Insentif ini tidak hanya terbatas masalah harga tetapi juga sejumlah faktor-faktor pendukung pendapatan riil penduduk seperti, pemilikan tanah atau sewa untuk waktu tertentu, infrastruktur yang memadai (sistem irigasi jalan, pasar, listrik, input yang lebih berkualitas) dan pendanaan. Dikutip dari, M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 263.

pertanian kecil, yang kemudian akan memiliki insentif untuk meningkatkan produktivitas memperbaiki produksi, dan meningkatkan pendapatan mereka.⁵²

Dalam program *Land reform* ini menurut Chapra perlu dilakukan pembatasan maksimum kepemilikan tanah dan masalah masa sewa tanah. Pembatasan kepemilikan tanah ini dilakukan ketika kondisi memang dalam keadaan tidak adil, yang menyengsarakan rakyat miskin. Ketika dalam keadaan normal, syariah tidak menggambarkan peletakan batas semacam itu untuk kekayaan pribadi. Sejumlah ilmuwan termuka, termasuk imam Hasan al-Banna dan Maulana Abu A'la Maududi mendukung pembatasan semacam ini untuk mengembalikan suatu neraca yang adil dalam kepemilikan dan untuk melindungi kepentingan sosial.⁵³ Di negara-negara Asia Timur yang menerapkan kebijakan ini, seperti Jepang, Korsel, dan Taiwan menunjukkan hasil yang sangat positif terhadap *output* pertanian dan tenaga kerja.⁵⁴

Distribusi pendapatan pun relatif lebih adil dibandingkan negara-negara yang membolehkan berlangsungnya pemusatan kepemilikan tanah, mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi, dan distribusi yang lebih tidak adil.

Sedang tentang sewa tanah, meskipun banyak kontroversial dalam literatur fiqh, mayoritas ulama fiqh membolehkan baik tanam bagi hasil maupun sewa tanah masa tertentu. Ini sesuai dengan dibolehkannya *mudarabah* dan sewa dalam

⁵²MP Tadaro, *Economic Development in the Third World*, 5th edn, White Plains, New York: Longmans, 1994, h. 165-69.

⁵³M. Umer Chapra, *IEC*, *op.cit.*, h. 265.

⁵⁴Tanah yang dimiliki oleh tuan tanah di Jepang dibagikan (dengan kompensasi nominal) ke petani yang mengerjakan tanah tersebut. Jadi telah terjadi peningkatan pesat dalam persentase petani yang memiliki ladang sendiri. Ukuran rata-rata sebuah lahan adalah sekitar 1 hektar. Area ini cukup

syariah. Dasar rasional mereka adalah ketika kondisi mayoritas umat Islam periode awal Madinah miskin, Nabi lebih banyak menuntut dari orang kaya, yaitu dengan tidak membolehkan tanam bagi hasil dan sewa untuk masa waktu tertentu, dan membolehkan para tuan tanah untuk mengizinkan para petani menanami tanah mereka tanpa memberikan kompensasi atas tanah yang tidak bisa ditanami sendiri oleh para tuan tanah. Akan tetapi ketika kondisi ekonomi umat Islam meningkat beliau mengizinkan, baik bagi hasil maupun sewa tanah.⁵⁵ Menurut Ibnu Taimiyah, dilarangnya bagi hasil oleh Rasulullah Saw adalah khusus beberapa kasus yang memang jelas-jelas mengabaikan prinsip keadilan. Seperti satu pihak menetapkan syarat harus menerima sejumlah hasil produksi atau meminta hasil bagian dari tanah tertentu (kawasan yang subur) akan menjadi miliknya. Atau, dalam kasus yaitu pemilik tanah mendapat hasil panen, sedangkan petani penggarap tidak memperoleh apa-apa. Karena itu, Ibnu Taimiyah sangat tegas memperbolehkan.⁵⁶ Adapun alasan keberatan menerima sewa tanah untuk masa tertentu adalah adanya jaminan bagi tuan tanah untuk mendapat perolehan yang pasti meskipun penyewa boleh jadi dapat hasil atau tidak. Hal ini kemudian ulama fiqh mensyaratkan adanya validitas kontrak sewa tanah. Sebagaimana imam Malik menyatakan, jika hasilnya rusak atau penyewa itu tidak dapat menanami tanah yang disewa karena di luar kontrolnya

kecil bila dibandingkan dengan di negara-negara lain. Karena kecilnya lahan, para petani berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan produksinya. Di Korea Selatan

⁵⁵M. Umer Chapra, *IEC*, *op.cit.*, h. 266.

⁵⁶AA. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib, Surabaya : Bina Ilmu, 1997. h. 202.

(misalnya, banjir atau kekeringan) maka kontrak sewa itu dapat dibatalkan karena resiko yang berlebihan dan ketidakmenentuan (*Garār*).⁵⁷

Menyikapi alasan di atas, Chapra cenderung mengambil jalan tengah. Ia menjadikan tanam bagi hasil sebagai dasar bagi sewa tanah dan menekankan suatu bagi hasil yang adil di antara tuan tanah dan penyewa. Menurutnya, para petani penyewa dan yang tidak memiliki tanah itu lemah maka sewa tanah untuk waktu tertentu boleh jadi tetap terus menjadi sebuah sumber ketidakadilan dan kemiskinan jika ongkos sewa tinggi dan hasilnya terus tidak menentu. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil kebijaksanaan yang tepat dalam hal ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan para petani baik yang memiliki tanah maupun tidak.⁵⁸ Bagaimanapun, wewenang pemerintah telah ditunjukkan oleh Rasulullah pada periode awal Madinah. Dan, yang perlu diingat bahwa penerapan *Land reforms* tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa pemilikan tanah dikurangi di bawah suatu tingkatan tertentu yang praktis secara ekonomis.⁵⁹

b. Pengembangan perusahaan-perusahaan kecil dan mikro (SMEs)

Pengembangan perusahaan-perusahaan kecil dan mikro ini akan melengkapi *land reforms* dalam mengurangi pemusatan kekayaan dan kekuasaan di samping mempunyai keuntungan yang tinggi dalam kerangka nilai-nilai Islam,

⁵⁷M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 267

⁵⁸Kebijakan ini harus diikuti dengan membantu mereka, yaitu dengan mengadakan kredit-kredit untuk pembelian-pembelian pupuk, alat-alat serta perbaikan tanah seperti irigasi, pendidikan, kursus-kursus pertanian, cara mengolah tanah yang berbeda-beda dan sebagainya, Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 3, Yogyakarta : BPFE UGM, 1982, h. 199.

⁵⁹M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 268.

sehingga akan lebih kondusif untuk mewujudkan *maqāsid*. Dampak positifnya adalah terhadap kesehatan sosial, sebab pemilikan perusahaan cenderung menambah rasa kemerdekaan, martabat dan harga diri pemilikinya. Ini akan mendorong mereka untuk melakukan inovasi dan kerja keras demi kesuksesan perusahaan mereka, sehingga akan menciptakan lingkungan lebih sehat untuk persaingan. Dengan demikian, akan menyumbang efisiensi dan memperluas peluang kerja secara cepat.⁶⁰

c. Pemilikan dan kontrol perusahaan yang lebih luas

Untuk mengembangkan pemilikan, perlu dipilih bentuk perseroan dari organisasi-organisasi bisnis untuk perusahaan yang lebih besar. Agar tetap sejalan dengan *maqāsid* Islam, perseroan ini harus benar-benar direformasi untuk mengurangi pemusatan kekayaan dan kekuasaan, termasuk mengurangi kekuasaan yang berlebihan di tangan para direktur. Hal ini diharapkan dapat mengarah pada suatu pemilikan saham perseroan yang lebih luas dan distribusi kekuasaan yang lebih adil, tidak terbatas pada segelintir keluarga-keluarga kaya saja. Oleh karena itu, harus dilakukan penghapusan bunga dan ekspansi ekuiti yang berarti dalam struktur modal dari perseroan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶¹

d. Fungsionalisasi zakat dan waris

Zakat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keimanan sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan sosio ekonomi. Zakat yang diambil dari kaum kaya dan diserahkan kepada kaum fakir, memberikan indikasi bahwa zakat adalah

⁶⁰ *Ibid*, h. 269.

⁶¹ *Ibid.*, h. 270.

pengalihan surplus kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga tidak terjadi jurang pemisah yang terlalu lebar.⁶² Untuk itu sangat perlu memfungsikannya sehingga peran zakat menjadi maksimal. Chapra menekankan dalam pembayaran zakat diupayakan untuk menjadikan orang miskin dapat mandiri. Zakat sebagai tambahan pendapatan yang permanen hanya untuk mereka yang tidak mampu memperoleh pendapatan cukup dari usahanya sendiri. Untuk yang lain, zakat harus digunakan untuk memberikan bantuan sementara bersamaan dengan penyediaan sumber-sumber penting untuk memperoleh pelatihan, peralatan dan bahan-bahan penting untuk menjadikan mereka mampu memperoleh penghidupan yang mencukupi. Bahkan zakat bisa digunakan untuk membuat rakyat mampu mandiri dalam lingkungan ekonomi yang mendukung SMEs, sehingga dengan demikian akan mengurangi pengangguran keimiskinan dan ketidakadilan.⁶³

Sistem waris dalam Islam telah menimbulkan revolusi diam-diam dalam seluruh pembagian kekayaan, serta memperkenalkan teknik yang belum pernah ada, dalam sistem ekonomi lain.⁶⁴ Ramsay mengakui, hukum waris Islam tampak lebih masuk akal dan bijaksana daripada umumnya yang terjadi di masyarakat.⁶⁵ Islam menganggap hukum waris sebagai alat keadilan sosial. Oleh karena itu, tidak

⁶²Lihat, Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Habiduddin dkk., Jakarta : Rabhani Press, 1997, h. 418, Abul Hasan, Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam*, Malaysia: Pelanduk Publications, 1990, h. 88-94, Amim Akhtar, "Kerangka Kerja Struktural Sistem Ekonomi Islam", dalam Ainun R, Sophiaan, (Ed.), *op.cit.*, h. 98, M.A. Mannan, *op.cit.*, h. 134.

⁶³M. Umer Chapra, *IEC*, *op.cit.*, h. 274.

⁶⁴M.A. Mannan, *op.cit.*, h. 135.

⁶⁵Amin Akhtar, *op.cit.*, h. 102.

mungkin dalam kerangka nilai-nilai Islam, memberikan seluruh harta hanya kepada seorang anak sehingga mencabut hak yang lain. Dan, juga tidak seorang pun memberikan wasiat melebihi sepertiga hartanya. Jika nilai-nilai Islam diterapkan dan sistem pewarisan dilaksanakan dengan efektif, distribusi kekayaan dalam masyarakat muslim pasti akan adil.⁶⁶

e. Restrukturisasi sistem keuangan.

Tanpa restrukturisasi, keuangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, seluruh kebijakan yang dirancang tidak akan mampu mengurangi ketidakadilan sosio ekonomi.⁶⁷ Untuk masalah ini akan dibahas dalam bab tersendiri.

3. Restrukturisasi Ekonomi

Persoalan ekonomi adalah persoalan manusia, maka penanganannya pun harus berangkat dari manusia. Islam memandang manusia tidak hanya dari sisi materi semata, tetapi juga nonmateri, hal ini lepas dari perhatian kapitalis⁶⁸ dan sosialis.⁶⁹ Krisis pembangunan bukanlah semata-mata berpuncak pada krisis ekonomi akan tetapi krisis kemanusiaan seluruhnya (krisis peradaban). Oleh karena

⁶⁶M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 275-76, lihat juga, Abul Hasan, Muhammad Sadeq, *op.cit.*, h. 67, Shaikh Mahmud Ahmad, *op.cit.*, h. 137.

⁶⁷M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 298-99.

⁶⁸Dengan prinsip meraih keuntungan semaksimal mungkin (profit motive), dalam ideologi kapitalisme orang tidak akan memberi makan orang lain kalau tidak memberikan keuntungan (materi) kembali, seperti supaya orang lain tidak mencuri hartanya. Sebaliknya kalau ternyata hartanya bertambah karena membiarkan mereka kelaparan, hal itu akan dilakukan. Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun sistem ekonomi Alternatif : perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti, h. 18. Lihat premis Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, "Bukanlah dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir, atau tukang roti, kita mengharapkan mendapat makanan...", Bonnie Setiawan, *op.cit.*, h. 19.

⁶⁹Sosialis tidak hanya mengurangi kebebasan manusia, tapi juga motivasi kemanusiaan dan efisiensi ekonomi, Chapra, *al-Qur'an menuju Sistem ...*, *op.cit.*, h. xxx.

itu, analisa ekonomi tidak boleh terpisah dari kesempurnaan moral, yang tentunya melibatkan nilai yang tergabung di dalamnya keperluan *ideologi empirical* dan *pragmatic*. Dengan kata lain, nilai dan idealisme harus diterjemahkan secara praktis dan realistik. Dari sinilah Islam menawarkan perubahan yang menyeluruh (*holistic*) dan *multidimensi*.⁷⁰ Beberapa kebijakan untuk merestrukturisasi ekonomi yang ditawarkan Chapra adalah mengarah ke sana, yang meliputi :

a. Mengubah preferensi konsumen dengan filter moral

Untuk meminimalkan penggunaan sumber-sumber daya bagi pemuasan keinginan, perlu diubah preferensi konsumen sesuai dengan prioritas sosial dan juga memotivasi mereka agar bertindak sesuai dengan prioritas ini. Akan tetapi, bagaimana melakukan hal ini tanpa paksaan dan despotisme? Di sini pentingnya suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat dan suatu sistem untuk memotivasi konsumen agar menaati nilai-nilai itu. Sebagaimana ditunjukkan oleh Dodgson :

Perlu menghindari polaritas palsu antara proposisi di satu sisi, bahwa semua kebutuhan adalah subjektif dan di sisi lain bahwa kebutuhan dapat ditentukan oleh partai politik yang baik serta mengetahui atau oleh penguasa yang lalim. Konsep yang dinamis dan terbuka mengenai kebutuhan menganjurkan bahwa instruksi-instruksi yang menentukan, mengevaluasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan harus fleksibel dan bertanggung jawab baik kepada klaim-klaim individu atau perdebatan publik.⁷¹

⁷⁰Anwar Ibrahim, *Islam, Pembangunan, Keadilan Sosial*, *op.cit.*, h. 24.

⁷¹Geoffrey Dodgson, "Economics and Institutions", (1988), dikutip dari, M. Umer Chapra, *IEC*, *op.cit.*, h. 282.

Polaritas semacam ini tidak dapat dihindari baik dalam kerangka liberalisme ataupun antiliberalisme. Sebuah dimensi moral harus disuntikkan ke dalam penentuan dan pemenuhan kebutuhan. Individu harus menguji klaim-klaimnya atas sumber-sumber daya dengan filter moral sebelum klaim-klaim itu muncul di pasar. Ini akan menjawab ketidakefektifan kebijakan untuk mencegah konsumsi berlebihan yang hanya menggunakan filter harga. Meskipun demikian, bukan berarti tidak perlu diadopsi.

Dengan hanya bersandar pada harga, menjadikan orang kaya mampu membeli kemewahan dan simbol status yang dikehendaki, tidak peduli betapa mahal harga-harganya yang ditinggikan melalui pajak, bea dan penurunan nilai mata uang. Mereka yang tidak mampu juga mencoba dengan mendapatkan melalui mengurangi pemenuhan kebutuhan atau korupsi dan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Di negara-negara berkembang, dengan ketidakefisienan dan administrasi pajak yang korup, memancing cara-cara memungkinkan untuk menghindari atau mengelak dari bea dan pajak hingga dengan merendahkan harga barang-barang yang tertulis pada faktur (*underinvoicing*), menyerap, dan menyelundup. Dalam hal ini harga-harga tinggi yang diakibatkan oleh tingginya bea dan pajak mempertinggi margin keuntungan dan bukan hanya mendorong impor yang lebih besar, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi yang lebih besar dari barang-barang semacam itu dalam negeri. Tanpa disengaja, hal ini akan menyelewengkan alokasi sumber-sumber daya untuk mendukung mengejar simbol-simbol status dan menekan untuk

memenuhi kebutuhan, sehingga harga kebutuhan menjadi lebih tinggi daripada semestinya dan semakin mempersulit orang miskin.⁷²

Untuk mengawali langkah reformasi moral dalam konsumsi ini, harus dilakukan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan dalam memandang sumber daya. Untuk itu perlu dibedakan antara yang “perlu” dan “yang tidak perlu” dengan membagi semua barang dan jasa pada tiga katagori : *kebutuhan*, *kemewahan*, dan *pertengahan (intermediates)*.⁷³ Pembagian semacam ini dapat ditemukan dasarnya dalam nilai-nilai Islam. Ada pembicaraan intrinsik dalam literatur fiqh berkisar pada kebutuhan (*darūriyyat*), kesenangan (*hājiyyat*), dan kelengkapan (*tahsīniyyat*). Apa pun yang ada di luar kebutuhan telah dianggap oleh para ulama fiqh sebagai pemborosan dan kesenangan diri yang berlebihan dan sangat tidak dikehendaki.⁷⁴



Karena Islam bukanlah agama yang menolak dunia, pembagian barang dan jasa di atas adalah tetap fleksibel. Pandangan mengenai kebutuhan adalah selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kekayaan dan standar hidup secara umum. Yang terpenting di sini

⁷² *Ibid.*, h. 283.

⁷³ Istilah “kebutuhan” dapat digunakan untuk merujuk pada semua barang dan jasa yang memenuhi suatu kebutuhan dan mengurangi kesukaran, dengan begitu menjadikan suatu perbedaan nyata dalam kesejahteraan manusia. Istilah “kemewahan” bisa digunakan untuk semua barang dan jasa yang dikehendaki semata-mata karena daya tarik untuk membanggakan diri dan tidak menciptakan perbedaan nyata bagi kesejahteraan seseorang. Istilah “pertengahan” bisa digunakan untuk semua barang dan jasa yang tidak mungkin diklasifikasikan secara tegas ke dalam kebutuhan atau kemewahan, dan beberapa fleksibilitasnya dikehendaki, *Ibid.*, h. 284. Keynes membagi kebutuhan ini menjadi dua golongan; kebutuhan absolut yang sering disebut dengan “needs” dan kebutuhan relatif yang sering disebut “want” atau keinginan-keinginan inilah yang tergolong sebagai kebutuhan yang tak pernah terpuaskan, ia muncul seperti dibuat-buat melalui iklan dan tekanan sosial yang dihadapi, *Ibid.*, h. 284.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 284.

adalah pemenuhan kebutuhan dasar dari semua orang dalam suatu masyarakat muslim sesuai dengan statusnya sebagai khalifah. Tujuan ini tidak akan tercapai kecuali jika perbedaan tingkat konsumsi diizinkan sesuai dengan status dan pendapatan seseorang, tidak melebihi kemampuan sumber-sumber ekonomi. Semua ini tidak boleh mencerminkan sikap menonjolkan diri dengan kemewahan atau menimbulkan jurang-jurang sosial yang luas dan melemahkan ikatan persaudaraan Islam. Tujuan ini tidak boleh menimbulkan suatu keseragaman yang monoton dan membosankan dalam masyarakat. Kesederhanaan itu dapat diterapkan dalam gaya hidup di samping kreativitas dan diversitas. Karena itu, pembagian ke dalam tiga kategori ini harus didasarkan pada norma-norma konsumsi Islam dan sesuai dengan ketersediaan sumber-sumber daya dan dampaknya pada persaudaraan dan persamaan sosial. Penghapusan ketidakseimbangan juga harus ditumbuhkan sebagai dasar pembagian, jika ketidakseimbangan semacam itu sudah tidak bisa dicapai lagi.⁷⁵

Untuk mendukung semuanya, maka produksi, impor, dan distribusi yang termasuk dalam katagori kebutuhan harus diliberalisasikan. Kekuatan pasar harus dibiarkan memainkan peranannya yang konstruktif. Pemerintah harus melakukan apa saja yang dapat dilakukan untuk memberikan insentif dan fasilitas yang perlu untuk menambah penawaran barang-barang dan jasa-jasa yang termasuk dalam kategori ini. Pajak tidak langsung yang dianggap perlu untuk barang-barang ini harus dibuat sangat rendah. Pengkonsumsian barang-barang yang termasuk dalam kategori pertengahan harus dikurangi melalui situasi moral, bea dan pajak yang relatif lebih

⁷⁵ *Ibid.*, h. 285.

tinggi, sedangkan untuk barang-barang mewah tidak dilakukan liberalisasi. Ini untuk memantapkan bahwa alokasi sumber daya dalam ekonomi mencerminkan prioritas sosial dan ekonomi. Di sinilah perlu adanya perubahan preferensi konsumen melalui reformasi moral, jika masyarakat mengerti kewajiban sosialnya dan tanggung jawabnya kepada Tuhan dan menyadari bahwa sumber-sumber ekonomi yang langka yang mereka gunakan untuk tujuan-tujuan tidak penting akan membuat pihak lain tidak mampu memenuhi kebutuhannya, mereka akan cenderung mengubah perilakunya dengan sukarela.⁷⁶

b. Reformasi Keuangan Publik, Mendisiplinkan Pemborosan

1) Prioritas dalam pengeluaran

Adanya defisit anggaran yang tidak sehat dan terpaksa harus dibiayai dengan ekspansi moneter dan pinjaman dalam dan luar negeri yang berlebihan, kemudian menyebabkan naiknya tingkat inflasi yang tinggi serta beban pembayaran utang yang berkepanjangan, adalah gambaran dari akibat kurangnya kontrol keuangan publik dalam suatu negara.⁷⁷ Ini adalah yang banyak dialami oleh negara-negara berkembang. Kondisi ini juga sering diperburuk oleh tidak adanya prioritas dalam pengeluaran oleh pemerintah. Gambaran ini bisa dilihat dari kesenjangan pembangunan yang lebar antara kawasan desa dan kota, tidak imbangnya pembangunan yang lebar antara kawasan desa dan kota. Tidak imbangnya pembangunan infrastruktur di desa ini menyebabkan langgengnya

⁷⁶*Ibid.*, h. 286.

⁷⁷Untuk anggaran belanja defisit dan pembiayaan defisit, lihat, Mannan, *op.cit.*, h.236-237.

pertumbuhan yang lambat dan berlangsungnya ketidakadilan ekonomi, dan ini mencerminkan tidak adanya prioritas-prioritas dalam pengeluaran.

Beberapa alasan mengapa pemerintah tidak memanfaatkan sumber-sumber dayanya yang terbatas dengan lebih efisien adalah (a) Kurangnya kesadaran bahwa sumber daya yang tersedia adalah amanat Tuhan, (b) Tidak adanya filsafat pembangunan yang asli dari mereka sendiri yang dirumuskan dengan kepekaan kepada sumber daya dan nilai-nilai negara itu sendiri telah menyebabkan tidak adanya prioritas-prioritas yang mapan. Tidak adanya komitmen jangka panjang kepada filsafat pembangunan Islam, boleh jadi tidak mungkin menghilangkan kebingungan dan konflik dalam kebijakan-kebijakan yang ada, (c) sistem harga belum dipakai dan sumber-sumber terutama sumber-sumber devisa, diperoleh atau dijual oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara pada harga di bawah *opportunity costs*. Hal ini berpengaruh pada penggunaan sumber daya tidak efisien, (d) tidak adanya parlemen yang terpilih dan pers yang bebas, tercabutnya dari publik suatu forum untuk mengkritik kebijakan pemerintah.⁷⁸

Untuk pengeluaran, Chapra menunjuk pada enam prinsip-prinsip umum yang diadaptasi dari beberapa kaidah hukum yang dikembangkan selama berabad-abad oleh ulama fiqih untuk memberikan suatu dasar rasional dan konsisten untuk

⁷⁸M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 287-88.

fiqih. Prinsip-prinsip tersebut adalah :⁷⁹

- (1) Kriteria utama untuk seluruh alokasi pengeluaran harus demi kesejahteraan rakyat (pasal 58)
- (2) Penghapusan kesulitan dan penderitaan harus lebih diutamakan daripada mengejar kesenangan (pasal 17, 18, 19, 20, 30, 31 dan 32)
- (3) Kepentingan umum yang mayoritas harus lebih diutamakan daripada kepentingan segolongan kecil yang minoritas (pasal 28)
- (4) Suatu pengorbanan atau kerugian pribadi dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian umum dan suatu bahaya yang lebih besar dapat dihindari dengan menempuh bahaya yang lebih kecil (pasal 26, 27 dan 28)
- (5) Barang siapa menerima keuntungan harus menanggung biayanya (pasal 87 dan 88)
- (6) Sesuatu yang tanpanya, suatu kewajiban tidak dapat dikerjakan adalah juga wajib

Dengan defisit fiskal yang tidak sehat mustahil akan mewujudkan *maqāṣid*. Oleh karena itu, harus ada pengurangan-pengurangan pengeluaran bersama dengan realokasi yang sesuai dengan prioritas-prioritas di atas. *Pertama*, yang harus dikurangi adalah, korupsi, ketidakefisienan, dan pemborosan. Untuk

⁷⁹ Nomor-nomor yang ditulis dalam kurung di akhir setiap prinsip merujuk kepada pasal-pasal dalam “majalah al Ahkam al-‘Adliyyah” disingkat majallah. Meskipun Majallah merupakan kompendium menurut mazhab Hanafi yang dikodifikasikan selama periode ottoman, kaidah-kaidahnya hampir digunakan secara universal oleh para ulama fiqih. Lihat as-Syathibi *al Muwafaqat*, vol. 2, h. 394, Mustafā az-Zarqā (1967), vol. 2, h. 784 dan 1088. Dikutip dari , *Ibid.*, h. 289.

mengurangi ini, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, harus dengan reformasi moral, transformasi gaya hidup, dan perubahan struktural dalam ekonomi. *Kedua*, adalah bidang subsidi. Ini karena ternyata subsidi sering tidak didukung dengan meyakinkan, yang terjadi subsidi hanya menguntungkan orang-orang kaya saja, karena merekalah yang lebih mampu membayar. Oleh karena itu, cara terbaik untuk membantu orang miskin adalah melalui penambahan beasiswa, keringanan pembayaran, dan tambahan pendapatan yang diberikan dari bagian yang diperuntukkan tujuan ini oleh pemerintah atau organisasi pelayanan sosial, dana, zakat dan sumbangan sukarela atau paksa lainnya. Dengan cara ini, pemerintah bisa memberikan keringanan lebih intensif kepada yang memerlukan dengan hanya menggunakan sebagian dari jumlah seluruh pengeluaran untuk subsidi umum. Tambahan pendapatan akan memberi orang-orang miskin peluang untuk menentukan prioritas mereka terhadap barang-barang dan jasa-jasa oleh subsidi umum. *Ketiga*, adalah pencabutan secara perlahan perlindungan-perlindungan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan sektor publik. Perusahaan-perusahaan milik negara di negara-negara berkembang kinerjanya sangat tidak memuaskan. Keuntungan yang rendah membatasi kemampuannya untuk mendanai sendiri investasinya. Akibatnya sering menjadi penyebab defisit anggaran yang besar, ekspansi moneter, dan utang luar negeri. *Keempat*, adalah bidang pertahanan. Banyak negara berkembang yang membiayai pertahanan dengan biaya tinggi berdasarkan asumsi-asumsi yang berlebihan. Padahal, sangat memungkinkan untuk memiliki pertahanan dengan pengeluaran yang lebih kecil jika sumber-sumber daya yang ada digunakan secara efisien. Jika korupsi di

sektor pertahanan dihapuskan, dan jika suatu kebijakan perdamaian diadopsi dan konflik-konflik tidak perlu dengan negara tetangga dihindari. Bagaimanapun pengeluaran yang besar untuk perangkat keras pertahanan hanya akan mengorbankan secara diam-diam rakyat miskin di kota dan desa melalui pembiayaan. Inflasi dan prioritas yang rendah terhadap kebutuhan mereka. Pengeluaran pertahanan yang tinggi bahkan tidak memberikan keamanan yang diklaim pemerintah. Sumber keamanan yang sebenarnya adalah terletak pada kekuatan internal yang dicapai melalui reformasi moral, pembangunan ekonomi dan keadilan sosi-ekonomi.⁸⁰

2) Pajak yang Adil dan Efisien

Di samping menghapus pengeluaran-pengeluaran yang berprioritas rendah untuk aktualisasi pembangunan, perlu juga menambah sumber kekayaan negara dari pajak. Meskipun banyak perdebatan di kalangan ulama fiqih tentang pajak,⁸¹ Chapra lebih condong kepada yang memberikan hak negara untuk

⁸⁰M. Umer Chapra, *IEC*, *op.cit.*, h. 292. Paul Kennedy (1988) dalam "The Rise and Fall of

The Great Powers", menyatakan, suatu dasar ekonomi yang kuat adalah lebih vital bagi suatu bangsa untuk jangka panjang daripada superioritas militer; dan bangsa yang memperbesar kekuatan militernya melebihi kemampuan ekonominya berarti tengah menyongsong kehancuran, *Ibid.*, h. 294. Kesimpulan Emile Beneoit (1978) yang mengatakan adanya korelasi positif antara belanja militer dan pembangunan ekonomi adalah tidak benar. Peningkatan belanja militer cenderung mengurangi pos-pos belanja pemerintah yang lainnya sehingga dengan sendirinya memperkecil penciptaan lapangan kerja baru. Kalau permintaan diarahkan keluar negeri berarti mengalihkan kesempatan kerja domestik. Walaupun dikerjakan di dalam negeri, maka tenaga kerja terampil akan tersedot ke sektor ini sehingga merugikan sektor lain yang jauh lebih produktif, sementara peningkatan kualitas dan kuantitas secara fisik masyarakat umum tidak turut memanfaatkan. Untuk pendapat-pendapat yang menguraikan ini lihat, MP. Todaro, pembangunan ekonomi di dunia ketiga, *op.cit.*, h. 275-276.

⁸¹Kelompok yang keberatan menerima adalah, karena pengalaman, pajak disalahgunakan dan menjadi sebuah alat penindasan. *Ibid*, h. 296. Tentang pajak Ibnu Khaldun membuat asumsi "di awal pertumbuhan sebuah dinasti, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dari jumlah obyek pajak yang kecil, karena masih dijalankan sesuai dengan syariat. Pada akhir dinasti, pajak merupakan

manarik pajak dengan adil. Ia menyatakan bahwa tidak realistis membicarakan pajak harus dibatasi dengan pajak yang dibicarakan oleh ulama fiqih. Keadaan telah berubah dan timbul kebutuhan untuk memikirkan sistem perpajakan yang memperhitungkan perubahan realitas, terutama kebutuhan infrastruktur sosial dan fisik yang sangat besar bagi pengembangan dan efisiensi ekonomi modern dan memiliki komitmen untuk merealisasikan *maqāsid* dalam konteks kekinian.

Menurutnya pajak tidak hanya harus adil tetapi menghasilkan, tanpa memberikan efek merugikan insentif untuk kerja, menabung dan menginvestasi, pemasukan yang mencukupi untuk memungkinkan negara Islam modern untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif. Hak negara ini didasarkan pada kaidah 4 dan 6 dari hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “*suatu pengorbanan kecil boleh dikenakan untuk menghindari pengorbanan yang lebih besar,*” dan “*sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan adalah juga wajib*”.⁸²

Adapun kriteria pajak yang adil adalah, *pertama*, pajak digunakan untuk mendanai apa yang dianggap sangat penting untuk mewujudkan *maqāsid*. *Kedua*, beban pajak hendaknya jangan terlalu berat, sehingga melebihi kemampuan rakyat, dan hendaknya didistribusikan secara adil di antara mereka yang mampu membayar. *Ketiga*, hasil pajak hendaknya benar-benar digunakan untuk tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.⁸³

pendapat yang kecil dari obyek yang luas, saat itu sudah tidak sesuai dengan syariat, banyak penyelewengan sehingga rakyat mengelak membayar pajak. A. A. Islahi, *op.cit.*, h. 323.

⁸²M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 295.

⁸³*Ibid.*, h. 296.

Di balik semua kegiatan perpajakan di negara Islam adalah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat.⁸⁴ Oleh karena itu, menurut Chapra, mengelak dari kewajiban membayar pajak dalam masyarakat Muslim, bukan sekadar sebuah kejahatan hukum melainkan pelanggaran moral yang dapat dikenakan hukuman oleh Tuhan di akhirat. Lebih jauh lagi kalau perilaku wajib pajak ini mengurangi kemampuan pemerintah memainkan perannya dengan efektif, hal ini menghalangi realisasi *maqāṣid*.⁸⁵

3) Membatasi defisit

Ketika negara memilih kebijakan bersandar kepada ekspansi moneter dan pinjaman, maka hasilnya adalah tingkat inflasi yang relatif tinggi, penurunan mata uang yang lebih besar, defisit neraca pembayaran yang tidak tertahankan, dan bahkan beban pembayaran utang yang lebih berat. Ini semakin menekan sumber-sumber pembangunan, melambatkan pertumbuhan dan meningkatkan pengangguran dan ketegangan sosial.

Menghadapi hal ini, jauh-jauh Islam sudah mengisyaratkan dengan melarang bunga, yang berarti menurunkan pinjaman. Ini bisa dilaksanakan dengan menerapkan disiplin yang ketat untuk program pengeluaran. Dan, harus bersandar terutama pada hasil pajak untuk mendanai pengeluaran yang tidak produktif bahkan sebagian dari biaya pembangunannya, terutama biaya yang tidak dapat

⁸⁴M.A. Mannan, *op.cit.*, h. 247.

⁸⁵M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 298. Bahkan Ibnu Taimiyah melarang mengelak pajak sekalipun ketika pajak tidak adil dengan alasan bahwa mereka yang tidak membayar kewajiban pajaknya akan membebani pihak lain dengan beban yang tidak semestinya, *Ibid.*, h. 298.

dipertanggungjawabkan menurut cara pembayaran alternatif yang dibolehkan Islam. Pembiayaan juga bisa diatur dari proyek-proyek yang menguntungkan dengan cara-cara yang diterima syariah selain pinjaman. Seperti menggunakan *leasing* proyek-proyek infrastruktur yang didanai dan dijalankan oleh sektor swasta dengan dasar persaingan sesuai dengan spesifikasi pemerintah. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi korupsi dan juga membuka jalan yang lebih luas untuk kerja sama yang lebih besar antara pemerintah dan swasta. Kerja sama pemerintah dan swasta ini harus terus ditingkatkan, sehingga pembiayaan akan mengikuti suatu disiplin yang dapat menghilangkan kecenderungan pemerintah relatif mudah memperoleh pinjaman berbunga. Karena, bagaimanapun harus diupayakan untuk menghindari perangkap utang yang sangat tidak kondusif terhadap pertumbuhan dan penghapusan kemiskinan.⁸⁶

Untuk mengurangi beban pemerintah, para dermawan swasta juga didorong untuk membangun dan menjalankan institusi pendidikan, rumah sakit, perumahan orang miskin, anak yatim dan proyek-proyek pelayanan sosial lain. Reformasi sistem pajak harus dapat menghapuskan rintangan utama untuk membangkitkan institusi ini.⁸⁷

⁸⁶Dikatakan bahwa tujuan negara-negara donor adalah untuk mengintegrasikan negara-negara dunia ketiga ke dalam sistem dunia kapitalis, menjadikan negara-negara miskin bergantung kepada negara maju, dan menggunakan kekuatan finansialnya untuk meningkatkan kepentingan pribadi dan kapitalis internasional dalam ekspansinya ke setiap negara di dunia ketiga. Cheryl Payer, *The Debt Trap : The IMF and The Third World* (1972). Dikutip dari, Chapra, *Ibid.*, h. 303. Jadi memang tidak ditujukan atau diselewengkan dari tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan.

⁸⁷*Ibid.*, h. 301.

4) Meningkatkan iklim investasi : menghilangkan rintangan

Modal adalah salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan suatu negara yang ingin mencapai peningkatan pendapatan tertentu secara agregat perlu menjamin peningkatan tertentu dalam input agregat modal.⁸⁸ Di sinilah perlunya menciptakan iklim investasi yang baik, yaitu iklim yang mendorong keputusan investasi, dan membantu mempercepat penerapannya dengan menghapuskan rintangan dan resiko yang tidak semestinya dan memberikan fasilitas. Di samping tersedianya infrastruktur dan reformasi sistem pajak,⁸⁹ ada hal-hal yang juga sangat perlu diperhatikan untuk menciptakan iklim investasi.

Pertama, ketidakmenentuan politik sangat merugikan iklim investasi, karena ketakutan-ketakutan para investor terhadap perubahan tiba-tiba dalam kebijakan-kebijakan resmi yang dapat mengakibatkan kerugian besar. *Kedua*, penurunan nilai mata uang dan kontrol pertukaran. Maka klaim-klaim ke atas sumber daya melalui restrukturisasi konsumsi sektor swasta dan pengeluaran pemerintah harus dikurangi dengan cara sebagaimana telah dibicarakan. *Ketiga*, bea dan substitusi impor. Bea yang tinggi jika diterapkan dengan efektif ia dapat menurunkan impor tetapi tidak mendorong ekspor. Namun, ketika bea diterapkan di negara-negara yang administrasinya lemah dan korup, tanpa reformasi moral, maka akan memancing terjadinya penyelundupan dan pengelakan bea. Ini relatif

⁸⁸Vito Tanzi, *Public Finance in Developing Countries*, Brook Field, VT: Edward Elgar, 1991, h. 12.

⁸⁹Suatu sistem pajak yang baik merupakan landasan bagi pertumbuhan dan stabilitas. Sistem pajak yang produktif dan efisien juga dapat menghasilkan efek insentif dan pertimbangan-pertimbangan ekuiti. Dan sistem demikian menghapuskan kebutuhan untuk mencetak uang yang inflasioner. Konsesi-

akan menguntungkan barang-barang mewah yang dikenakan pajak tinggi tetapi diselundupkan. Karena itu harus ada pelarangan impor dan penggunaan barang-barang mewah sebagaimana telah dibicarakan. Selanjutnya, diterapkan promosi industri-industri substitusi impor yang bersaing. Ini tidak hanya meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan, tetapi juga menciptakan suatu dasar yang lebih luas bagi pertumbuhan ekspor. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan semuanya harus sesuai dengan tujuan-tujuan *maqāsid*. *Keempat*, kontrol birokrasi. Mungkin rintangan investasi paling besar di negara-negara berkembang adalah birokrasi. Di samping rawan terhadap korupsi, kontrol juga menyebabkan pemborosan waktu dan energi para investor dan peningkatan biaya yang tidak perlu. Spirit umum ajaran Islam adalah kebebasan berusaha dalam kerangka nilai yang Islami. *Kelima*, adalah modal bersih yang ditanamkan investor asing. Bagaimanapun modal asing sangat dibutuhkan, karena ia akan menyediakan valuta asing sebagaimana juga teknologi dan manajemen yang merupakan faktor langka di negara-negara berkembang dan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya akan menyebabkan mengalirnya valuta asing tetapi hanya jika investasi ini menghasilkan keuntungan positif. Dengan demikian, berbeda dengan pinjaman, resiko pun ditanggung bersama dengan para investor asing itu, bukan hanya oleh negara penerima modal.⁹⁰

konsensi pajak maupun insentif-insentif fiskal biasanya digunakan sebagai alat untuk menarik investasi asing langsung . Philip Kotler, *op.cit.*, h. 274.

⁹⁰ M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 304-309.

5) Merancang kembali produksi

Ketika iklim investasi telah membaik maka harus dijamin tidak ada penyelewengan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mewah tidak penting. Kebijakan harus diarahkan untuk memenuhi barang-barang modal dan bahan-bahan baku yang diperlukan. Strategi yang efektif adalah mengubah preferensi individu dengan memberikan motivasi moral dan sosial, untuk menghapuskan rintangan-rintangan dan memberikan insentif serta fasilitas untuk melahirkan komitmen jangka panjang atas dana. Semua keistimewaan dan subsidi, secara eksplisit atau implisit yang memberikan tekanan pada produksi dan impor barang-barang mewah dan simbol-simbol status harus dihilangkan. Penekanan pada fiskal, kebijakan moneter dan perdagangan pemerintah juga harus digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan, ekspor dan formasi modal. Semuanya ini akan kondusif jika tidak dilakukan penetapan bermacam-macam kontrol yang tidak efisien.⁹¹

6) Reformasi pertanian dan pedesaan

Land reform yang telah dirancang tidak ada artinya tanpa ada reformasi pertanian yang menghapuskan beberapa kerugian yang mengurangi efisiensi dan *output* sektor pertanian, meningkatkan pengangguran di desa, menekan pendapatan di desa, dan meninggikan ketidakadilan. Dalam hal ini perlu pemenuhan infrastruktur yang efisien dari ekonomi eksternal, seperti fasilitas irigasi dan drainase, pelayanan yang luas, jalan, sekolah, listrik, dan kesehatan.

⁹¹ *Ibid.*, h. 310.

Adapun penanganan dampak inflasi terhadap defisit anggaran melalui penilaian yang berlebihan terhadap kurs dan harga pangan yang diatur rendah hanya akan mengubah hubungan perdagangan yang menentang pertanian dan SMEs ini akan merendahkan hasil pertanian, meningkatkan ketergantungan kepada impor, mengurangi ekspor dan minusnya pendapatan di desa, yang tentunya memperburuk investasi yang akan meningkatkan pengangguran. Dengan demikian terciptalah lingkaran setan kemiskinan, kekurangan investasi, hasil yang rendah, dan pengangguran.

Masalah yang sering dihadapi oleh petani kecil dan SMEs adalah kekurangan dana. Hanya petani-petani besar saja yang memperoleh pinjaman dengan mudah dari institusi-institusi kredit pemerintah dan bank-bank pertanian. Akibatnya, petani-petani kecil kesulitan membeli *input-input* pertanian yang berkualitas dan mengoperasikan SMEs untuk meningkatkan pendapatannya. Kondisi ini sering menyebabkan munculnya lintah darat-lintah darat yang semakin mengekalkan kemiskinan. Di sini pemerintah dan masyarakat harus menghilangkan kerugian-kerugian ini, dan memberikan peluang kerja lebih banyak kepada penduduk desa. Ini juga bisa membantu mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dan yang penting lagi adalah, semua ini harus dibarengi dengan perubahan sikap, gaya hidup, dan kebiasaan kerja yang mekanismenya harus bertolak dari ajaran dan nilai-nilai Islam.⁹²

⁹² *Ibid.*, h. 313.

7) Menangani pengangguran dengan usaha padat karya

Peningkatan penduduk yang drastis tanpa dibarengi dengan pembangunan ekonomi yang mencukupi dapat menimbulkan banyak kesulitan, maka kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar adalah menciptakan kesempatan kerja.⁹³ Masalah pengangguran ini Chapra menyoroti ekspansi permintaan, potensi SMEs, dan peningkatan SMEs.

Kebijakan konvensional ekspansi permintaan agregat memang penting, tetapi masih perlu diperkuat oleh kebijakan lain. Karena, dalam skenario yang ada bias urban dari kebijakan pemerintah, kesenjangan pendapatan yang mencolok, dan pengaruh gaya hidup Barat. Kebijakan itu hanya akan membantu orang kaya dan mendorong membanjirnya barang-barang dan jasa-jasa impor untuk konsumsi yang berlebihan. Akibatnya manfaatnya tidak sampai pada para tukang dan pekerja. Permintaan untuk produksi mereka tidak meningkat secara berarti, dengan begitu tujuan memperluas pekerjaan tidak tercapai.⁹⁴ Namun, jika kebijakan ini dijalankan dalam perspektif untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan SMEs, manfaatnya akan cenderung merembes kepada sebagian besar masyarakat.

⁹³ Philip Kotler, *op.cit.*, h. 275.

⁹⁴ Karena menurut teori ini, bahwa dalam ekonomi pekerjaan penuh (semua orang mendapat pekerjaan) itu hanya terjadi jika permintaan bersama cukup besar, sehingga bisa memberikan pekerjaan kepada siapa saja yang ingin bekerja. Alfred W. Stonier dan Douglas C. Hague, *Teori Ekonomi*, 2, terj. Aminuddin Asmawi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, h. 79-80.

Bagi negara-negara berkembang yang mempunyai kelebihan tenaga kerja, kelangkaan modal dan valuta asing, dan kekurangan infrastruktur pendidikan untuk pelatihan dalam teknologi yang rumit, adalah lebih baik untuk memperluas peluang usaha melalui pengembangan SMEs. Perusahaan-perusahaan padat modal berskala besar tidak mampu memberikan manfaat yang lebih kepada sebagian kecil penduduk yang bekerja. Sejumlah kajian yang dilakukan oleh Michigan State University di sejumlah negara menunjukkan dengan jelas besarnya sumbangan yang diberikan oleh SMEs untuk pekerjaan dan pendapatan. SMEs menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, bukan hanya langsung melainkan juga tidak langsung dengan memperbesar pendapatan, permintaan barang dan jasa, peralatan, bahan mentah dan ekspor. Mereka adalah padat karya dan tidak menuntut banyak modal dan valuta asing. Mereka bersandar semata pada tabungan pribadi dan pendapatan yang diperoleh, dan memerlukan akses yang jauh lebih kecil kepada kredit dari pemerintah dan institusi-institusi keuangan dibandingkan dengan industri-industri berskala besar. Beberapa ilmuwan meragukan bahwa industri-industri berskala besar akan sangat cocok dengan kondisi surplus tenaga kerja dan kekurangan modal yang menjadi ciri khas negara-negara berkembang.⁹⁵ Oleh karena itu, SMEs secara luas dipandang sebagai sebuah cara efektif untuk membantu perkembangan sumbangan sektor swasta terhadap pertumbuhan dan tujuan-tujuan keadilan negara-negara

⁹⁵ Little, Scitovsky dan Scott berkesimpulan bahwa, industri modern berskala besar biasanya kurang menguntungkan dibandingkan dengan industri kerajinan yang kecil, disamping lebih banyak memerlukan biaya dalam bentuk modal dan penciptaan pekerjaan yang kecil.

berkembang. Hasan al Banna dalam Majmū' al-Rasā'il (1989), menyatakan bahwa industri kecil ini akan membantu memberikan pekerjaan yang produktif kepada semua anggota keluarga miskin, dan dengan begitu membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan.⁹⁶

Untuk mendukung SMEs ini, maka diperlukan langkah-langkah perubahan dalam lingkungan sosio-ekonomi. *Pertama*, harus ada perubahan dalam gaya hidup dari simbol-simbol status yang diimpor dan mendukung produk sederhana yang diproduksi dalam negeri yang memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan tenaga lebih banyak. *Kedua*, harus ada perubahan dalam sikap dan kebijakan resmi ke arah SMEs sedemikian rupa, sehingga mereka tidak dibubarkan karena dianggap sebagai anak ikan kecil yang tidak efisien dan sisa-sisa yang menyalahi zaman pada masa lalu, tetapi harus didorong dan dibantu untuk mewujudkan potensinya yang cukup besar. *Ketiga*, mereka harus dijadikan mampu memperoleh, melalui bantuan dalam perolehan *input* yang lebih baik, teknologi yang lebih tepat, teknik pemasaran yang efektif, dan pelayanan lain yang diperluas untuk bersaing dalam kualitas dan harga dengan produk-produk industri berskala besar dan impor. *Keempat*, mereka juga harus didorong untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui fasilitas pelatihan yang baik. Ini akan menuntut penyelidikan yang teliti dari institusi-institusi pendidikan untuk menghapuskan ketidaksepadanan antara keterampilan yang dituntut dan pendidikan yang ditawarkan. *Kelima*, perlu juga menghapuskan, jika tidak

⁹⁶ M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 314-316.

mengubah arah dari bias yang ada yang mendukung industri-industri berskala besar yang merupakan salah satu rintangan utama untuk ekspansi SMEs.⁹⁷

Adapun beberapa manfaat yang diberikan oleh SMEs dengan menggunakan teknologi sederhana adalah : (a) menuntut mengeluarkan modal yang kecil, dengan demikian menyerap angkatan kerja yang tumbuh dengan suatu jumlah modal yang lebih kecil, (b) mengurangi permintaan keterampilan yang tinggi dan dengan begitu cocok untuk negara-negara berkembang dengan standar melek huruf dan pendidikan teknik yang relatif rendah, (c) dapat menggunakan materi lokal yang tersedia dengan lebih baik dan mengurangi pemakaian atas sumber-sumber valuta asing, (d) memungkinkan untuk mengembangkan dan memproduksinya secara lokal, dengan begitu membantu mengurangi ketergantungan pada teknologi impor, (e) memungkinkan untuk dikenalkan di kota-kota kecil dan di kawasan desa, dengan demikian mengurangi disparitas pendapatan regional dan pemusatan penduduk di sejumlah kecil pusat-pusat kota, yang cenderung diciptakan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar dengan padat modal dan teknologi yang rumit. Oleh karena itu, wajar kalau Schumacher dalam "*Small is Beautiful*" (1973) menyebut teknologi yang sederhana ini dengan sebutan "teknologi dengan wajah manusia". Bahkan teknologi yang sederhana ini berpotensi melahirkan suatu peningkatan yang cukup cepat dalam produktivitas di

⁹⁷ *Ibid*, h. 317.

negara-negara berkembang. Ia tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan dan standar hidup tetapi juga redistribusi yang lebih adil.⁹⁸

4. Restrukturisasi Keuangan

Barangkali tidak perlu diperbincangkan lagi tentang pentingnya lembaga keuangan dalam kehidupan sosio-ekonomi.⁹⁹ Masalahnya adalah bagaimana lembaga yang menduduki posisi vital ini dapat berperan maksimal dalam memberikan sumbangan terhadap penghapusan ketidakseimbangan, dan terhadap intermediasi yang adil dan efisien dari sumber-sumber keuangan. Untuk tujuan itu, lembaga ini perlu diperbaiki demi menghindari berbagai eksese dan ketidakseimbangan yang dapat mendorong ketidakadilan. Ternyata, dalam perkembangannya lembaga ini tidak sesuai dengan tujuan dan fungsinya.¹⁰⁰ Adapun perubahan-perubahan yang ditawarkan Chapra adalah : (a) menjadi penengah yang adil dengan mendanai SMEs dan menghapuskan kekurangan-kekurangan atau resiko-resiko, (b) menjadi perantara yang efisien.

a. Menjadi penengah yang adil

Dalam sistem perbankan konvensional, adalah tidak rasional meminjamkan jumlah yang banyak kepada anggota masyarakat miskin sebagaimana yang mereka

⁹⁸ *Ibid.*, h. 318.

⁹⁹ Tidak ada sistem ekonomi yang dapat mempertahankan kesehatan dan ketahanannya atau memberikan sumbangan secara positif terhadap pencapaian tujuan-tujuan sosio-ekonomi tanpa dukungan uang dan sistem perbankan yang handal. M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, *op.cit.*, h. xxxii.

¹⁰⁰ Sistem keuangan konvensional berdasarkan bunga tidak dapat membantu mewujudkan salah satu atau kedua tujuan ini; (1) membiayai sejumlah perusahaan yang terbaik, (2) membiayai produksi, impor dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat, M. Umer Chapra, *IEC*, *op.cit.*, h. 327.

pinjamkan kepada orang kaya, atau meminjamkan jumlah sama dalam jangka waktu yang sama kepada masing-masing. Umumnya, yang dilakukan oleh bank adalah meminjamkan hanya kepada individu dan perusahaan yang mempunyai jaminan yang diperlukan dan yang kaya.¹⁰¹ Distribusi kredit yang tidak adil ini merugikan masyarakat, karena menyebabkan perekrutan para pengusaha hanya dari satu kelas sosial dan kegagalan masyarakat untuk menggunakan seluruh bakat usaha mereka. Orang miskin menjadi miskin bukan karena ketidakmauan mereka bekerja keras atau karena kurangnya keterampilan. Justru, mereka itu bekerja lebih keras dan berketerampilan dibandingkan dengan orang-orang kaya. Masalahnya adalah mereka tidak mempunyai akses kepada sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk menjadi pengusaha. Dan, sebagai pekerja keterampilan mereka juga tidak dimanfaatkan dengan optimal, atau upah yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi untuk investasi. Ini jelas tidak sesuai dengan tujuan mewujudkan distribusi pendapatan yang adil, dan menghapuskan kemiskinan serta pengangguran di desa dan di kota.¹⁰²

Maka penyediaan kredit untuk perusahaan-perusahaan mikro pemula adalah suatu cara untuk membantu mengakhiri lingkaran setan kemiskinan ini. Dengan mengadopsi sistem keuangan Islam, reformasi ini akan lebih kondusif.¹⁰³ Bila

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 328

¹⁰² *Ibid.*, h. 328-29.

¹⁰³ Sistem keuangan Islam telah menghilangkan salah satu sumber ketidakpastian dan ketidakadilan serta lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan. Hilangnya ketidakpastian (dengan sistem bagi hasil) berpengaruh positif kepada proses pengambilan keputusan, dan resiko usaha juga

memungkinkan, sebuah masyarakat muslim untuk menggunakan gabungan kemampuan usaha di kalangan orang miskin dan menghentikan hasil yang diperoleh dari sumbangan orang kaya agar SMEs dapat dibuat untuk *output*, pekerjaan, dan distribusi pendapatan. Penanggungungan bersama-sama atas resiko bersamaan dengan imbalan yang diberikan oleh institusi keuangan akan mengurangi secara berarti pentingnya posisi pengusaha kecil. Ia akan menyelamatkan dirinya dari beban bunga yang sangat berat pada saat-saat sulit dengan kesediaannya untuk membayar tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada masa yang baik.¹⁰⁴

Ada dua hal yang menyebabkan kekurangan atau ketidakmampuan lembaga keuangan untuk mendanai pertanian-pertanian kecil dan SMEs, dan itu harus dihilangkan. *Pertama* adalah kerugian ekonomi yang serius ketika sektor ini beroperasi. Ini dapat dihapuskan dengan menghilangkan bias implisit dalam kebijakan-kebijakan resmi yang mendukung perusahaan-perusahaan berskala besar di perkotaan dan menggantikannya dengan suatu komitmen yang kuat kepada dukungan terhadap petani-petani kecil dan SMEs. Yang *kedua*, adalah resiko dan pengeluaran yang lebih besar yang dihadapi oleh bank-bank komersial. Ini dapat dikurangi dengan mengurangi resiko dan pengeluaran pinjaman bank-bank komersial kepada unit-unit seperti itu. Resiko yang lebih besar dari pendanaan SMEs menyebabkan disyaratkan jaminan yang berat dan mahal yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka. Ini bisa dikurangi dengan melakukan skema jaminan pinjaman yang

terdistribusikan secara lebih merata dan karenanya iklim investasi lebih membaik. M. Umer Chapra. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil, op.cit.*, h. 100.

¹⁰⁴ M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 329

sebagiannya ditanggung oleh pemerintah dan sebagiannya lagi ditanggung oleh bank-bank komersial.¹⁰⁵ Pengeluaran tambahan yang diadakan oleh bank-bank komersial dalam mengevaluasi dan mendanai SMEs sebagiannya bisa diganti rugi oleh pemerintah demi kepentingan realisasi *maqāṣid*. Pengeluaran yang wajar dari sumber-sumber pemerintah untuk tujuan ini adalah dibenarkan oleh *maqāṣid* ataupun pengeluaran publik. Meskipun demikian, sebagian biaya tambahan juga harus ditutup dari bank-bank dan SMEs untuk mempromosikan tanggung jawab dan efisiensi yang lebih besar. Sekali SMEs dipercaya dan sistem ini mulai berjalan, diharapkan biaya yang harus ditanggung bersama oleh pemerintah akan menurun.

Bagaimanapun kekhawatiran akan kerugian pinjaman dari pendanaan SMEs ini tidak perlu berlebihan. Pengalaman Dana Internasional Pembangunan Pertanian (*International Fund for Agricultural Development, IFAD*) menunjukkan bahwa kredit yang diberikan kepada usaha-usaha orang miskin yang mau berusaha segera mereka membayar kembali dari penghasilan mereka yang lebih besar.¹⁰⁶ Laporan *Select Committee on Hunger* juga menunjukkan bahwa proyek-proyek perusahaan mikro telah mencatat tingkat pembayaran kembali pinjaman yang sangat berarti dan mengesankan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Dalam sistem pangan Islam skema jaminan pinjaman ini tidak akan mencakup semua risiko kerugian pinjaman. Ia hanya mencakup risiko "moral", risiko usaha yang ditimbulkan oleh bank atau peminjam. Karenanya skema ini tidak dibebani dengan kerugian besar sebagaimana yang ada dalam skema konvensional, *ibid.*, h. 331.

¹⁰⁶ Lihat *The Economist*, 16 Februari 1985, h. 15.

¹⁰⁷ Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 331-32.

b. Menjadi perantara yang efisien

Dalam sistem perbankan konvensional, sering terjadi alokasi sumber-sumber pendanaan tidak efisien. Dengan menganggap kekuatan jaminan dan membayar bunga sebagai pertimbangan utama, menjadikan tujuan penggunaan kredit sebagai pertimbangan sekunder. Akibatnya, kredit dapat digunakan untuk tujuan apa pun, tidak memandang apakah untuk investasi yang produktif atau tidak, yang penting ada jaminannya.¹⁰⁸ Ini mengakibatkan terjadi tekanan yang tidak perlu atas sumber-sumber daya yang langka dan penurunan dalam persediaannya untuk investasi produktif dan pemenuhan kebutuhan.

Dalam sistem Islam yang berdasarkan keadilan dan pembagian bersama resiko dan keuntungan, pertimbangan-pertimbangan nilai dan tujuan penggunaan sangat dipertimbangkan dalam pengalokasian sumber daya. Dengan demikian akan terjadi efisiensi lebih besar baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, penerapan nilai-nilai konsumsi Islam yang efektif membantu mengurangi secara berarti permintaan untuk membiayai pembelian barang-barang tidak penting dan konsumsi berlebihan.¹⁰⁹ Di sisi penawaran, dengan sistem bagi hasil akan cenderung menjadikan bank-bank bersikap hati-hati dalam mengevaluasi proposal-proposal. Dalam hal ini pendanaan akan tersedia untuk sektor swasta dan pemerintah hanya untuk proyek-proyek produktif. Kemampuan untuk menyediakan

¹⁰⁸ Ini karena Bank Konvensional lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan industri, karena saham riilnya tidak ada disana. Mereka dikendalikan motif memburu untung. M.A. Maman, *op.cit.*, h. 173.

¹⁰⁹ Untuk nilai-nilai konsumsi lihat Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, h. 137-169.

jaminan juga tidak menjadi pertimbangan utama.¹¹⁰ Karena saluran kredit untuk tujuan-tujuan yang tidak produktif berkurang, hal ini akan memberikan sumbangan yang sehat terhadap penghapusan ketidakseimbangan dan realisasi keadilan dan efisien.

5. Perencanaan kebijakan Strategis

Terakhir dari lima dimensi kebijakan yang ditawarkan oleh Chapra adalah perencanaan kebijakan strategis. Secara umum, perencanaan ini dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan segenap proses pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu, juga untuk mengendalikan tingkatan dan laju pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok (pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, nilai ekspor, impor dan sebagainya) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹¹ Dengan demikian, perencanaan ini sangat penting, karena akan menjadikan negara dapat menggunakan perhitungan realistis mengenai seluruh sumber daya fisik dan manusia yang tersedia dan meletakkan seperangkat prioritas yang dirumuskan dengan baik. Ini membantu memberikan arah yang jelas pada kebijakan dan program-program pemerintah serta memulai langkah efektif untuk melahirkan perubahan struktural dan institusional yang diperlukan untuk memungkinkan pemerintah dan swasta memberikan

¹¹⁰ Untuk bentuk-bentuk investasi dan penggunaan dana. Lihat M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, *op.cit.*, h. 138-150.

¹¹¹ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, *op.cit.*, h. 197.

sumbangan yang besar.¹¹² Sebagaimana hal ini juga yang diakui oleh Abraham

Lincoln :

*Apabila sejak awal kita tahu di mana kita berada, dan tahu pula ke mana arah yang akan kita tuju, maka kita dapat memutuskan dengan baik apa yang seharusnya kita kerjakan serta bagaimana kita harus melakukannya.*¹¹³

Salah satu alasan diperlukannya perencanaan dalam negara Islam menurut Mannan adalah meskipun negara-negara Islam umumnya masih terbelakang, tetapi mereka memiliki sumber alam yang luas dan tergolong penghasil penting dari komoditi primer serta produsen kekayaan mineral. Untuk melakukan eksploitasi sistematis sumber alam yang luas itu diperlukan suatu perencanaan ekonomi yang strategis.¹¹⁴

Perencanaan semacam ini sulit diwujudkan kecuali jika pemerintah mau menjadikan syariah sebagai sumber inspirasi dan kesejahteraan semua rakyat, bukan kelompok, sebagai komitmennya. Untuk tujuan ini, Chapra memberikan beberapa acuan kebijakan yang harus dilakukan.¹¹⁵

- 1) Perencanaan tidak harus menyeluruh dan dirigiste, dengan suatu kontrol-kontrol peraturan yang ruwet untuk mencapai keseimbangan seluruh *output* dan *input* dan alokasinya di antara unit-unit kecil dari sektor ekonomi.

¹¹² M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 335.

¹¹³ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, op.cit.*, h. 196.

¹¹⁴ M. A. Mannan, *op.cit.*, h. 376.

¹¹⁵ M. Umer Chapra, *IEC, op.cit.*, h. 336-37.

- 2) Tidak bersandar kepada pemerintah yang menjadi sumber utama investasi dan usaha, karena menyebabkan ekonomi kurang responsif terhadap perubahan-perubahan dan menghalangi inisiatif individu dan usaha.
- 3) Menguji pemakaian sumber daya dengan mekanisme filter dan nilai-nilai Islam dan memotivasi serta mengaktifkan sektor swasta melalui reformasi moral dan institusional sebagaimana juga insentif ekonomi, untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan efisien dan keadilan yang optimal untuk mewujudkan *maqāshid*.
- 4) Meletakkan prioritas dalam kerangka kerja syariah untuk menganalisis alokasi sumber daya yang ada dan menunjukkan arah perubahan. Ini juga untuk mengartikulasikan nilai-nilai Islam berkenaan dengan konsumsi, tabungan, investasi, dan etika kerja.
- 5) Mengklasifikasikan barang-barang dan jasa-jasa ke dalam tiga kategori *kebutuhan, kemewahan, dan pertengahan*.
- 6) Memotivasi pegawai publik dan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan mengaktualisasikan keadilan sosio ekonomi.
- 7) Reformasi kebijakan dan institusi ditujukan untuk menghapuskan ketidakadilan yang ada. Semuanya mendapat imbalan yang layak atas sumbangannya terhadap *output*, serta menghilangkan indikasi-indikasi monopoli dan monopsoni.

- 8) Menetapkan perubahan struktural yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran dan meninggikan tingkat pertumbuhan tanpa menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan eksternal.
- 9) Menunjukkan institusi-institusi yang harus didirikan atau direformasi untuk mengurangi secara berarti kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ada, dan mewujudkan suatu pemilikan perusahaan dan aset perolehan pendapatan yang mempunyai sumber besar.
- 10) Meliputi reformasi sistem perbankan sesuai dengan ajaran Islam untuk menjadikan alokasi sumber daya secara efisien dan adil, dan juga sistem pendidikan untuk melahirkan pelajar-pelajar muslim yang lebih baik dan produktif.
- 11) Tidak hanya memusatkan kepada satu langkah tertentu atau bersandar kepada kontrol yang tidak semestinya. Semua kebijakan, fiskal, moneter, pendapatan, impor dan produksi harus dirumuskan dalam kerangka rencana kebijakan strategis ini.
- 12) Kontrol termasuk dalam penggunaan valuta asing untuk transaksi-transaksi neraca yang sedang berlangsung hanya digunakan bila, dan sejauh ia perlu. Kebijakan umum untuk menggantikan kontrol dengan reformasi sosial dan institusional akan membantu menghapuskan ketidaksamaan dalam pemberian imbalan materi, membangkitkan motivasi diri untuk maju, dan tidak hanya membantu mengurangi

korupsi dan mencapai efisiensi tetapi juga semakin memudahkan inovasi dan penyesuaian dengan keadaan yang berubah-ubah.

- 13) Memberikan perhatian khusus terhadap pengaruh yang merugikan dari segala langkah kebijakan bagi orang miskin, dan harus direncanakan metode yang dapat mengganti kerugian atau meminimalkan hal ini.
- 14) Tidak boleh ada perubahan kebijakan terlalu sering, bermain-main dengan perubahan kebijakan hanya akan menimbulkan ketidakmenentuan, dan hanya memperkaya mereka yang mempunyai akses kepada sumber-sumber orang dalam. Akan tetapi, kesalahan yang telah dilakukan dalam mempersiapkan rencana ini harus diperbaiki dengan pikiran terbuka dan tanpa ditunda-tunda.
- 15) Karena pemberian sumber kepada negara-negara muslim adalah berbeda, rencana kebijakan strategis yang sama boleh jadi tidak cocok untuk diterapkan di semua negara, meskipun pada dasarnya *maqāṣid* itu adalah sama.

BAB VI

PENUTUP

Bab ini berisi tentang refleksi dari seluruh pembahasan, yaitu kritik Chapra dan alternatif kebijakan yang ditawarkan. Dalam bab ini akan dikemukakan dilema diterapkannya teori-teori ekonomi Barat, dan apa seharusnya yang dilakukan oleh NSB khususnya negara-negara Muslim untuk mewujudkan cita-cita *maqāṣid*, kemudian disimpulkan dalam kesimpulan pembahasan dan selanjutnya catatan dan saran dari penulis.

A. Refleksi

Ide-ide Chapra ini berangkat dari kritik yang dilakukan terhadap sistem-sistem yang ada. Dalam kritiknya, Chapra menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan dalam perspektif sistem-sistem yang berlaku saat ini telah mengarah kepada inkonsistensi, dan telah memperburuk problema-problemanya, tidak hanya meningkatkan ketidakseimbangan eksternal dan makroekonomi, tetapi juga mengecewakan tujuan-tujuan untuk mewujudkan keadilan.

Kegagalan ideologi pasar dalam mendistribusikan kekayaan secara adil dan ketidakmampuan sosialis dalam menciptakan efisiensi adalah alasan yang sangat kuat bagi NSB khususnya negara-negara Muslim untuk menerapkan sistem tersendiri yang sesuai dengan tujuan sosio-ekonominya. Bagaimanapun teori-teori *mainstream* yang diadopsi dari Barat (*euro-sentrisme*) adalah hasil refleksi dari akumulasi pengalaman sekelompok bangsa, maka keabsahannya pun tidak selalu relevan bagi sekelompok bangsa lain karena konteks sejarah dan struktur politik yang berbeda.¹

¹ Arif Hartono. *op.cit.*, h. 80.

Pada awalnya, banyak para pemimpin NSB beranggapan bahwa keterbelakangan mereka adalah disebabkan oleh penjajahan. Mereka berpendapat bahwa dengan berakhirnya penjajahan masalah pembangunan ekonomi tidak banyak masalah. Akan tetapi sejarah membuktikan, ternyata kemerdekaan tidak merupakan jaminan bahwa pembangunan ekonomi akan berjalan dengan lebih cepat dan lancar.

Kesalahan juga dilakukan oleh negara-negara maju dan badan-badan internasional. Mereka beranggapan bahwa masalah kekurangan modal dan tenaga ahli adalah penghambat utama pembangunan NSB. Oleh karena itu, dengan memberikan bantuan modal dan tenaga ahli, pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Kebenaran pendapat ini dipertanyakan, karena di berbagai NSB bendungan raksasa yang tidak digunakan secara efektif, pabrik baja raksasa yang tidak dijalankan secara efisien, dan berbagai proyek lainnya yang tidak mencapai tujuan yang diharapkan, merupakan bukti nyata dari kedangkalan pandangan ini.

Pendapat bahwa pembangunan di NSB merupakan persoalan sederhana pun akhirnya terbantah. Pada masa lalu terdapat pandangan bahwa jalan yang harus ditempuh untuk maju dengan cepat adalah dengan sesegera mungkin mengadakan industrialisasi, karena negara-negara maju pada umumnya adalah negara industri. Namun, kegagalan beberapa negara yang berusaha menerapkan strategi ini membuktikan lagi bahwa pembangunan bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Masalahnya bukan terletak pada industrialisasinya, melainkan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut haruslah dipertimbangkan pula banyak faktor lain, baik faktor infrastruktur maupun suprastruktur (nonekonomi). Program industri yang sangat bernafsu, tetapi mengabaikan banyak faktor lain pada akhirnya akan

menghasilkan perkembangan sektor industri yang tidak efisien serta menghamburkan sumber-sumber daya yang ada.² Meskipun ada perencanaan tetapi cenderung terjadi penyimpangan luar biasa terhadap prioritas. Hal ini terjadi sebagaimana yang dialami oleh Uni Soviet sebelum kemudian sistem ekonominya ambruk. Gagalnya industrialisasi dan pertanian kolektif di Uni Soviet juga menggarisbawahi realitas bahwa kekuatan tidak dapat menggantikan baik kepentingan pribadi maupun nilai-nilai lebih luhur yang mendorong manusia bekerja untuk diri mereka sendiri dan orang lain.³

Ketika reformasi berorientasi pasar diadopsi secara luas oleh hampir semua negara berkembang di awal 1980-an, orang-orang mulai berspekulasi tentang kemunculan *konsensus ideologi konvergensi universal*, atau tentang *kemenangan* ide-ide liberal. Namun, ketika disparitas yang diakibatkan adopsi strategi-strategi pembangunan berorientasi pasar menjadi semakin memberikan gambaran yang jelas, maka keruntuhan dari apa yang disebut konsensus pun bisa disaksikan. Kebangkitan ekonomi neoklasik tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan apa yang telah gagal dilakukannya pada masa lalu. Munculnya studi keberhasilan negara-negara Asia Timur oleh Bank Dunia, *The Asian Miracle* (1993) yang ternyata model perekonomiannya jauh dari prototipe *laissez faire* adalah salah satu bukti keretakan konsensus ini.⁴ Sangat tidak beralasan bagi NSB untuk setia menerapkan ide-ide pasar ini dengan paksa. Dalam kenyataannya justru negara-negara penganjur ide-

² Sadono Sukirno, *op.cit.*, h. 9-10.

³ M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. 85.

⁴ Muhadi Sugiono, *op.cit.*, h. 175

ide pasar yang mulai meragukan kemujarabannya, juga menerapkan sistem kuota dan tarif terhadap perdagangan luar negerinya.⁵

Dari sini kemudian bisa disimpulkan bahwa menerapkan ide-ide pasar secara paksa juga sama buruknya dengan melakukan intervensi pemerintah yang berlebihan. Sebagaimana yang telah dinyatakan dengan tepat oleh *Paul P. Streeten* tentang kebijakan pasar (promosi ekspor), dan intervensi negara (substitusi impor) :

..... Selama kerangka sosial dan politiknya tidak diperbaiki, maka apa pun yang dipilih oleh suatu negara berkembang, entah itu kebijakan promosi pasar yang bertumpu pada mekanisme pasar maupun kebijakan substitusi impor yang mengandalkan intervensi pemerintah, ketimpangan kesejahteraan domestik akan terus saja memburuk. Meskipun prosesnya berbeda, dampak akhir yang akan ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan itu sama saja.....⁶

Pernyataan ini merekomendasikan bahwa untuk mewujudkan suatu tatanan sistem ekonomi yang mendukung pemerataan distribusi yang lebih adil dan efisien harus dilakukan perbaikan kerangka sosial dan politik yang kondusif. Inilah yang ditekankan oleh *Chapra*, bahwa akar permasalahan yang sebenarnya dari semua ketidakadilan haruslah dimulai dari perbaikan secara menyeluruh. Yaitu perubahan dari seluruh pusat kekuatan di dalam masyarakat yang diadaptasi melalui reformasi politik, ekonomi dan sosial, sehingga tidak ada individu atau kelompok yang dapat mengambil manfaat yang tidak semestinya dengan cara melanggar prinsip-prinsip dasar sistem tersebut. ⁷ Targetnya adalah kesehatan sosial yang terpancar dari dalam kesadaran manusia, disertai dengan keadilan dan keterbukaan pada semua tingkat

⁵ Lihat, Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Buku tiga, Surabaya : FE UNAIR, 1999, h. 2.

⁶ Dikutip dari, Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, *op.cit.*, h. 81.

interaksi manusia. Kesehatan itu tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya transformasi moral dari setiap individu dan masyarakat.⁸ Menurut Chapra ini, harus dikembalikan kepada tiga prinsip pokok yang dijadikan landasan pandangan Islam untuk mewujudkan *maqāṣid*, yaitu *tauhid*, *khilāfah*, dan *'adālah*.⁹ Karena, hanya dengan demikian, akan mampu mengubah pandangan manusia terhadap konsep hidup sebagai manusia yang mempunyai dua hubungan yang tidak terpisahkan, *vertikal* dan *horizontal*.

Untuk merencanakan suatu sistem ekonomi yang adil dan bijaksana, menurut Chapra tidak ada alternatif selain melakukan *Islamisasi* sistem yang ada.¹⁰ Sebagaimana juga yang direkomendasikan A.M. Saefuddin terhadap perlunya pemugaran kembali ilmu ekonomi yang diterapkan saat ini, baik secara *ontologis*, *epistemologis*, dan *aksiologis*. Misalnya, perlu dipertanyakan dasar asumsi yang digunakan dalam ilmu ekonomi liberal bahwa manusia adalah binatang ekonomi (*homo economicus*), dan bahwa manusia pada dasarnya adalah egois, selalu mementingkan dirinya sendiri. Kebaikan yang dapat timbul pada tindakannya adalah semata-mata untuk menjaga kepentingannya sendiri dan bukan oleh dorongan moral lain sebagainya.¹¹

Islamisasi ini mengimplikasikan suatu usaha serius untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material semua rakyat dan meletakkan keadilan sosio

⁷ M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. 199.

⁸ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, *op.cit.*, h. xxv

⁹ M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. 201.

¹⁰ *Ibid.*, h. 347.

¹¹ AM. Saefuddin, "Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi" dalam, M. Rusli Karim, (Ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Tiara Wacana dan P3EI UII, 1992, h. xviii.

ekonomi, yang merupakan tujuan utama pesan Islam. Pada sisi spiritual, ketenangan pikiran yang sangat penting bagi kebahagiaan batin tidak dapat dicapai tetapi dengan menambah kedekatan manusia kepada penciptanya. Ini tidak mungkin diwujudkan dengan baik oleh pandangan sekularisme. Pada sisi material, Islamisasi menuntut alokasi dan distribusi semua sumber, *amanat* Tuhan, dalam bentuk yang efisien dan adil sehingga dapat mewujudkan *maqāṣid*, dan menjadikan semua memperoleh *hayāt ṭayyibah*. Ini menuntut penggunaan semua unsur pokok strategi Islam dengan seimbang dan efektif untuk melakukan penggunaan secara menyeluruh dalam batas-batas ketersediaan sumber daya dan merealisasikan tujuan. Dengan demikian, Islamisasi tidak berarti terhapusnya liberalisasi. Bagaimanapun adalah bentuk lain dari liberalisasi - yaitu seluruh keputusan ekonomi sektor publik dan swasta mula-mula harus lolos dari ujian filter nilai-nilai moral sebelum ia diterapkan dalam disiplin pasar. ¹² Dengan kata lain, Islamisasi akan memanusiakan kekuatan-kekuatan pasar dan mewujudkan efisiensi dan keadilan dalam menggunakan sumber-sumber yang langka.

Karena tujuan utama pesan Islam adalah kesejahteraan spiritual dan material, serta keadilan sosio-ekonomi, maka semua unsur kebijakan yang mempengaruhinya harus digunakan secara seimbang. Inilah yang disebut oleh Chapra sebagai pendekatan *komprehensif*. Bukan pendekatan dalam kerangka perspektif *sekuler liberalisme* Neo-Klasik yang hanya meletakkan keadilan sebagai kepentingan sekunder. Bagaimanapun, keadilan tidak dapat disiapkan dalam kerangka bebas nilai dan, jika disiapkan, tidak dapat diterapkan tanpa suatu sistem

¹² M. Umer Chapra, IEC, *op.cit.*, h. 348.

motivasi yang efektif - suatu sistem yang dapat mendorong individu agar berbuat untuk kepentingannya dalam batas-batas kesejahteraan sosial.¹³

Dalam sebuah masyarakat sekuler, kepentingan pribadi tidak dapat mendorong individu untuk memenuhi kewajiban sosial mereka dengan sungguh-sungguh kecuali jika hal itu menyumbang bagi kepentingannya. Dengan demikian, *optimalitas pereto* adalah norma perilaku logis bagi masyarakat semacam itu, tidak memandang mereka berpaham kapitalis maupun sosialis. Sementara Islam memberikan suatu perspektif jangka panjang untuk perbuatan manusia. Islam tidak menghendaki individu melupakan kepentingan mereka sendiri di dunia. Namun, sebagai *khalifah* manusia tidak layak bertindak ekstrim untuk menjadi manusia ekonomi (*homo economicus*) dan mengabaikan kesejahteraan orang lain. Untuk menciptakan keseimbangan semacam ini Islam telah memberikan suatu dimensi spiritual dan berjangka panjang kepada kepentingan pribadi. Individu harus menjaga kepentingannya di dunia ini yang sangat pendek, juga kepentingannya di akhirat yang kekal. Keyakinan atas pertanggungjawaban kepada Tuhan dan Hari Akhir dapat berperan penting dalam menahan kepentingan pribadi dan mendorong perilaku yang berorientasi kesejahteraan sosial.

Paksaan dari negara tidak dapat menjalankan fungsi ini sebab kemungkinan ini bukan mudah bagi negara dan banyak celah untuk melepaskan diri dari akibat yang merugikan, dari tindakan resmi melalui penyuapan dan eksploitasi pengaruh politik atau ekonomi seseorang.¹⁴ Sehingga, struktur kekuasaan yang serba negara (*corporatist*) menyimpan banyak potensi untuk terjadinya distorsi memang benar. Karena, ia cenderung bersifat monopolis, dan kecenderungan ini biasanya menjalar

¹³ *Ibid.*, h. 351.

¹⁴ *Ibid.*, h. 220.

ke dunia ekonomi yang melibatkan penguasa dan pelaku ekonomi dengan menerapkan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan monopoli. Ini semua karena tercabutnya sistem filter dan motivasi yang diberikan oleh Islam dari tatanan sosial yang ada.

Islamisasi yang ditawarkan oleh Chapra dengan pendekatan *komprehensif* adalah solusi yang tepat untuk mengubah semua komponen sosial demi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan *maqāṣid*. Meskipun demikian, Islamisasi ini oleh Chapra dianggap sebagai suatu proses yang bertahap. Ia tidak dapat dicapai dengan serta merta dengan menggunakan kekuatan atau regimentasi. Yang penting adalah adanya kemauan dari umat Islam itu sendiri untuk mengadopsi ajaran-ajarannya dan mengamalkan reformasinya. Kebijakan dan pengertian harus menjadi sendi Islamisasi, sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an :

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*¹⁵

Untuk merealisasikan tujuannya Chapra merumuskan gagasannya ke dalam lima dimensi kebijakan. Semuanya harus dijalankan dengan seimbang dan menyeluruh. *Pertama*, adalah pembangunan unsur manusia yang lebih dikenal dengan *human capital*. Sebagai unsur yang utama ia sangat menentukan berhasil tidaknya suatu sistem kebijakan. Tidak ada yang bisa berjalan, apakah itu “tangan kasat” ataupun “terselubung” kecuali jika unsur ini diubah. Dari sini tampak bahwa kegagalan teori-teori Barat adalah karena kurangnya perhatian pada unsur ini.

¹⁵ Q.s. an-Nahl (16) : 125

Kedua, untuk mewujudkan distribusi yang adil dan merata, kebijakan-kebijakan harus diarahkan kepada mengurangi pemusatan kekayaan. *Ketiga*, untuk menciptakan keseimbangan yang mantap dengan kondisi sumber-sumber daya yang langka harus dilakukan restrukturisasi ekonomi. *Keempat*, restrukturisasi keuangan. Ini harus menyeluruh agar dapat memberikan sumbangan penuh terhadap penghapusan ketidakseimbangan dan terhadap intermediasi yang adil dan efisien dari sumber-sumber keuangan. *Kelima*, untuk memberikan arah ke mana tujuan pembangunan suatu bangsa maka harus dilakukan perencanaan kebijakan strategis yang dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Sungguhpun pemikiran Chapra ini belum terealisasi penerapannya, sehingga sah saja orang meragukannya. Namun, kritiknya yang berangkat dari kegagalan teori-teori sebelumnya kiranya juga tidak salah untuk dijadikan alternatif dan tempat kembali. Bagaimanapun pendekatan-pendekatan segar guna mencapai tujuan efisiensi dan keadilan bersama adalah sangat dibutuhkan di tengah krisis yang tetap memprihatinkan dan kondisi umat yang kebingungan. Harapan untuk hidup lebih baik setelah merdeka belum kunjung tiba. Problema-problema tetap tidak teratasi, kebutuhan pokok tidak terpenuhi, ketidakadilan meningkat, dan keadilan sosioekonomi tidak terwujud. Defisit anggaran yang berlebihan telah menyebabkan ekspansi moneter yang cepat dan tingkat inflasi yang tinggi di kebanyakan negara Muslim. Ketidakseimbangan eksternal yang besar telah menambah ketergantungan kepada bantuan asing. Ini telah menjerat mereka dalam genggamannya pemberi pinjaman dan bantuan asing dan mengobati problema-problemnya dengan

menggunakan resep Barat yang gagal. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran Chapra dalam hal ini adalah menggugah kembali semangat umat Islam yang hampir padam dan membawa ke arah penemuan kembali jati diri dan potensi untuk meningkatkan pertumbuhan keadilan dan stabilitas politik di negara-negara Muslim.

B. Kesimpulan

1. Kegagalan teori-teori pembangunan yang dibangun dalam perspektif Barat menurut Chapra adalah karena pendekatan yang dipakai adalah pendekatan parsial. Pendekatan ini mengimplikasikan kepada konsekuensi-konsekuensi logis yang sering terabaikan, seperti : (a) penekanan pertumbuhan yang mengabaikan pemerataan, ini diindikasikan dengan kebijakan yang menekankan kepada akumulasi kapital saja dengan orientasi pertumbuhan cepat, (b) tidak mencerminkan adanya prioritas kebijakan. Pembangunan satu sektor sering disertai dengan mengorbankan sektor lainnya (optimalitas pareto), (c) tidak adanya strategi yang menyentuh problema-problema ekonomi secara langsung, seperti penanganan ketimpangan dengan menerapkan *trickle down effect*, (d) kebijakan-kebijakan yang dijalankan tidak seimbang, seperti kebijakan promosi ekspor versus substitusi impor, pertanian lawan industri, perkotaan lawan pedesaan, kekuatan pasar lawan dirigiste dan sebagainya, sehingga sering menimbulkan masalah ketidakmerataan. Ini mencerminkan tidak adanya tujuan yang diarahkan kepada mewujudkan kesejahteraan umat.
- 2 Tidak adanya mekanisme yang menciptakan motivasi dan filter nilai bagi manusia untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Hal ini membuat konsep-konsep sebegus apa pun baik kapitalis maupun sosialis menjadi tidak berfungsi dengan baik dan efisien.

3. Keberhasilan negara-negara Asia Timur yang sama sekali tidak mencerminkan *laissez faire* memudahkan klaim Barat terhadap kemujaraban ideologi pasar, sekaligus menekankan pentingnya faktor-faktor nonekonomi dalam pembangunan.
4. Semua kegagalan dan kekurangan di atas menurut Chapra karena teori-teori Barat adalah bertolak dari pandangan hidup yang sekuler yang tidak memiliki komitmen sama sekali terhadap nilai-nilai kemanusiaan apalagi kepada Tuhan.
5. Pendekatan yang ditawarkan oleh Islam menurut Chapra adalah pendekatan yang holistik yang dalam menangani permasalahan harus dapat menyentuh segala aspek yang ada.
6. Untuk itu harus ada mekanisme yang memberikan motivasi bagi manusia untuk berbuat sebaik-baiknya dalam mengemban amanat pembangunan, dan memberikan filter nilai yang dapat membatasi manusia untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan iklim pembangunan.
7. Ini dapat dilakukan jika ada perubahan-perubahan mendasar dari faktor manusia sampai kepada institusi-institusi pendukung lainnya. Hal inilah yang disebut oleh Chapra dengan Islamisasi seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik.

C. Catatan dan Saran-saran

Untuk mengakhiri pembahasan perlu kiranya dikemukakan di sini beberapa saran dan catatan sebagai rekomendasi ataupun implikasi dari kajian ini.

Sebagai kajian kritis terhadap teori dan kebijakan, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan refleksi kepada kita untuk tidak mengulangi atau mengekalkan kesalahan-kesalahan lama dengan menerapkan konsep-konsep yang telah gagal dan tidak sesuai dengan Islam.

Meskipun perubahan ke arah yang dicita-citakan bukanlah tugas yang ringan, namun tidak harus memberhentikan langkah kita untuk menjalankan kewajiban (menegakkan *maqāṣid*). Bagaimanapun kegagalan negara-negara Muslim dalam menangani ketidakadilan dan ketidakseimbangan selama ini adalah karena tidak adanya Islam secara nyata di negara-negara Muslim itu sendiri, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Terakhir, penulis menyadari akan keterbatasan kajian ini. Untuk itu perlu kiranya dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut sehingga ditemukan suatu konsep yang benar-benar dapat membantu umat Islam untuk mewujudkan *maqāṣid*. Tesis ini hanya membahas kritik Chapra terhadap paradigma dan kebijakan ekonomi pembangunan, itu pun hanya beberapa masalah saja. Tentunya masih banyak pemikiran yang belum terungkap, sehingga diperlukan studi lanjutan yang bisa menyempurnakan kajian ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syaikh Mahmud, *Economics of Islam*, Pakistan : SH. Muhammad Ashraf, 1952.
- _____, *Economics of Islam : A Comparative Study*, Pakistan : SH. Muhammad Ahraf, 1968.
- Arief, Sritua, *Teori dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta : CIDESINDO, 1998.
- Arndt, *Pembangunan Ekonomi, Studi tentang Sejarah Pemikiran*, terj. Fahzemil, Jakarta : LP3ES, 1991.
- Arif, Saeful, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, edisi 4, Yogyakarta : STIE YKPN, 1999.
- Atal, Yogesh, “Konfrontasi dan Konsesus: Tinjauan Mengenai Perdebatan”, dalam, Atal dan Pieris, (Ed.), *Kritik Asia Terhadap Pembangunan*, terj. Hasan Basari, Jakarta : YIIS, 1980.
- Baswir, Revrison, *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- _____, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IDEA, 1997.
- _____, *Pembangunan tanpa Perasaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, IDEA dan ELSAM, 1999.
- Beling dan Totten, *Modernisasi, Masalah Modal Pembangunan*, terj. Mien Jobhaar dan Hasan Basari, Jakarta : Rajawali dan YIIS, 1985.
- BurmaNews Network (BNN), EBN, JVI.net, The Atlantic Monthly, Soros Foundations, 18 Januari 1997.*
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Cernea, Michael M. (Ed.) *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan : Variabel-variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan*, Jakarta : UI Press, 1988.
- Chapra, M. Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, terj. M. Sonhadji dan Murwanto, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- _____, *Islam and The Economic Challenge*, Kenya : The Islamic Foundation, 1992.

- Hayek, Fredrich A., *New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas*, Chicago : University of Chicago Press, 1985.
- Herrkk, Bruce dan Charles P. Kindleberger, *Economic Development*, fourth edition, Singapore : McGraw Hill, 1984.
- Hoemardani, Soedjono, *Renungan Tentang Pembangunan*, Jakarta : CSIS, 1981.
- Ibrahim, Anwar, "Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat", dalam Ainur R. Sophiaan (Ed.), *Etika Ekonomi Politik*, Surabaya : Risalah Gusti, 1997.
- Ibrahim, Anwar, *Islam, Pembangunan, Keadilan Sosial*, Surakarta : Hapsara, 1982.
- Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 3, Yogyakarta : BPFE UGM, 1982.
- Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, edisi 5, Yogyakarta : BPFE, 1992.
- Islahi, A.A., *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib, Surabaya : Bina Ilmu, 1997.
- Iwardono SP, *Uang dan Bank*, Yogyakarta : BPFE, 1991.
- Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terj. D. Guritno, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.
- Kedaulatan Rakyat*, 14 April 2000.
- Kunio, Yoshihara, *Pembangunan Ekonomi Jepang*, edisi 2, terj. Pondam Guritno, Jakarta : UI press, 1992.
- Kirzner, Israil M., "Pandangan Austrian Terhadap Krisis" dalam Daniel Bell dan Irving Kristol, (Ed.), *Krisis Teori Ekonomi*, terj. Umar Juoro, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Komisi Selatan, *Tantangan yang Menghadang Selatan*, terj. Suwandi S. Brata, Jakarta : Gramedia, 1990.
- Kompas, 5 Juni 2000.
- Kotler, Philip, dkk., *Pemasaran Keunggulan Bangsa*, terj. Aldi Jenie, Jakarta : Prenhallindo, 1998.
- Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1997.

- Kunio, Yoshihara, *Pembangunan Ekonomi Jepang*, edisi 2, terj. Pondam Guritno, Jakarta : UI press, 1992.
- Khurshid Ahmad, (ED.), *Studies in Islamic Economics*, Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1980.
- Lane, Jan Erik dan Suante Ersson, *Ekonomi Politik Komparatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.
- Lesmana, Tjipta, *Runtuhnya Kekuasaan Komunis*, Jakarta : Erwin Rika Press, 1992.
- Lindert, Peter H., *Ekonomi Internasional*, terj. Agustinus Subekti, Jakarta : Bumi Aksara, 1993.
- Mannan, MA., *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yusa, 1997.
- Mangkoesebroto, Guritno dan Algifari, *Teori Ekonomi makro*, Yogyakarta : STIE YKPN, 1998.
- Mangkoesebroto, Guritno dan Algifari, *Teori Ekonomi makro*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1998.
- Mas'ood, Mohtar, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994.
- Maududi, Abul A'la, *Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, terj. Abdullah Suhaili, Bandung : al-Ma'arif, 1980.
- Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Muljana, B.S., "Beberapa Pengertian dan Masalah Mengenai Pembangunan Ekonomi," dalam Hendra Esmara, penyunting, *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Myrdal, Gunnar, *Asian Drama : An Inquiry into The Poverty of Nations*, London : Penguin, 1968.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun sistem ekonomi Alternatif : perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter 2*, Yogyakarta : BPFE, 1987.
- Numani, Farhan dan Ali Rahnama, *Islamic Economic System*, Malaysia : S. Abdul Majjed & Co, 1995.

- Nurkse, R., *Masalah Pembentukan Modal di Negara-Negara yang sedang Membangun*, terj. Hutagalung, cet. 2, Jakarta : Bhratara, 1964.
- Pamungkas, Sri Bintang, *Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*, Jakarta : Yayasan Daulat Rakyat, Edisi Kedua, 1996.
- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Habiduddin dkk., Jakarta : Rabbani Press, 1997.
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Rachbini, Didik, *Ekonomi Politik, Paradigma, Teori, dan Perspektif baru*, Jakarta : CIDES, 1996.
- Raharjo, Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990.
- Sadeq, Abul Hasan Muhammad, *Economic Development in Islam*, Malaysia : Pelanduk Publications, 1990.
- Salim, Emil, "Pembangunan Berkelanjutan", dalam M. Arsyad Anwar, dkk. (Ed.), *Pemikiran, Pelaksanaan, dan Perintisan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Salus, Ali ahmad, *al-Muamalah al-Maliyah al-Muashirah fi Mizan al-Fiqh al-Islami*, Kuwait: al Fafah, 1986.
- Seligman, Edwin R.A., "Introduction", dalam Adam Smith, *The Wealth of Nations*, vol. II, London : JM. Dent and Sons Ltd., 1960.
- Setiawan, Bonnie, *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga*, Yogyakarta : Putaka Pelajar, 1999.
- Stallings, Barbara, 'Introduction: Global Change Regional Response', dalam Barbara Stallings, (Ed.), *Global Change, Regional Response: The New International Context of Development*, Cambridge : Cambridge University, 1995.
- Stewart, Frances dan Paul Streeten, *Strategi-strategi Baru Pembangunan, Kemiskinan Pembagian Pendapatan*, dalam Thee Kian Wie, (penyunting), *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*, Jakarta : LP3ES.
- Stonier, Alfred W. dan Dauglas C. Hague, *Teori Ekonomi, 2*, terj. Aminuddin Asmawi, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

- Sindhunata, Menuju Masyarakat Risiko”, dalam , **BASIS**, Edisi Januari-Februari 2000.
- Subangun, Emmanuel, **Dari Saminisme ke Posmodernisme**, Yogyakarta : CRI Alocita, 1994.
- Sugiono, Muhadi, **Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga**, terj. Cholish, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Sukirno, Sadono, **Ekonomi dan Pembangunan, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan**, Medan : Barto Gorat, 1981.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, **Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami**, terj. Anshori Umar Sitanggal, Bandung : al-Ma’arif, 1983.
- Sumodiningrat, Gunawan, **Membangun Perekonomian Rakyat**, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998.
- Suwarsono dan Alvin Y.SO, **Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia**, Jakarta : LP3ES, 1991.
- Todaro, Michael P., **Ekonomi untuk Negara Berkembang**, edisi ketiga, terjemahan Agustinus Subekti, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- _____, **Economic Development in the Third World**, 5th edn, White Plains, New York : Longmans, 1994.
- _____, **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, edisi 6, jilid 1 , terj. Haris Munandar, Jakarta : Erlangga, 1998.
- _____, **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, edisi keenam, jilid 2, terjemahan Haris Munandar, Jakarta : Erlangga, 1998.
- _____, **Economic for Development World**, London : Longman, 1977.
- Tanzi, Vito, **Public Finance in Developong Countries**, Brook Field, VT : Edward Elgar, 1991.
- The Economist**, 16 Februari 1985.
- The Economist**, 22 Juli 1989.
- The Economist**, 7 Oktober 1985.
- Thee Kian Wie, “ Pendekatan Dependencia Dalam Sejarah Perekonomian: Suatu Kritik”, dalam Hendra Esmara, penyunting, **Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan**, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1987.

Tjokroamidjojo, Bintaro, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : Gunung Agung, 1982.

Wiratmo, Masykur, *Ekonomi Pembangunan, Ikhtisar Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta : MW. Mandala, 1992.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN

AYAT-AYAT AL-QUR'AN

No	Ayat	Bab	Hal
1.	Q.S. as-Shaf (61): 4 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص	V	149
2.	Q.S. al-'Araf (7): 54 ألا له الخلق والأمر	V	150
3.	Q.S. Yusuf (12): 40 إن الحكم إلا لله	V	150
4.	Q.S. al-'Araf (7): 3 اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء	V	150
5.	Q.S. Ali Imran (3): 159 وشاورهم في الأمر	V	151
6.	Q.S. asy-Syura (42): 38 وأمرهم شورى بينهم	V	151
7.	Q.S. al-Baqarah (2): 208 يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين	V	159
8.	Q.S. al-Humazah (104): 1-3 ويل لكل همزة لمزة . الذي جمع مالا وعدده . يحسب أن ماله أخذه . كلا لينبذن في الحطمة	V	168
9.	Q.S. al-Maa'un (107): 1-7 أرءيت الذي يكذب بالدين . فذلك الذي يدع اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين . فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراءون ويمنعون الماعون	V	168
10.	Q.S. an-Nahl (16): 125 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين	VI	216